Abhisam DM
Hasriadi Ary
Miranda Harlan

MEMBUNUH INDONESIA

Konspirasi Global Penghancuran Kretek

Prolog
Noe 'Letto'

Epilog
Mohamad Sobary

“Sekarang budaya kretek sedang ditikam. Dan kalau pelan-pelan kebudayaan terbunuh, bisa dipastikan persekutuan kolonialis global semakin leluasa membonsai Indonesia. Kita pun semakin dikerdilkan, dan semakin mudah dipermainkan. Buku ini membekali wawasan dan pengetahuan kita untuk terus melawan setiap upaya penghancuran kebudayaan lokal.”

—**Butet Kertaradjasa,** aktor

“Jika ingin menciptakan suatu tatanan baru dunia yang lebih adil, hal paling mendasar yang harus digempur adalah fa’al (anatomi) kemunafikan dalam sistem politik, hukum, ekonomi, dan budaya internasional. Terlalu banyak ukuran-ukuran ganda (*double standard*) etika dan moral, praktik-praktik kerahasiaan (*secrecy*), pengistimewaan (*privilege*), pembeda-bedaan (*discrimination*), dan persekongkolan jahat (*conspiracy*) dalam sistem yang kita anut dan jalankan selama ini. Contoh paling mutakhir, dan belum rampung, adalah kemandekan perjanjian internasional tentang produk-produk pertanian dalam rangkaian perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Inti masalahnya hanyalah karena negara-negara industri maju, dengan segala tipu-daya, berusaha mati-matian melindungi keberlangsungan sektor pertanian mereka sambil, pada saat yang sama, memaksa negara-negara berkembang seperti Indonesia melucuti semua piranti proteksi dan hambatan tarif perdagangan di sektor yang sama.

Meskipun memusatkan perhatian pada satu komoditas khas bernama ‘kretek’, buku ini sebenarnya mengungkap sejarah panjang dari kemunafikan global tersebut yang mematikan banyak sekali komoditas rakyat di negeri ini. Pengungkapan semacam ini sangat penting, karena memang masih sangat jarang dikemukakan, terutama melalui pemberitaan media massa, tetapi juga juga dalam pelajaran-pelajaran baku teori politik ekonomi di lembaga-lembaga pendidikan formal. Buku ini akan sangat membantu masyarakat awam memahami akar permasalahan di sebalik isu-isu neraca

perdagangan yang kian timpang, impor yang kian membanjir, daya saing produk-produk dalam negeri yang kian melemah, dan pembiaran industri kecil rakyat digencet atau malah dicaplok nyaris tanpa perlindungan sama sekali.

Dalam hal ini, sejarah sebenarnya bukan berulang, tapi hanya berketerusan (*la estoria continua*). Jika sejarah ketidakadilan dan keserakahan semacam itu terus berlanjut, maka perjuangan untuk menentangnya juga tak boleh berhenti (*a luta continua*)."

—**Roem Topatimasang,** guru keliling sukarela Sekolah Rakyat di pedalaman Papua, Maluku, dan Sulawesi

---

"Tentang kretek, operator globalisasi memiliki agenda tersendiri. Agenda licik yang semuanya ditelanjangi di buku ini. Tapi percayalah, dengan kerja keras, ketekunan, kreativitas, dan spiritualitas Timur, kita pasti berhasil mengangkat identitas kultural kita."

—**Hanneman Samuel, Ph.D.,** kandidat Guru Besar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

---

"Mitos-mitos kesehatan telah diciptakan. Bahaya tembakau dibesar-besarkan. Semuanya bukan dalam kerangka kejujuran ilmiah, melainkan atas nama kepentingan. Maka, tak banyak yang mau membuka mata bahwa partikel asap rokok bisa diolah menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Baca buku ini, dan sedikit banyak Anda akan paham apa yang sesungguhnya sedang terjadi."

—**dr. Saraswati, MPsi,** peneliti pada Lembaga Penelitian Peluruhan Radikal Bebas, Malang

"Semakin lama saya merekam realitas di negeri ini, semakin kuat saya rasakan jika negeri ini telah kehilangan jati diri. Buku ini mengisahkan mengapa hal itu bisa terjadi."

—**Darwin Nugraha,** pembuat film dokumenter, pemenang Festival Film Indonesia 2009 kategori Film Dokumenter Panjang Terbaik

---

"Regulasi yang mengkriminalisasi produk ekonomi lokal semacam kretek, menjadi bukti bahwa politik legislasi kita sudah mengarah pada pembunuhan kedaulatan ekonomi, yang berujung pada penghancuran kedaulatan politik dan kebudayaan. Pemimpin dan wakil rakyat yang tidak membela nasib jutaan petani tembakau di lorong-lorong pedesaan, harus digulingkan kekuasaannya, hari ini juga, karena telah mengkhianati amanat konstitusi sebagaimana yang dicita-citakan *founding fathers* Republik Indonesia."

—**Gugun el Guyanie,** penulis, peneliti Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

---

"Buku ini memberi penyadaran bagi kita untuk mau menerima dan membela apa yang telah menjadi milik kita. Soal identitas lokal adalah soal yang lebih dari layak untuk dibela."

—**Andy Seno Aji,** desainer grafis

"Kretek pernah menjadi simbol pergerakan nasional. Sepak bola pernah menjadi alat perjuangan nasional. Kini—sejak hampir 20 tahun terakhir—kretek bersama industrinya memberi *support* penuh pada sepak bola nasional, betapa pun fluktuatifnya prestasi dan bahkan carut-marutnya kompetisi. Tidak ada industri lain, tidak juga pemerintah, yang punya kepedulian setinggi itu.

Belakangan ini pikiran saya terganggu oleh kemunculan orang-orang yang sok peduli dengan sepak bola nasional. Mereka menyatakan prihatin dan mengelus dada karena sepak bola nasional lekat dengan rokok, tapi tidak memberi solusi. Ke mana mereka puluhan tahun terakhir ini? Apa kontribusi mereka bagi sepak bola nasional selama ini? Buku ini cukup meredakan gangguan pikiran saya. Setidaknya saya mendapat gambaran latar belakang dan motivasi orang-orang sok peduli itu."

—**Daru Supriyono, SH,** advokat, suporter sepak bola,
Sekretaris Umum Slemania

"Satu pengantar sederhana untuk mulai memahami neokolonialisme."

—**Ambara M. Prakoso**, jurnalis televisi

Abhisam DM
Hasriadi Ary
Miranda Harlan

MEMBUNUH INDONESIA

Konspirasi Global Penghancuran Kretek

Abhisam DM
Hasriadi Ary
Miranda Harlan

MEMBUNUH INDONESIA

Konspirasi Global Penghancuran Kretek

kataĸata

MEMBUNUH INDONESIA
Konspirasi Global Penghancuran Kretek

Penyelaras:
Abhisam DM

Penyunting:
Miranda Harlan, Iqbal Aji Daryono

Penulis:
Abhisam DM
Hasriadi Ary
Miranda Harlan

Desain Cover & Tata Letak: Reza Alfarabi

ISBN:
Cetakan Pertama, Desember 2011

Penerbit Kata-kata
Jl. Masjid Baru No. 25B, Pejaten Timur
Jakarta Selatan
Telp/Fax: 021-36433157

Sejarah akan terulang kembali.

Kata itu tak pernah punya makna yang berarti buat saya. Sejarah akan terulang, dengan pelaku yang berbeda, *output*-nya juga berbeda, *so what? Njuk ngopo?* ...... kira-kira begitu pikir saya.

Sebelum masuk ke tema 'sejarah', saya sepertinya tidak tahan kalau tidak berkomentar tentang bingkai di mana 'sejarah' ini bergolak. Secara implisit dan eksplisit, bacaan ini banyak meletakkan titik persoalan dari kacamata bingkai Indonesia. Yaitu sebuah negara di Asia Tenggara, kenyang dijajah, merasa merdeka, dan merasa lahir tak lama setelah bom atom meledak di negeri salah satu penjajahnya.

Setelah merdeka.

Melalui pendidikan dasar, menengah, sampai tinggi, di benak kita terbangun persepsi bahwa penjajahan selalu identik dengan penindasan. Dan penindasan terkonotasi dengan perbuatan sewenang-wenang untuk memaksakan kehendak. Hmm...

Jadi, kalau memaksakan kehendak dengan alasan yang 'mulia' dan tidak terlihat sewenang-wenang, kata 'memaksakan kehendak' menjadi tidak terlalu 'menjajah-menjajah' amat, *'gitu?*

Di sini terlihat perkembangan paradigma yang sangat menarik. Ada rumus baru untuk menjajah secara 'halal', menjajah yang bebas hujatan, bahkan menjajah dengan sebuah cara, sehingga yang dijajah tak merasa terjajah. Yaitu memaksakan kehendak dengan motif atau alasan yang (seolah-olah) tepat alias mulia. Cara kekerasan untuk menjajah sudah kuno dan terlalu kasar.

Sayangnya, cara pandang kita sendiri belum dirombak untuk memahami fenomena baru ini. Padahal seharusnya tidak terlalu sulit untuk menilai sesuatu sebagai bentuk penjajahan atau bukan. Yaitu menilai kembali apa yang digemborkan sebagai ‘mulia’, yang menjadi dasar ‘pemaksaan terselubung’ tersebut. Menilai sendiri! Tidak hanya mengadopsi.

Buku ini memaksa saya membuka catatan-catatan lama tentang matinya industri minyak kelapa, garam dan industri-industri ‘asli’ Indonesia. Sangat tidak ingin saya menyimpulkan dengan gegabah dari hasil penggalian-penggalian tersebut, tetapi sering sekali kesimpulan-kesimpulan itu datang sendiri seperti curahan hujan di mendung yang kelam (maaf kalau *lebay*). Bagaimana kedaulatan yang saya percayai sejak saya bisa ikut upacara bendera dulu, ternyata tak lebih bisa dipercayai dari cerita kancil mencuri timun. Cerita anak-anak belaka.

Motif saya sederhana, bukan teori konspirasi atau pelarian anak bangsa yang frustrasi (walaupun sesungguhnya agak frustrasi juga). Saya hanya tidak mau dijajah lagi. Apa pun bentuknya: fisik, ideologi, ekonomi, atau entah nanti apa lagi. Dan langkah pertama yang harus dilakukan adalah identifikasi. Jangan-jangan, selera musik yang saya dengarkan pun hasil dari penjajahan secara halus. Lantas apa yang menjadikan diri kita adalah kita? Ini, jujur saja, meresahkan saya.

Buku ini menjadi sangat menarik ketika kita membacanya sebagai referensi wacana untuk merumuskan segelar peristiwa. Terutama bukan tentang pro dan kontra, tetapi dalam mencoba memandang sesuatu dari sudut yang lebih lebar, dan melihat pada lapisan yang lebih dalam. Terutama tentang carut-marutnya perdebatan sikap kita terhadap rokok; maaf, terhadap kretek.

Dari pembahasan tentang kretek ini saja, saya merasa diberi pe-er besar. Apakah tugas saya sebagai generasi (yang merasa) muda, benar-benar mengisi kemerdekaan? Atau sebenarnya kita malah belum merdeka? Apakah perjuangan menuju kemerdekaan itu sendiri belum selesai? Karena definisi penjajahan pun dinamis dan tidak pada satu sudut, cara, dan jarak pandang saja.

Pertanyaan ini jelas mengganggu saya. Jadi rekomendasi saya: Jangan baca buku ini kalau Anda tidak ingin pikiran Anda terganggu. Jangan baca buku ini jika Anda merasa sudah di zona aman dan nyaman. Jangan baca buku ini jika Anda merasa sudah banyak tahu, dan tidak begitu peduli seandainya ada kemungkinan yang Anda tahu itu ternyata palsu.

Jangan.

Jakarta, 10 November 2011
Noe 'Letto'

DAFTAR ISI

KRETEK

Becermin pada Komoditas Nasional Lain

"Penjajah tidak akan punah dan tidak sudi enyah dari muka bumi Indonesia ini, meskipun pada tanggal 17 Agustus 1945 telah kita proklamasikan kemerdekaan Indonesia!"
(Soekarno)

Mata Sirajuddin nanar mengenang perjalanan hidupnya. Di tahun 90-an, ia pernah berjaya dengan usaha minyak goreng Mandar[1] di kampungnya, Desa Rea Barat, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat[2]. Kini pria paro baya itu terdampar menjadi tukang ojek di Makassar. Padahal di masa kejayaan usahanya, ia dan keluarganya hidup berkecukupan.

Nilai produksi industri minyak Mandar, yang sentranya tersebar terutama di Kabupaten Polman dan Majene, pada tahun 1998 mencapai Rp 4,96 milyar. Pengelolaan industri rumahan ini semakin berkibar setelah berdirinya sejumlah Koperasi Usaha Bersama (KUB) yang mengoordinir pemasaran[3]. KUB Melati di Majene, misalnya, yang memasarkan minyak kelapa dengan merek Mayang Kelapa, berhasil menembus pasar antarpulau, bahkan sampai Jakarta pada masa itu.[4]

1 Minyak Mandar, atau *lomo mandar*, begitu orang setempat menyebutnya, diolah dengan cara tradisional untuk mempertahankan kualitas minyak. Makanan yang diolah dengan minyak ini terasa lebih wangi dan gurih. Kekentalan minyaknya pun lebih lama, serta mampu bertahan di atas setahun masa penyimpanan, sekalipun tanpa bahan pengawet kimia. Aromanya justru merebak kembali saat dipakai menggoreng.

2 Kabupaten ini dulunya bernama Polewali Mamasa (Polmas). Namun sejak 2005, tiga kabupaten (Majene, Mamuju, dan Polewali-Mamasa) yang sebelumnya merupakan wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan, diputuskan menjadi Provinsi Sulawesi Barat, dengan ibukota provinsi di kota Mamuju. Selanjutnya, Kabupaten Polewali-Mamasa juga dimekarkan menjadi dua kabupaten terpisah (Kabupaten Polewali-Mandar (Polman) dan Kabupaten Mamasa).

3 Dalam lintasan sejarah, mengikuti perkembangan perdagangan kopra yang sedang laju pesat di tahun 1830-an, di wilayah Mandar pernah berdiri Bank Rakyat Mandar, yang memberikan kredit kepada para petani dan pedagang kopra hingga 23 ribu gulden. Bank semacam ini juga ada di Makassar, Bontahain, Parepare, Wajo, dan Bone. Penjelasan lebih rinci lihat Asba (2007).

4 "Minyak Mandar Bisa Digenjot Lebih Gencar", *Bisnis Indonesia* edisi 14 Desember 1999, http://groups.yahoo.com/group/mmaipb/messages/1844?threaded=1&m=e&var=1&tidx=1, (diakses tanggal 13 Februari 2011)

Sayangnya, perlahan usaha Sirajuddin dan kawan-kawannya sesama produsen minyak kelapa Mandar kian menurun. Salah satu kesulitan yang menghadang adalah makin minimnya pasokan buah kelapa (*Cocos nucifera*). Ironis memang. Kedua kabupaten itu, dengan ribuan kilometer bentangan pantainya yang ditumbuhi nyiur melambai, dikenal sebagai sentra kelapa terbesar di Sulawesi Selatan.[5] Belum lagi serangan minyak sawit pabrikan, yang kian gencar melakukan penetrasi hingga ke kampung-kampung terpencil, membuat minyak goreng produksi Sirajuddin kian tersisih. Fluktuasi harga minyak goreng yang tak menentu juga punya andil bikin usahanya kian kembang kempis.

Setelah mencoba segala upaya untuk bertahan, pada akhir 90-an, Sirajuddin jatuh pailit. Berupaya mengerjakan usaha lain, ia pun memutuskan untuk mengadu nasib ke Makassar. Untunglah ia punya sedikit tabungan, sehingga bisa mencicil sepeda motor yang kini ia jadikan sandaran penghidupan keluarganya, sebagai tukang ojek.

Kisah Sirajuddin adalah gambaran satu dari jutaan rakyat Indonesia yang hidupnya terpuruk karena runtuhnya komoditas kelapa. Di Selayar, pulau yang terletak di selatan jazirah Sulawesi, di mana kelapa digelari sebagai emas hijau, misalnya. Selayar pernah mencapai puncak kejayaan di tahun 1930-an dan terulang kembali di tahun 1960-an, hingga disebut sebagai era 'emas hijau' (Heersink: 1999). Namun gonjang-ganjing harga kopra di pasar dunia membuat kota ini nyaris menjadi kota mati di tahun 1980-an, karena ditinggalkan penduduknya yang lantas beramai-ramai mengadu nasib ke Makassar dan ke berbagai penjuru Nusantara, bahkan hingga ke negeri jiran. Nasib jutaan petani kelapa di Minahasa, Maluku, Riau, dan sentra-sentra kelapa lainnya, juga tak kalah suramnya.

5 "Daerah Potensi Bahan Baku Kelapa di Sulawesi Selatan", http://www.dekindo.com/media.php?provinsi=19, (diakses tanggal 21 Februari 2011).

Perang Anti-Kelapa

Sirajuddin mungkin tak pernah membayangkan, lonceng kematian usaha minyak gorengnya dibunyikan jauh dari pelosok pedalaman kampungnya. Ada satu ancaman yang sudah lama menjadi momok bagi petani kelapa di Indonesia dan negara-negara tropis penghasil kelapa lainnya: perang anti-kelapa yang dilancarkan negara penghasil minyak nabati lain. Salah satu yang paling getol memerangi kelapa adalah Amerika Serikat, produsen minyak goreng kedelai nomor wahid dunia. Salah satu cara yang paling sering mereka gunakan adalah meminjam tangan rezim kesehatan untuk menyatakan minyak kelapa berbahaya untuk kesehatan. Di tahun 1980-an, *American Soy Association* melancarkan kampanye tentang bahaya kolesterol yang terkandung dalam minyak kelapa sebagai strategi untuk melindungi produk mereka. Mereka bahkan meminta pemerintahnya memasang label peringatan dalam setiap produk yang mengandung minyak kelapa.

Bagaimana kelapa bisa mendapatkan citra seburuk itu? Kita perlu menoleh ke sejarah untuk mendapatkan penjelasannya.

Kronologi Kampanye Anti Minyak Kelapa

1941 – 1945	Di masa Perang Asia Timur Raya, ketika balatentara Jepang menguasai Filipina dan wilayah Pasifik lainnya, aliran minyak kelapa ke Amerika Serikat terputus. Kondisi ini memaksa Amerika Serikat mengembangkan bahan minyak goreng lain, terutama minyak kedelai.
1960 – 1969	Pasca-Perang Dunia, penjualan minyak kelapa kembali meningkat di Amerika Serikat, jauh melampaui minyak kedelai yang justru produksinya sedang mereka galakkan. Pada periode ini mulai muncul hasil penelitian bahwa minyak jenuh, seperti minyak kelapa, meningkatkan jumlah kolesterol dalam darah, yang menyebabkan penyakit jantung. Temuan ini dimanfaatkan oleh *American Soybean Association* (ASA) untuk mengampanyekan bahaya minyak kelapa dan mempromosikan minyak kedelai sebagai minyak paling sehat.

	Di tahun 1963, asosiasi produk jagung dunia, *Corn Product Company* (CPC International), melakukan publikasi anti-minyak jenuh besar-besaran lewat buku yang ditulis Jeremiah Stamler.
1971	*Food and Drug Administration* (FDA) Amerika Serikat dipimpin oleh seorang ahli hukum yang mewakili industri minyak goreng dalam negeri mereka. Sejak masa itu, FDA mulai mensponsori pendidikan masyarakat tentang bahaya minyak kelapa.
1972	*Center for Science in the Public Interest* (CSPI) dan *American Heart Savers Association* (AHSA) ikut bergabung dalam kampanye anti-minyak kelapa. **Mereka mendorong dikeluarkannya aturan agar label pada produk minyak kelapa dan minyak sawit dibubuhi peringatan "kaya akan lemak yang menyebabkan sumbatan pembuluh darah"**.
1986	ASA dan CSPI mengirimkan alat pelawan lemak atau "Fat Fighter Kit" pada 400.000 petani kedelai untuk mendorong mereka menulis ke pejabat pemerintah dan perusahaan makanan, guna memprotes impor "lemak tropis yang sangat jenuh seperti minyak sawit dan kelapa".
1987	ASA melayangkan petisi kepada FDA agar mewajibkan label "Minyak Tropis" pada semua produk yang mengandung minyak kelapa dan minyak sawit. Di tahun ini pula, *The New York Times* (edisi 3 Juni 1987) menulis editorial berjudul "*The Truth About Vegetable Oil*" yang menyebut minyak kelapa dan minyak sawit sebagai "*the cheaper, artery-clogging oils from Malaysia and Indonesia*".
1988	CSPI menerbitkan buku *Serangan Minyak Jenuh* (*Saturated Fat Attack*). Di bab tiga terdapat bahasan tentang "Bahaya Minyak Tropis" (*Those Troublesome Tropical Oils*).
1988	Pada tanggal 21 Juni 1988, Senat Amerika Serikat menggelar sidang dengar pendapat mengenai minyak tropis. Dalam sidang tersebut, ahli-ahli kesehatan yang mewakili kepentingan industri minyak goreng Amerika Serikat memberikan kesaksian tentang bahaya minyak goreng tropis.

1988	Kongres Amerika Serikat menelurkan sebuah rancangan undang-undang untuk membendung impor minyak kelapa dan minyak sawit. **RUU itu pada intinya mewajibkan agar minyak eks daerah tropis dipasangi label berbunyi: "mengandung atau tidak mengandung gemuk jenuh"(*saturated fat*).**
1988	Pada bulan Oktober 1988, jutawan Nebraska sekaligus pendiri *National Heart Savers Association*, Phil Sokolof, memasang seri iklan satu halaman penuh di surat kabar nasional yang menuduh minyak tropis telah "meracuni Amerika". Salah satu iklannya menampilkan "bom" kelapa dengan sumbu menyala.
1988	Melihat kampanye anti-minyak jenuh sebagai peluang meraup laba, industri farmasi dan produk pelangsing tubuh ikut bergabung. Sejak itu, kian banyak kemasan produk yang menuliskan pernyataan "tidak mengandung minyak tropis".
1989	Uni Eropa menetapkan standar kadar aflatoksin 200 ppb pada kopra dan produk berbahan kopra. Lalu, tahun 1991 mereka mengubahnya menjadi 20 ppb. Selanjutnya, FAO, lewat *Codex Alimentarius Commission*, menurunkannya menjadi 5 ppb. Padahal, dengan proses pengolahan kopra yang dilakukan kebanyakan petani kelapa di Indonesia, jelas standar tersebut sangat sulit dicapai.
2003	WHO mengeluarkan maklumat bahwa telah ditemukan bukti meyakinkan bahwa konsumsi *palmitic acid* meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular.

Sumber: - Fife, Bruce, C.N., ND, *Coconut Oil Miracle*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2004.
- *VCO Terpuruk karena Bisnis Amerika*, http://www.suaramerdeka.com harian/0603/20/ragam01.htm, diakses pada tanggal 27 Februari 2011.

Dengan serangan bertubi-tubi segencar ini, yang sekaligus juga melibatkan berbagai kalangan, citra buruk minyak kelapa tidak hanya tersebar di Amerika Serikat, tetapi ke seluruh dunia. Bahkan negara-negara tropis produsen minyak kelapa—yang telah mengonsumsi kelapa selama berabad-abad sekalipun—menjadi ikut percaya bahwa minyak kelapa benar-benar berbahaya. Indonesia, tak ketinggalan, juga terjangkiti oleh propaganda ini, bahkan di kalangan para ilmuwan dan dokter. Padahal minyak kelapa telah dikonsumsi banyak masyarakat tropis selama ribuan tahun tanpa adanya bukti efek berbahaya pada

mereka.

Anehnya, tanpa sikap kritis sama sekali terhadap agenda dagang di balik klaim kesehatan, sikap memusuhi ini serta-merta diamini oleh otoritas kesehatan dalam negeri. Padahal, fakta sejarah menunjukkan, kelapa pernah menjadi komoditas dagang utama sejak abad ke-18. Ketika itu kopra Nusantara merajai pusat-pusat perdagangan komoditas dunia (Asba: 2007, Heersink: 1999). Bahkan hingga sekarang Indonesia masih menduduki peringkat pertama produsen kelapa/kopra terbesar dunia. Luas areal tanaman kelapa rakyat mencapai 3,8 juta Ha, yang tersebar di 33 provinsi dan melibatkan 7,13 juta rumah tangga petani. Tak salah jika Ismail Marzuki, musikus legendaris Indonesia, memilih lambaian daun nyiur sebagai lambang keindahan dan kekayaan negeri ini.

Kebijakan pemerintah yang menganaktirikan petani kelapa membuat potensi besar komoditas emas hijau ini tersia-sia. Karena terlalu lama ditelantarkan, kondisi tanaman kelapa umumnya sudah tua dan tidak produktif lagi. Akibatnya, 30-40 persen pohon kelapa di Indonesia mandul karenanya[6]. Sudah begitu, tidak ada usaha serius untuk melakukan peremajaan. Belum lagi ancaman hama yang semakin menggila karena sistem pengelolaan perkebunan kelapa rakyat yang bersifat monokultur. Apalagi, pemerintah tidak menyediakan kredit murah kepada petani untuk peremajaan tanaman. Sebenarnya pemerintah pernah mengampanyekan peremajaan kebun kelapa rakyat dengan pengembangan kelapa hibrida secara massif. Namun usaha ini nampaknya dilakukan setengah hati. Sehingga pameo 'habis proyek, selesai perkara' berlaku dalam program hibridisasi kelapa ini. Hingga kini, tak banyak jejak proyek ini yang bisa dinilai sebagai bukti keberhasilannya (Murray Li: 2002).

Jika dibandingkan dengan komoditas lain, peremajaan kelapa sesungguhnya justru membawa keuntungan ganda. Selain meningkatkan produktivitas tanaman baru, batang kelapa memiliki mutu tinggi untuk

6 "Roadmap Industri Pengolahan Kelapa", Direktorat Jenderal Industri Agro Dan Kimia, Departemen Perindustrian, Jakarta: 2009, http://iak.kemenperin.go.id/edocument/ROADMAP%20KELAPA.pdf (diakses tanggal 2 Maret 2011).

berbagai keperluan, sebagai bahan bangunan, misalnya. Kayu batang kelapa digemari selain karena kekuatannya, juga karena teksturnya.[7] Tidak adanya pemikiran memanfaatkan batang kelapa sebagai strategi untuk mendorong peremajaan menunjukkan belum adanya cara pandang menyeluruh terhadap komoditas ini. Struktur industri perkelapaan yang masih parsial, sehingga nilai tambahnya tidak optimal, adalah salah satu masalah yang menghadang bangkitnya kelapa rakyat. Sebagian besar pengolahan pascaproduksi hanya dalam bentuk produk primer, seperti kopra dan minyak kelapa. Sejauh ini, produk turunan dari kelapa yang telah dikembangkan di Indonesia baru sepuluh jenis. Padahal Filipina, misalnya, mampu mengembangkan ratusan jenis produk hanya dari satu komoditas ini.[8] Salah satu contoh potensi produk turunan kelapa adalah pemanfaatan sabut kelapa (*coconut fibre*) untuk jok mobil mewah Mercedes Benz.[9]

Gambaran kondisi industri perkelapaan di atas sebetulnya menunjukkan belum adanya kebijakan yang komprehensif meliputi pembiayaan hingga riset, baik pasar maupun kelembagaan. Filipina, misalnya, sejak tahun 1973 memiliki *Philippine Coconut Authorithy*, sebagaimana Sri Lanka punya *Coconut Development Authority* (1971), sebagai bukti keseriusan mereka dalam mengembangkan potensi industri kelapa mereka, dari hulu hingga ke hilir. Indonesia sendiri baru tahun 2008 membentuk Dewan Kelapa Indonesia (Dekindo) untuk membangun sinergi antar-pelaku usaha industri kelapa.

Dalam hal riset apalagi. Kita jelas tertinggal jauh dari Malaysia, misalnya. Negeri jiran ini menyisihkan dana khusus untuk riset peningkatan daya saing industri kelapa mereka, terutama kelapa sawit.

---

7 "Batang Kelapa sebagai Alternatif Batang Kayu Konvensional", Barly, *Duta Rimba*, 1994, http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/20173174944352.pdf (diakses tanggal 13 Februari 2011).

8 Sebetulnya secara tradisional, kelapa sudah lama dikenal sebagai pohon kehidupan, karena seluruh bagiannya bisa dimanfaatkan, dari akar sampai daun. Dalam tradisi Bugis, misalnya, *kaluku* (dalam bahasa Bugis dan Makassar) ditanam bersama ari-ari bayi yang baru lahir, sebagai perlambang agar anak itu tumbuh kuat dan seluruh hidupnya memberi banyak manfaat bagi sesama, serupa kelapa.

9 http://www.mercedes-benz.co.id/content/indonesia/mpc/mpc_indonesia_website/enng/home_mpc/passengercars/home/passengercars_world/innovation_sustainability/sustainability/corporate_responsibility/resources.html (diakses tanggal 11 Februari 2011).

Dana riset itu digalang dari industri sawit. Di Indonesia, yang terjadi justru sebaliknya. Sejak tahun 2008, lahan uji coba Balai Penelitian Kelapa di Manado malah disulap menjadi arena pacuan kuda![10] Bahkan Indonesia yang sejak abad ke-18 menjadi eksportir terbesar kopra di dunia, masih mengimpor mesin pengasapan kopra dari Sri Lanka.

Mulai tahun 1970-an, pemerintah mencium gelagat buruk bahwa perniagaan kopra telah memasuki masa senjakalanya. Sebaliknya, mereka mengendus peluang bagus dengan komoditas kelapa sawit. Pada tahun 1972, pemerintah mengeluarkan beleid yang melarang ekspor kopra, sebagai taktik untuk menaikkan pamor kelapa sawit. Akibat larangan ekspor, perdagangan kopra pun menurun. Harga anjlok sampai ke titik terendah. Dari nilai tukar ideal satu kilogram kopra setara dengan 1 kilo beras, menjadi hanya setara dengan 0,2 kilo beras.

Karena tak ada insentif harga memadai, banyak petani menelantarkan kebun kelapanya, sehingga produktivitasnya pun semakin rendah. Data Departemen Perkebunan menyebutkan produktivitas kelapa hanya 1 ton/hektar atau sekitar 50 persen dari potensi produksinya. Dengan tingkat produktivitas serendah itu, pendapatan kotor petani kelapa hanya Rp 2,4 juta/ha/tahun, atau Rp 200 ribu/bulan. Jelas tak sepadan dengan kerja keras petani.[11]

Terjebak dalam lilitan kondisi sedemikian, ditambah tekanan dari kepentingan dagang internasional, jutaan orang seperti Sirajuddin-lah yang harus menanggung getahnya.

Gula

Setelah menjadi penghasil gula terbesar nomor dua di bawah Kuba tahun 1930-an, sulit rasanya membayangkan bahwa kini Indonesia ber-

10 "Plasma Nutfah Kelapa Terancam Hilang", Dr. Ir. Hengky Novarianto, Tabloid *Sinar Tani*, 5-11 Maret 2008, http://www.litbang.deptan.go.id/artikel.php/one/199/pdf/Plasma%20Nutfah%20Kelapa%20Terancam%20Hilang.pdf (diakses tanggal 11 Februari 2011).

11 "Strategi Kebijakan Peremajaan Kelapa Rakyat", Dedi Soleh Effendi, Balai Penelitian Tanaman Kelapa dan Palma Lain, 2008, http://pustaka.litbang.deptan.go.id/publikasi/ip014084.pdf (diakses tanggal 8 Februari 2011).

balik menjadi negara pengimpor gula terbesar. Di masa jayanya, jumlah pabrik yang beroperasi di negeri ini sebanyak 179 pabrik gula (PG), dengan produksi puncak mencapai 3 juta ton dan ekspor gula mencapai 2,4 juta ton. Kini industri gula dalam negeri hanya didukung oleh 60 PG (43 milik BUMN dan 17 milik swasta). Ekspor pun terhenti sejak 1966. Bahkan, sejak pertama kali melakukan impor sebesar 33 ton di tahun 1967, laju impor kian kencang. Pada periode antara tahun 1986-2004, volume impor meningkat dari 194.700 ton menjadi 1,384 juta ton, atau meningkat dengan laju 11,4% per tahun.[12]

Industri gula memang memasuki fase *sunset*. Mesin-mesin yang sudah berumur di atas 80 tahun menyebabkan kinerja PG tidak maksimal. Mesin yang bocor membuat nilai rendemen merosot jadi hanya 6-7 persen. Padahal, jika kondisi mesin memadai, bisa mencapai 14-15 persen.

Belum lagi ancaman penyakit dan varietas tebu yang produksinya rendah. Padahal, di masa lampau, negeri ini punya Pusat Penelitian Perkebunan Gula di Pasuruan yang menjadi Mekkah-nya industri gula dunia. Lembaga ini bahkan pernah menyelamatkan krisis gula dunia lewat penemuan varietas POJ 2878, yang sering disebut tebu ajaib, berkat tingkat produksinya yang tinggi dan tahan penyakit sereh. Kini, lembaga penelitian ini nasibnya nyaris bak pepatah 'hidup segan, mati tak mau', karena miskin peneliti dan kehilangan suntikan dana.[13]

Tetapi perubahan paling fundamental pada industri gula terjadi setelah International Monetary Fund (IMF) berhasil mendesak pemerintah Indonesia untuk meneken dokumen *Memorandum of Economic and Financial Policy* (MEFP). Dokumen yang populer dengan nama *letter of intent* itu diteken di Jakarta tanggal 15 Januari 1998. Pada Butir 44 *letter of intent* disebutkan kewajiban pemerintah membebaskan tata niaga pertanian, termasuk gula, mulai Januari 1998 (Hafsah, 2002: 173).

12 "Roadmap Industri Gula", Direktorat Jenderal Industri Agro Dan Kimia, Departemen Perindustrian, Jakarta: 2009, http://iak.kemenperin.go.id/edocument/ROAD%20MAP%20GULA.pdf (diakses tanggal 9 Februari 2011).

13 Pada 20 Mei 1887 berdiri *Proefstation Oost Java* (POJ) di Pasuruan, Jawa Timur. Lembaga ini menjadi cikal bakal Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI).

Sejak itu, atas nama perdagangan bebas, pasar gula domestik yang semula terproteksi dibuka lebar-lebar. Bulan Februari 1998, bea masuk gula ditetapkan menjadi 0% alias dihapuskan. Impor gula dibebaskan tanpa hambatan apa pun. Tanpa persiapan matang, industri gula yang semula dikenal sebagai *the most regulated commodity* dideregulasi total dengan mengadopsi *free trade policy* (Khudori, 2005: 64). Gula impor pun membanjir. Dalam waktu singkat, benteng pertahanan petani tebu dan PG jebol. Petani tebu banyak beralih ke usaha tani lain, sementara PG satu per satu bertumbangan.

Serentetan demonstrasi petani tebu ke Departemen Perindustrian dan Perdagangan di tahun 1999 memang berhasil memaksa pemerintah menaikkan bea masuk gula sampai 20-25 persen. Akan tetapi, kenaikan itu tidak banyak membantu. Sebagai perbandingan, Jepang mematok bea masuk 240 persen, sementara Amerika Serikat 140 persen. Banjir gula impor tetap tinggi, hingga mencapai angka 2 juta ton di akhir bulan Oktober 1999.

Perusahaan Multinasional yang Bergerak dalam Produksi dan Perdagangan Gula Dunia (1995)

Nama Perusahaan	Juta Ton (Raw Value)	Pangsa Ekspor Dunia (%)
J Lion	1,5	4,7
Sucden	2,0	6,2
Cargill	4,2	13,0
T & L	8,0	24,8
Man	4,5	14,0
Dryfus	2,8	8,7
Cubazukar	3,8	11,8
Total Ekspor 7 Perusahaan	26,8	83,2
Total Ekspor Gula Dunia	32,2	100,0

Sumber: Khudori, *Gula Rasa Neoliberalisme: Pergumulan Empat Abad Industri Gula*, 2005.

Perusahaan-perusahaan gula multinasional, yang didukung oleh otoritas pemerintah di negara asalnya dan lembaga-lembaga internasional, meraup keuntungan terbesar. Cargill, misalnya. Pengekspor gula dunia itu disokong penuh oleh pemerintah Amerika Serikat, pemegang saham terbesar (18 persen) di IMF.

Di tahun 2002, berkat desakan dari berbagai kelompok penekan yang prihatin dengan nasib petani tebu, Menteri Perindustrian dan Perdagangan waktu itu, Rini Soewandi, meneken SK 634/2002 tentang Tata Niaga Impor Gula, yang belakangan diubah menjadi SK 527/2004 tentang Ketentuan Impor Gula. Ringkasnya beleid ini membatasi jumlah importir, meregulasi gula impor, dan kewajiban menyangga harga gula petani. Berkat SK ini pula jumlah importir menciut dari 800-an hingga tinggal 5 buah, harga gula pun lebih stabil, impor gula lebih mudah diawasi, dan penghasilan petani lebih terjamin.

Sayangnya pelaksanaan kebijakan ini tak berjalan mulus. Sebagai contoh, empat dari lima perusahaan yang diberi izin impor, yakni PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX, X, dan XI, serta PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sering kekurangan modal, sehingga impor gula tersendat. Selain itu, perusahaan-perusahaan pelat merah ini miskin pengalaman dalam pendistribusian barang. Maklum, urusan mereka selama ini hanya menggiling tebu.

Ironisnya lagi, kebanyakan peserta lelang impor gula adalah pemain asing. Di tahun 2007, misalnya, dari sembilan perusahaan peserta lelang di PT RNI, hanya satu di antaranya merupakan perusahaan lokal, yaitu PT Olam Indonesia. Selebihnya, Tate 'n Lyle International, PT Agro Corp International, Nambee, Wee Tiong, Eagle Trading, Cargil International, Kwe Gee, dan Glencore, adalah perusahaan asing.[14] Dengan berbagai catatan di atas, angan-angan untuk mencukupi sendiri kebutuhan gula dalam negeri seolah makin kabur tertiup angin.

14 "Perusahaan Asing Dominasi Tender Impor Gula", 18 Desember 2006, http://www.tempointeraktif.com/share/?act=TmV3cw==&type=UHJpbnQ=&media=bmV3cw==&y=JEdMT0JBTFNbeV0=&m=JEdMT0JBTFNbbV0=&d=JEdMT0JBTFNbZF0=&id=ODk2OTQ= (diakses tanggal tanggal 9 Februari 2011).

Garam[15]

Lain gula, lain pula dengan garam, meski kisahnya nyaris serupa. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia pernah berjaya dengan produksi garam. Lahan tambak garam yang luas, didukung dengan bergairahnya sentra garam nasional di banyak tempat menjadi cerita di balik kejayaan ini. Masyarakat yang hidup pada pertengahan tahun 1990-an bisa menjadi saksi bagaimana Indonesia mencapai swasembada garam konsumsi. Predikat pengekspor garam pun disandang. Namun keadaan berbalik sejak Akzo Nobel memprakarsai kampanye besar-besaran penggunaan garam beryodium di Indonesia. Sentra garam nasional berguguran. Lahan tambak garam terbengkalai. Produksi nasional turun drastis. Ribuan petambak kehilangan mata pencaharian. Sebaliknya, impor garam membanjir, sampai kini.

Akzo Nobel adalah perusahaan multinasional dengan 18 unit usaha di bidang kesehatan, cat, dan kimia, yang beroperasi di lebih dari 80 negara dan berkantor pusat di Belanda. Pada tahun 2004, omzet penjualannya mencapai 13 miliar Euro. Akzo Nobel telah memproduksi garam beryodium sejak tahun 1918, di mana empat pabriknya di Eropa dan Australia saja mampu memproduksi 2 juta ton garam per tahun. Kampanye garam beryodium Akzo Nobel di Indonesia dengan cepat menjadi 'bertaring', sebab turut melibatkan United Nations Children's Fund (UNICEF) dan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Departemen Kesehatan.

UNICEF, badan PBB yang menangani masalah anak-anak, mengeluarkan "fatwa" bahwa salah satu asupan penting di masa persiapan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan adalah garam beryodium. Semasa masih berupa janin sampai berusia tiga tahun pertama, tubuh sedang supersibuk membangun sel otak. Salah satu bahan utama pembangunan otak adalah hormon tiroid, zat yang diproduksi oleh kelenjar tiroid yang terletak di tenggorokan bagian bawah. UNICEF pernah mengutus Tim Peneliti Konsumsi Garam, yang diketuai oleh Dr. Justus

15 Rachman, Anwar Jimpe (ed), *Petambak Garam Indonesia: Dalam Kepungan Kebijakan dan Modal,* Ininnawa, Indonesia Berdikari, & INFID, Makassar: 2011.

M. de Jong, untuk ke Indonesia. De Jong sendiri kini menjabat sebagai manajer Akzo Nobel.

Sementara itu, pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan Keputusan Presiden No. 69 Tahun 1994, yang kemudian dijabarkan oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Perindustrian Nomor 29/M/SK/2/1995, tentang pengesahan dan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib terhadap sepuluh macam pokok produk industri, dan SK Menteri Perindustrian Nomor 77/M/SK/5/1995 tentang persyaratan teknis pengolahan, pengemasan, dan pengolahan garam beryodium, yang isinya mengatur supaya setiap produk kemasan dan label menggunakan garam beryodium serta berupaya meningkatkan kualitas garam rakyat hingga memenuhi syarat SNI. Selanjutnya, Komite Nasional Garam dibentuk. Lalu pada tahun 2001 Bank Dunia menggelontorkan sejumlah dana untuk standarisasi perusahaan garam. UNICEF juga telah mengalokasikan dana untuk menarik garam non-yodium dari pasaran.

Sayangnya, keseriusan pemerintah untuk mendukung kampanye garam beryodium tidak ditindaklanjuti dengan keseriusan dalam merawat *infant industry* nasional, melalui subsidi, teknologi, riset, dan pengembangan serta proteksi harga dan pengawasan impor yang ketat. Persoalannya—agak berbeda dengan kasus kelapa—bukan pada kebenaran kampanye garam beryodium, tetapi lebih kepada munculnya kompetisi yang sangat tidak berimbang. Setelah standar baru muncul, produsen dalam negeri harus berhadapan langsung dengan eksportir luar negeri yang sudah jauh lebih siap.

Akibat kampanye Akzo Nobel, perusahaan multinasional pengekspor garam ini—didukung lembaga-lembaga internasional seperti UNICEF dan Bank Dunia dan dilanjutkan dengan kebijakan "kacamata kuda" pemerintah Indonesia—industri garam nasional terjerembap tanpa pernah bangkit kembali. Sungguh jauh dari bayangan bahwa negara yang pernah berjaya dengan produksi garamnya ini, sampai saat ini justru menggantungkan 70 persen kebutuhan garamnya dari pasokan impor, terutama impor garam dari Australia yang mencapai 1,73 juta ton.

Jamu

Kasus kelapa, garam, dan gula di atas hanya sebagian dari kisah sedih yang menimpa industri dalam negeri. Salah satu kekayaan Nusantara yang nasibnya juga terimpit oleh hegemoni Barat adalah jamu.

Dalam dokumen Kebijakan Obat Tradisional (Kotranas) tahun 2006, tercatat ada 30.000 jenis tetumbuhan yang teridentifikasi di negeri ini, 7.500 di antaranya tergolong tanaman obat (Kotranas, 2006). Sementara dalam hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2001, tercatat sebanyak 57,7 persen penduduk Indonesia melakukan pengobatan sendiri tanpa bantuan medis, 31,7 persen di antaranya menggunakan tumbuhan obat tradisional, dan 9,8% memilih tata pengobatan tradisional lainnya.

Data ini bisa ditafsirkan sebagai masih rendahnya tingkat keandalan pelayanan medis yang tersedia. Tetapi, di sisi lain, angka tersebut juga menunjukkan potensi raksasa yang dimiliki industri jamu nasional. Setidaknya, data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menguatkannya. Sampai tahun 2002, tercatat ada 1.012 usaha obat tradisional yang berizin industri (105 berskala besar dan 907 skala kecil). Di tahun 2008, industri jamu nasional mencatat omzet senilai Rp 8 triliun[16]. Pertumbuhan industri jamu memang tergolong pesat, yakni mencapai 20 persen per tahun, dengan jumlah serapan tenaga kerja 10 juta orang. Dengan bahan baku seluruhnya murni produksi dalam negeri, industri jamu adalah salah satu industri nasional yang terbukti tahan banting dari terjangan krisis ekonomi.

Tapi lagi-lagi sikap pengurus negara ini membuat jutaan pelaku industri jamu, terutama skala rumah tangga, harus megap-megap menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan. Otoritas kesehatan negeri ini masih memandang khasiat obat-obatan tradisional secara sebelah mata, dan lebih menganak-emaskan sistem farmasi modern. Ini terlihat dari rendahnya dukungan pemerintah untuk pengembangan industri jamu. Sikap pilihan itu tak lepas dari

16 Bandingkan dengan obat farmasi, yang kebanyakan diproduksi perusahaan multinasional, yang penjualannya mampu menembus angka Rp 40 triliun.

ketergantungan yang telah menjerat Indonesia. Saat ini, obat dan pengobatan Indonesia memang masih tergantung pada obat Barat (obat impor). Sebesar 90 sampai 95 persen bahan baku obat diambil dari luar, lalu di-*assembling* di Indonesia.[17]

Kenyataan itulah yang membuat kalangan paramedis Indonesia selalu memandang sebelah mata keberadaan jamu. Meskipun sudah ada Kepmenkes 1109/2007 tentang pengobatan komplementer alternatif—sebagai jalan mengintegrasikan pengobatan tradisional dalam pelayanan kesehatan formal, sudah menjadi rahasia umum bahwa kebanyakan dokter lebih memilih berperan sebagai juru promosi dan antek-antek perusahaan farmasi multinasional[18].

Paling tidak, ada dua argumen yang paling sering digunakan dokter untuk menolak meresepkan herbal untuk pasiennya. Pertama, sistem pendidikan yang mereka terima memang berkiblat pada kaidah ilmu kedokteran Barat modern, yang menuntut uji klinis yang ketat ala obat *pharmaceutical*, yakni proses yang mensyaratkan uji *double-blind* berkali-kali, dalam skala besar dan acak. Padahal herbal tradisional telah terbukti kemanjurannya lewat bukti empiris. Hasil uji coba penggunaan selama berabad-abad dipandang remeh. Sementara tidak semua karya pengobatan dapat dan perlu dibuktikan lewat kaidah ilmu Barat yang tetap memiliki keterbatasan, bahkan tidak lepas dari kekeliruan.

Alasan kedua yang dijadikan tameng perlindungan adalah herbal tidak tokcer. Tidak bisa langsung sembuh begitu diminum. Banyak dokter khawatir dianggap tak "sakti" jika obatnya tak manjur. Sementara pasien, lebih sering karena ketidaktahuannya, menuntut obat yang cespleng. Walhasil banyak dokter, tak hanya di Indonesia tapi juga di negara berkembang lainnya, dengan "lancang" meresepkan obat-obat keras semacam kortikosteroid dan antibiotika, hanya untuk infeksi virus ringan, semacam flu. Walaupun sesungguhnya sudah jamak diketahui

---

17 Wijayakusuma, H.M. Hembing, *Ensiklopedia Milenium: Tumbuhan Berkhasiat Obat Indonesia Jilid I*, Prestasi, Jakarta: 2000, hal. 2.

18 "Ada (Konspirasi) Dokter dengan Perusahaan Farmasi", 20 Oktober 2010, http://health.kompas.com/read/2010/10/20/09264388/Ada..quot.Konspirasi.quot..Dokter.dengan.Perusahaan.Farmasi (diakses tanggal 10 Maret 2011).

di kalangan medis, bahwa kedua jenis obat tersebut tak benar-benar berguna untuk membasmi infeksi virus, ketimbang jamu tolak angin yang relatif lebih murah dan terjangkau masyarakat awam.[19]

Kenyataan itu pula yang membuat Jaya Suprana menulis: "Pamor jamu di Indonesia—apalagi di mancanegara—dari hari ke hari makin memar akibat dirongrong dengan kaidah akademis farmasi yang notabene—seperti simfoni—berasal dari budaya masyarakat asing."[20] Mengerikan jika ramalan Ketua I Dewan Riset Nasional (DRN) Prof. AA Loedin benar. Ia mengingatkan perusahaan farmasi Indonesia agar jangan berkhayal bisa menghasilkan obat-obat baru pada saat perdagangan bebas terlaksana penuh, 20 sampai 25 tahun mendatang, sebab semua itu membutuhkan dana. Belum pernah dikeluarkan dana untuk mengadakan riset yang bisa mencapai angka 390 juta dolar AS untuk menghasilkan satu obat baru—sebuah investasi besar yang tentu akan kembali dalam waktu 20 tahun kemudian—seperti yang dilakukan oleh farmasi multinasional Amerika Serikat dan Eropa. Ia lalu meramalkan, 10 tahun lagi akan muncul pabrik-pabrik asing yang memproduksi jamu dan obat tradisional Indonesia.[21] Kompetisi bisa berujung pada pencaplokan.

Ramalan tersebut cukup beralasan. Sudah sejak lama perusahaan farmasi multinasional, yang dengan dana besarnya seringkali bisa mengendalikan lembaga-lembaga internasional, dengan arogan merasa punya hak untuk mengangkangi kekayaan hayati negara berkembang, khususnya bahan-bahan jamu di Indonesia. Mereka berlindung di balik TRIPS, aturan perdagangan dunia tentang Hak Kekayaan Intelektual, yang ditetapkan WTO tahun 1994. Lewat rezim "*Intellectual Property Rights*", WTO menghalalkan pembajakan hayati atas kekayaan hutan tropika negara Selatan. Meski menentang praktik lalim ini ini, negara-negara Selatan tetap tak kuasa melawan TRIPS karena tekanan Bank Dunia dan IMF. Mereka dipaksa oleh *"the unholy trinity"* (WTO, Bank

19 "Obat Herbal Tradisional dan Kemandirian Nasional", http://swa.co.id/2008/09/obat-herbal-tradisional-dan-kemandirian-nasional/?comments=true (diakses tanggal 12 Februari 2011).
20 Suprana, Jaya, *Naskah-Naskah Kompas Jaya Suprana*, Elex Media Komputindo, Jakarta: 2009.
21 Wijaya Kusuma, op. cit.

Dunia dan IMF) untuk menelan pil pahit TRIPS itu (Lihat Chang: 2008).

Bahkan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati yang mengatur kedaulatan masing-masing bangsa atas kekayaan hayatinya pun tidak bergigi menghadapi ulah para *big pharma*. Hukum internasional itu menjamin adanya pembagian hasil yang setara antar-negara-negara yang terlibat dalam pemanfaatan bersama keanekaragaman hayati. Namun mereka menjadikan keanekaragaman hayati sekadar komoditas dagang yang tak adil antara negara kaya dan miskin. Parahnya lagi, negara-negara kaya memiliki catatan tidak membayar utang mereka. Sebuah laporan United Nations Development Program menyebutkan, negara maju berutang kepada negara-negara berkembang lebih dari USD 300 juta untuk royalti bibit tanaman, dan USD 5 miliar untuk tanaman obat.[22]

Di sisi lain, riset untuk saintifikasi jamu masih berjalan di tempat, bahkan terkesan setengah hati. Jangankan untuk urusan riset, dalam hal pendidikan dan penelitian herbal pun kita masih jauh tertinggal, dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Sejauh ini, kita baru punya segelintir universitas yang menyediakan pogram di bidang herbal. Sementara Thailand, misalnya, sudah punya 21 universitas yang mengelola program pascasarjana di bidang herbal.

Sudah begitu, riset mengenai pengobatan herbal yang ada pun berjalan nyaris tanpa koordinasi. Padahal ada cukup banyak lembaga penelitian yang memiliki bidang khusus soal ini, seperti di Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Airlangga (UNAIR), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Bahkan Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan melalui BPOM, dan Kantor Kementerian Ristek juga berkecimpung di bidang herbal. Alhasil, kita tidak punya pangkalan data tentang potensi tanaman lokal yang bisa digunakan sebagai obat. Padahal, pengelolaan data yang terintegrasi tentu akan memberi sumbangsih besar terhadap pengembangan sistem

22 *"Big Business, Big Damage"*, http://www.insideindonesia.org/stories/big-business-big-damage-12091345 (diakses tanggal 15 Februari 2011).

pelayanan kesehatan bangsa, yang saat ini cenderung kapitalistik dan tak berpihak pada kaum miskin papa.

Satu misal untuk menunjukkan betapa tak seriusnya bangsa ini mengelola kekayaannya bisa terlihat dari ketersediaan instrumen riset. Sebagai negeri dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang melimpah, kita hanya punya satu buah perangkat NMR berkapasitas 500 megahertz[23]. Itu pun sekarang sudah rusak. Padahal instrumen ini sangat diperlukan untuk proses memurnikan struktur biokimia dari sebuah materi. Penemuan kombinasi gen untuk membuat produk obat-obatan baru mungkin terjadi setelah melewati proses ini. Sementara hingga hari ini, peneliti yang ingin melakukan proses purifikasi harus mengirimkan sampelnya ke laboratorium di luar negeri.

Kelengahan kita mengurus anugerah ibu pertiwi membuat Indonesia begitu rentan terhadap pembajakan hayati (*biopiracy*). Kasus teranyar adalah penetapan hak paten atas temulawak (*curcuma xanthorrhiza Roxb*) oleh perusahaan raksasa dari Korea Selatan, LG. Di Indonesia, Korea Selatan memang lebih terkenal lantaran produk elektroniknya. Tapi hak paten atas temulawak itu diajukan oleh anak perusahaan LG yang khusus memproduksi alat-alat kebersihan rumah tangga. Korea Selatan yang kesohor dengan ginsengnya kepincut dengan temulawak, karena terbukti sangat baik untuk bahan pasta gigi. Mereka juga mengembangkannya untuk sampo antiketombe dan krim anti-penuaan pada kulit. Ironisnya, temuan akan manfaat komersial temulawak tersebut adalah hasil riset seorang peneliti dari Bandung, Yaya Kurayadi. Ia memang bekerja sebagai profesor peneliti di Universitas Yonsei, Korea Selatan.

Menanggapi kasus di atas, dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Menteri Riset dan Teknologi, Kusmayanto, dengan mimik serius menyatakan bahwa ia sudah memerintahkan stafnya untuk melakukan penelitian untuk membuktikan bahwa temulawak adalah "ikon klasik

23 Padahal harga instrumen ini hanya Rp 8 milyar. Bandingkan dengan Malaysia di mana setiap departemen penelitian punya alat ini. Lihat lebih lengkap di "Indonesia Ladang Subur Biopiracy", http://www.lipi.go.id/www.cgi?cetakberita&1175651574&&2005& (diakses tanggal 17 Februari 2011).

jamu Indonesia". Dengan nada *haqqul yaqin*, ia menyatakan bisa membuktikan bahwa negeri inilah pemilik sah temulawak. "Para ahli etnobotani kami bisa membuktikan bahwa Indonesia-lah yang memiliki varietas temulawak paling banyak." Dan, "Peneliti antropologi-sosial juga sedang melacak pemanfaatan temulawak di masa lalu, dengan melihat pada lukisan di dinding candi," demikian ia mengutip temuan para tim ahlinya.[24]

Ketika ditanya wartawan, bagaimana pendapatnya tentang Yaya yang memilih berkarya di Korsel dan menjual karyanya ke LG, Kusmayanto hanya menanggapi dengan enteng: "Patut disayangkan peneliti terbaik Indonesia memilih lembaga di luar negeri karena minimnya apresiasi dalam negeri."

Setiap kali ini terjadi, kita hanya bisa berteriak geram, lalu diam dan mengurut dada. Ketua Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional (GP Jamu), Dr. Charles Saerang, mengaku sudah bertahun-tahun berusaha meyakinkan Menristek di kabinet sebelumnya tentang potensi jamu. "Baru kali ini berhasil," kata Charles. Sayangnya, baru menjelang akhir masa jabatannya Kusmayanto "tersadar".

Padahal, kalaupun kita masih terlalu "terbelakang" untuk melakukan penelitian dan menghasilkan temuan sendiri, paling tidak kita bisa mengakuinya secara bermartabat, seperti yang pernah ditunjukkan mantan presiden Afrika Selatan, Thabo Mbeki. Ia berhasil memaksa industri farmasi Amerika Serikat dan Eropa yang memproduksi obat-obatan anti-HIV/AIDS agar menjual versi generiknya dengan harga terjangkau bagi rakyat Afrika Selatan dan sekitarnya. Pendiri Kongres Nasional Afrika (ANC) bersama Nelson Mandela itu punya alasan kuat. Obat-obatan itu dibuat dengan sampel darah warga Afrika Selatan pengidap HIV/AIDS. Dan pemerintah Afrika Selatan berhasil membuktikan bahwa bahan baku obat-obatan anti HIV/AIDS itu berasal dari darah para penderita HIV/AIDS di negara itu, yang "dibajak" para peneliti dari

24 *"Govt to Make 'Temulawak Jamu' an Icon of Indonesia"*, 28 September 2009, http://www.thejakartapost.com/news/2009/09/28/govt-make-%E2%80%98temulawak%E2%80%99-%E2%80%98jamu%E2%80%99-icon-indonesia.html (diakses tanggal 21 Februari 2011).

berbagai perusahaan farmasi kelas dunia.[25] Sudah selayaknya pengusaha farmasi berbagi keuntungan dengan rakyat Afrika Selatan.

Sementara itu, bagaimana dengan Indonesia? Padahal sebetulnya kita juga punya figur publik yang punya nyali, seperti mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari. Dengan semangat Srikandi, ia melabrak otoritas kesehatan tertinggi dunia, WHO, yang berlaku tak lebih sebagai *broker* bagi para perusahaan farmasi multinasional (Lihat Supari, 2007).

Pengulangan Sejarah

Selain kopra, gula, garam, dan jamu, masih banyak komoditas Nusantara lain yang mengalami nasib serupa. Satu per satu menunjukkan modus yang kurang lebih sama. Ada motif-motif "mulia". Ada kepentingan bisnis korporasi multinasional/transnasional. Ada kepentingan dagang negara-negara maju. Ada dukungan dari lembaga-lembaga internasional. Ada keterlibatan otoritas pemerintah dalam negeri.

Perdagangan internasional yang digembar-gemborkan sebagai jalan menuju kesejahteraan, pada praktiknya justru menjadi modus operandi neokolonialisme. Menjadi paradoks memang, bahwa "bagian dunia yang alamnya kaya sungguh miskin, dan bagian dunia yang tak begitu kaya alamnya menikmati standar hidup tertinggi" (Rodney, 1974:20).

Kita bukannya tak paham soal-soal begitu. Kita—para pelanjut generasi—hanya tak punya cukup keberanian untuk mengoreksinya. Kaum terdidik kita bahkan lebih suka mencari-cari pembenaran untuk melanggengkan sistem ekonomi ala penjajah. Simak saja pengakuan Mubyarto, begawan ekonomi kerakyatan, yang prihatin dengan isi kepala para ekonom yang dengan senang hati dicekoki ilmu ekonomi usang, neo-klasik. Padahal sudah jelas terbukti, resep kebijakan ekonomi yang mereka berikan telah menjerumuskan bangsa ini ke dalam jurang kenistaan: dominasi modal asing, hutang luar negeri yang tak terbayarkan, dan kemandirian yang terbeli. Padahal, presiden pertama

25 "Herbal Asli Indonesia Dipatenkan Asing," Forum no. 33/13-19 Desember 2010, http://majalahforum.com/nasional.php?tid=74 (diakses tanggal 29 Februari 2011).

republik ini yang juga *founding father* Indonesia telah mengingatkan sejak lama:

"Apakah neo-kolonialisme itu? Neo-kolonialisme adalah kolonialisme 'model baru'. Di depan hakim kolonial di Bandung, tatkala atas nama Bangsa Indonesia aku menelandjangi kolonialisme, aku berkata sebagai berikut: Imperialisme bukan sadja sistem atau nafsu menaklukkan negeri dan bangsa lain, tapi imperialisme bisa djuga hanya nafsu atau sistem mempengaruhi ekonomi negeri dan bangsa lain. Ia ta' usah didjalankan dengan perang atau bedil atau meriam atau kapal perang, ta' usah berupa perluasan daerah negeri dengan kekerasan sendjata sebagai jang diartikan oleh van Kol, —tetapi ia bisa djuga berdjalan hanja dengan 'putar lidah' atau tjara 'halus-halusan' sadja, bisa juga berdjalan dengan tjara 'penetration pacifique'." (Pidato Genta Suara Republik Indonesia, Amanat Presiden Soekarno pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1963 di Jakarta).

KRETEK

Yang Tanggal dan Tinggal dalam Ingatan Kebudayaan

The making of kretek involves three principal ingredients—tobacco, cloves, and sauce. The first two were brought together as the extraordinary consequence of history and chance, while the third reflects the traditional Indonesian predilection for spicing things up a little.
(Hanusz: 2003)*

Kretek: Bukan (Sekadar) Rokok

Inilah konsekuensi dari bangsa dengan sistem kemasyarakatan yang khas. Mari mengulik ingatan, dan mengorek apa yang bisa kita temukan di sana. Adakah yang tertinggal dari kretek?

Jawabannya: banyak. Kretek melekat dalam kenangan orang Indonesia sebagai bagian dari keseharian. Dalam forum-forum warga, keberadaan batangan kretek yang disuguhkan dalam gelas-gelas belimbing adalah pemandangan yang tak asing. Pada kesempatan informal, kretek seolah menjadi bagian dari sarana bersosialisasi antar-warga, dan kerap dihadiahkan untuk menandai rasa menghargai seseorang terhadap bantuan orang lain. Bahkan, pada dekade 90-an, nyaris semua warung besar maupun kecil menyediakan kretek, bersanding dengan beras, gula, minyak kelapa, dan bahan-bahan pokok lainnya. Sebagai sebuah produk kebudayaan, kretek juga pernah dianggap sebagai penanda identitas. Andreas Maryoto, dalam tulisannya di Harian *Kompas*, menyitir penggalan sebuah berita di harian *Bintang Timoer* yang dibukukan dalam *Student Indonesia di Eropa* :

> *"Kopinya bukan kopi saringan, tetapi kopi tubruk sebab kopi ini katanya nationaal, gulanya gula jawa. Susu tidak dipakai sebab tidak nationaal. Rokoknya kelobot. Selamatan nationaal ini terus* (berlangsung—ed.) *sampai pagi hari."*

---

* Hanusz, Mark, *Kretek: The Culture and Heritage of Indonesia's Clove Cigarettes*, Equinox Publishing (Asia), Jakarta: 2003, hal. 53.

Sepenggal tulisan ini menggambarkan bahwa sejarah pernah mencatat *kelobot* (rokok kretek yang dibungkus dengan daun jagung), sebagai salah satu simbol pergerakan nasional, ketika mahasiswa-mahasiswa Indonesia menimba ilmu di Belanda.[1] Nyaris tak terbayangkan, betapa bangganya kaum nasionalis muda Indonesia pada masa itu, terhadap kretek. Jika berbagai preseden di atas, bersama banyak yang lainnya, dibaca secara jernih dan obyektif, maka tak berlebihan rasanya jika kretek dipandang setara dengan simbol-simbol tradisi yang telah kita kenal dan menumbuhbesarkan kita. Tak ubahnya rendang, pempek, atau gudeg.

Tak heran jika Hanusz, dalam kutipan di atas, menyebut kemunculan kretek sebagai produk yang merepresentasikan tradisi masyarakat pribumi Indonesia: suka membumbui hal-hal di sana dan di sini, selain juga sebagai konsekuensi dari sejarah. Jauh sebelum Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan, kretek telah menjadi bagian dari rasam yang menumbuhkan apa yang kini kita sebut kebudayaan nasional. Secara ekonomi, kretek bahkan mengalami kejayaan nyaris serupa dengan yang dialami cengkeh di Kepulauan Maluku pada abad pertengahan. Kisah sukses ini tecermin dalam riwayat Nitisemito, pemilik NV Tjap Bal Tiga—salah satu perusahaan bumiputera terbesar, tertua dan paling awal yang pernah didirikan di Hindia Belanda—yang dikabarkan mampu membayar akuntan Belanda HJ Voren di perusahaannya dan akuntan dari pemerintah kolonial bernama Poolman[2] dalam menjalankan bisnisnya, dan pada tahun 1924 telah mempekerjakan lebih dari lima belas ribu orang pegawai.

Bagaimanapun, kejayaan kretek—yang hingga kini masih menguasai pasar Indonesia—sangat dipengaruhi oleh sejarah panjang yang melekat di punggungnya, dan keunikan yang menjadikan kretek sebagai produk khas dan tak tergantikan: unsur rempah Nusantara yang, pada suatu masa dulu, nilainya setara dengan emas, *cengkeh*.

1 “Kopi Tubruk Simbol Pergerakan Nasional”, *Kompas*, 5 April 2010.
2 “Sigaret Kretek, Tonggak Bangsa”, J.A. Noertjahyo, http://heritageofjava.com/portal/article.php?story=20090326214811510 (diakses tanggal 12 Mei 2011).

“**ke·re·tek** [1] /keréték/ *n* bunyi daun terbakar.
ke·re·tek [2] /keréték/ *n* rokok yg tembakaunya dicampuri serbuk cacahan cengkih”[3]

Lantaran perbedaannya dengan rokok yang diperkenalkan dan dibawa oleh kolonialis Eropa ke Indonesia, pantaslah kalau kita memahami bahwa kretek memang bukan sekadar rokok. Pada mula kemunculannya, kretek dikenal dengan sebutan ‘rokok cengkeh’. Nama ‘kretek’ diambil dari bunyi yang timbul ketika ia diisap. Sebelum dieja sebagaimana lazimnya sekarang, mula-mula ia disebut ‘keretek’ atau *kumréték* dalam bahasa Jawa, layaknya bunyi *keréték-keréték* yang terdengar ketika serpihan cengkeh dalam rajangan tembakau bertemu dengan api. Tak jarang, kandungan cengkeh dalam kretek juga membuat bara api dari ujung kretek meletik (meloncat) dan melubangi pakaian. Dari bunyi yang khas itulah nama ‘kretek’ berasal (*onomatopeic*).

Orang Indonesia kerap memahami kretek sebatas sebagai sigaret yang tidak menggunakan filter (busa). Pada tahun ’60 hingga ’70-an, kretek bahkan identik dengan sigaret untuk kalangan bawah. Sesungguhnya, ditinjau dari asal katanya, yang membedakan kretek dengan jenis sigaret yang lain adalah kandungan cengkeh dan unsur-unsur herba/rempah alamiah lain di dalamnya. Jika rokok putih (jenis rokok konvensional yang berasal dari Barat) hanya mengandung tembakau, kretek merupakan produk hasil racikan tembakau dengan cacahan cengkeh dan tambahan saus. Racikan khas Indonesia inilah yang membuat sigaret kretek memiliki rasa dan aroma berbeda dari jenis sigaret yang lain.

Kretek juga merupakan hasil percampuran yang amat kaya. Jika sebatang rokok putih hanya mengandung paling banyak tiga jenis tembakau (dikenal dengan sebutan *American Blends*, terdiri dari campuran tembakau Virginia, Burley, dan tembakau Oriental—biasanya jenis *turkish*), dalam sebatang kretek bisa terkandung belasan, bahkan mencapai lebih dari tiga puluh jenis tembakau yang berasal dari seluruh pelosok Indonesia.

3 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga,* Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: 2003, hal. 552.

Kini, berkat dukungan pemerintah terhadap industri kretek di era 70-80an, varian kretek di Indonesia telah berkembang dan memunculkan bentuk-bentuk kretek baru yang rupa dan kemasannya tak kalah dengan rokok putih. Salah satunya juga jenis kretek yang rendah tar dan rendah nikotin. Tetapi, jauh sebelum pemerintah menyadari potensi industri tembakau olahan di tanah airnya sendiri ini, apa yang terjadi pada tembakau dan cengkeh, dua unsur utama yang bertemu dalam kretek, sepanjang kurun abad XVI hingga XIX? Dan bagaimana keduanya bisa bertemu?

Tembakau: Emas Hijau dari San Salvador

The great European adventurers who set sail in the fifteenth and early sixteenth centuries went in search of spices, but found tobacco instead.

Agustus tahun 1492. Seorang admiral berusia 41 tahun, dari kota Palos, Spanyol, berangkat berlayar ke arah Barat. Ia telah dikirim oleh Raja Ferdinand II (Spanyol) untuk sebuah ekspedisi penting yang menentukan peran Spanyol dalam kancah perdagangan Eropa: menemukan rempah Asia. Jatuhnya Granada di tahun 1492 telah membuka kesempatan bagi Spanyol untuk menantang Portugal, yang sejak tahun 1450-an telah menjadi pusat ekspedisi dan eksplorasi besar di dunia barat, dalam hal perdagangan dan eksplorasi.

Selama masa tinggalnya di Portugal, Christophorus Columbus, pelaut yang telah berlayar sejak berusia 14 tahun ini memang telah mendengar banyak dari kawan-kawannya sesama pelaut, tentang daratan di balik dunia yang telah mereka kenal baik: benua Barat. Nyali avonturir Columbus membuatnya terpanggil untuk menjelajah dunia tak dikenal itu, terutama untuk menemukan Cina dan Jepang, dua negara timur yang pamornya mulai kesohor di pasar Eropa. Columbus sempat menyampaikan keinginannya kepada raja Portugal, John II, tetapi alih-

alih mendukung Columbus, kerajaan Portugal justru mensponsori ekspedisi serupa yang bergerak ke Afrika.

Kegagalan tidak lantas membuat Columbus patah arang. Setelah tahun 1485, pasca kepindahannya ke Spanyol, keinginan Columbus akhirnya didengar oleh Raja Ferdinand II & Ratu Isabella, yang kemudian setuju untuk menjadi sponsor ekspedisi pelayaran Columbus menuju Dunia Baru. Sebuah ekspedisi yang kelak dinamai *Navidad*. Maka bertolaklah Columbus menuju Cina dan Jepang yang telah diimpi-impikannya.[4]

Tetapi, alih-alih menemukan benua Asia dan rempah-rempah khas benua oriental, Columbus justru mendarat di San Salvador, Kepulauan Bahama. Ia mengira telah sampai di Asia. Maka ia menamai daerah itu Indies—dari sana barangkali sebutan 'Indian' untuk suku-suku pribumi setempat didapat. Inilah tempat yang disebut *the New World*, di mana Columbus bertemu dengan suku Lucayan, dan untuk pertama kalinya bertemu dengan ritus menikmati daun tembakau. Di masa itu, meng-isap tembakau memang masih menjadi tradisi eksklusif sejumlah suku pribumi Indian saja. Sayang, yang mula-mula dicarinya tak ada di sana.

Navidad memang pulang tanpa rempah-rempah. Tetapi Columbus tidak kembali dengan tangan hampa. Syahdan, ia membawa serta apa yang didapatnya sepanjang perjalanan penaklukan itu: emas, nenas, cabai, beberapa orang suku pribumi, dan … tembakau, tumbuhan yang sebelumnya tak dikenal. Maka, sejak perempat akhir abad ke- 16, tembakau mulai dikenal orang-orang di daratan Eropa. Sejak itu pula, kenikmatan tembakau mulai merambah daratan Eropa. Kelak, para pelaut Eropa kemudian membawanya serta dalam ekspedisi rempah, dan menanamnya di tanah air, ketika mereka akhirnya mendarat di tanah "Dunia Tua"; *the Old World*, demikian orang-orang Barat itu me-nyebut tanah kita, surganya rempah-rempah.

Tembakau, salah satu bahan pokok pembuatan sigaret kretek, me-mang bukan tanaman *indigenous* Indonesia. *Nicotiana tabacum*, jenis tembakau yang lazim digunakan untuk sigaret dan berinduk pada

4 "Christopher Columbus: Explorers, Pioneers, and Frontiersmen, 1451-1506", http://www.u-s-history.com/pages/h1033.html.

tanah asalnya di Amerika, mulai ditanam di Indonesia pada awal abad XVII. Beberapa literatur berpendapat bahwa Portugis-lah yang mula-mula membawa tembakau ke Indonesia. Prof G. Schlegel, berdasarkan analisa atas kata "tembakau", menyatakan bahwa orang Portugis pasti merupakan orang pertama yang telah memperkenalkan tembakau ke tanah air kita (sebab pemakaian kata "tembakau" di berbagai daerah untuk menyebut tanaman termaksud lebih dekat dengan "*tabaco*" atau "*tumbaco*", kata dalam bahasa Portugis untuk menyebut tanaman tembakau).[5] Kendati demikian, Hanusz berpendapat bahwa Belanda-lah yang telah melakukan penanaman tembakau secara besar-besaran di Jawa, Sumatera, Bali, dan Lombok.[6]

Tobacco was introduced to Asia in 1575, when the Spanish brought it to the Philippines from Mexico, and in 1601 it was introduced to Java.[7]

Menurut keterangan De Candolle, tanaman tembakau pertama kali diperkenalkan oleh Portugis di Jawa tahun 1600. Tak jauh berbeda, B.H.M Vlekke, dalam bukunya *Nusantara: a History of Indonesia* menyatakan, tembakau telah dibawa ke Asia oleh orang-orang Spanyol melalui Filipina dan mulai diketahui di Indonesia pada akhir kurun abad ke-16. Senada dengan Vlekke, *Tijdschrift voor Nederlandsche-India* dalam artikel berjudul "Lets Over de Tabakskultuur op Java" menyatakan, tanaman tembakau telah diketahui di Hindia Belanda pada akhir

5 Budiman, A., & Onghokham, *Rokok Kretek: Lintasan Sejarah dan Artinya bagi Pembangunan Bangsa dan Negara*, Jarum, Kudus: 1987, hal. 80.

6 Yang menarik, Onghokham dan Budiman dalam bukunya juga menyebutkan bahwa, selain tembakau asli Amerika yang dikenal luas oleh dunia, seorang ahli botani Australia bernama Maiden pernah mencatat keberadaan jenis tembakau lain yang telah tumbuh sebelumnya di Nusantara. Buku ini menyatakan bahwa masyarakat pribumi Papua, terutama orang-orang kerdil Tapiro yang hidup di pegunungan, telah terbiasa mengonsumsi tembakau dengan cara melinting dan membakarnya. Sayangnya, jenis tembakau indigenous Papua (Irian Jaya) ini, yang jenisnya dekat dengan spesies tembakau Australia: nicotiana suaveolens, tidak populer dalam khasanah perdagangan tembakau dunia.

7 "Tobacco and Kretek: Indonesian Drugs in Historical Change", Monika Arnez, *ASEAS - Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 2 (1), 2009, hal. 51

abad ke-16, tetapi pihak Kompeni belum mempunyai gagasan untuk membudidayakan. Penduduk asli pada waktu itu menanam tembakau untuk kepentingan mereka sendiri. Terlepas dari siapa yang mula-mula memperkenalkan dan memulai budidaya tembakau di Nusantara, Denys Lombard dalam *Nusa Jawa: Silang Budaya II (Jaringan Asia)* menulis: "Sejak tahun 1603, Scott (Edmund Scott—pen.) sudah menyebutkan penggunaan tembakau yang luas di Banten: "*They (the Javans) doe likewise take much tobacco and opium"*, dan pada tahun 1626 Kompeni sudah mengepakkan penjualan komoditi itu di Batavia."

Di Hindia Belanda, tembakau banyak ditanam di dataran rendah maupun di dataran tinggi yang tidak dihuni orang. Tembakau lokal ditanam penduduk untuk dikonsumsi kalangan sendiri. Pribumi menanam tembakau di tanah beririgasi, juga di tanah tegalan dan pekarangan. Tembakau ini dipakai penduduk untuk dibuat rokok, atau dikunyah begitu saja setelah mengunyah sirih.

Sedangkan kebiasaan merokok, menurut TS Raffless dalam *History of Java*, diperkenalkan oleh orang Belanda tahun 1601. Menurut sejarah Jawa, orang Indonesia sudah memulai kebiasaan mengonsumsi tembakau sebagai rokok sejak tahun 1601[8], setahun setelah ia mulai ditanam di Jawa. Ditinjau dari kata "rokok" dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Belanda "rokken", penggunaan tembakau dalam bentuk rokok kemungkinan memang mula-mula diperkenalkan oleh bangsa Belanda. Sebuah naskah Jawa *Babad Ing Sangkala* juga menyebut bahwa kemunculan tembakau, yang diikuti kebiasaan merokok, bersamaan dengan mangkatnya Panembahan Senopati, antara tahun 1601-1602.[9] Sedang menurut seorang sumber Eropa, tahun 1603 di Sumatera, penguasa Aceh dilaporkan mengisap tembakau. Pada tahun yang sama, keberadaan perokok suku Jawa mulai terlihat di Banten.[10]

Ketika armada laut Belanda mula-mula mendarat di Banten dan VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) baru saja didirikan di

8 Murray Li, Tania, *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2002, hal. 87.
9 Budiman, Onghokham, op. cit., hal. 82.
10 Murray Li, op. cit., hal. 89.

Hindia Belanda, tembakau agaknya memang tengah menjadi objek yang menarik perhatian dunia. Pada dua dasawarsa awal abad XVII ini, di Eropa dan Asia beredar sejumlah tulisan maupun opini yang mengungkapkan manfaat tanaman tembakau bagi kesehatan, seperti yang terjadi tahun 1605 di Jepang, di mana tembakau digunakan untuk kepentingan pengobatan. Juga tahun 1610, ketika Edmund Gardener, seorang jentelmen dan praktisi pengobatan di Inggris menulis *The Triall of Tobacco*, yang berisi manfaat tembakau yang istimewa dalam semua pengobatan, petunjuk pemakaian yang benar, dan bagi siapa pemakaiannya paling bermanfaat. Sedang di Cina, pada zaman Dinasti Ming (sebelum tahun 1620), tembakau dipuji manfaatnya sebagai tanaman untuk pengobatan. Agaknya, Belanda mulai mencium tembakau sebagai komoditas perdagangan yang menjanjikan pada akhir abad XVI, karena hubungan dagangnya yang baik dengan Jerman di masa itu, ketika kebiasaan merokok telah dikenal luas di seluruh Hamburg. Di dua dasawarsa awal abad XVII pula, Portugis dan Spanyol, dua 'raksasa' penguasa pasar Eropa, mulai merambah Asia dan membudidayakan tembakau di Filipina, Jepang, India, dan banyak tempat lainnya. Pembudidayaan tembakau di Nusantara oleh Belanda dapat diasumsikan sebagai upaya mereka untuk turut 'mengambil potongan kue' dalam ingar-bingar pasar tembakau dunia waktu itu, dengan meniru apa yang telah dilakukan Portugis dan Spanyol sebelumnya.

Dengan sendirinya, upaya Belanda tersebut menjadi titik awal perkembangan budidaya tembakau dan kebiasaan mengonsumsi rokok di Nusantara, yang mengantar kita ke dua babakan penting sepanjang kurun abad XVI s.d XIX, yaitu periode awal kerajaan Mataram Islam, dan pasca-periode Tanam Paksa di Indonesia.

Sultan Agung, Perokok Berat dari Mataram

"Sekembalinya ke mesjid, Modin dan Bodin menggelar tikar dan meletakkan di atasnya pelita, kulit jagung dan tembakau, menyan madu sebesar biji kemiri, pisau untuk mengirisnya serta sebuah kendi. "Ayo, mari kita merokok dan minum seadanya!" Para tamu mencabik kulit jagung, merapikannya dengan pisau, menaruh tembakau dan kemenyan lalu melintingnya."[11]

Nukilan di atas diambil dari terjemahan *Serat Centhini*, yang ditulis oleh tiga pujangga atas prakarsa putra mahkota Kerajaan Surakarta, Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro III; proses penulisannya dimulai sekira tahun 1814, dan lahir "di zaman huru-hara manusia dan alamnya", yaitu ketika Gunung Merapi meletus hebat tahun 1822 dan pemberontakan Pangeran Diponegoro mendidih di Yogyakarta, tahun 1825-1830. Ketika *suluk* ini digurat, kebiasaan merokok memang telah meluas di kalangan masyarakat Jawa. Tetapi dua abad sebelumnya, kebiasaan merokok bermula dari junjungan masyarakat Jawa dalam lingkungan Keraton Mataram, Sultan Agung.

Beberapa catatan mengenai kunjungan duta VOC ke Keraton Mataram tahun 1622 dan 1623 mencantumkan kebiasaan Sultan Agung yang rupa-rupanya adalah perokok kelas berat. Menurut Dr. H. De Haen, duta VOC tersebut, selama audiensi Sultan Agung terus merokok dengan menggunakan pipa berlapis perak. Seorang perutusan VOC yang lain menuturkan, ia pernah melihat Sultan Agung sedang memeriksa latihan perang-perangan. Sri Baginda memandang ke depan sambil terus menerus merokok didampingi seorang pembantunya, yang dengan segera mengacungkan *upet* (tali api-api) yang dibawanya, begitu rokok Sri Baginda mati.[12]

11 Inandiak, Elizabeth D., & Lesmana, Laddy, *Centhini: Minggatnya Cebolang*, Galang press, Yogyakarta: 2005, hal. 104.
12 Budiman, Onghokham, op. cit., hal 84.

Pada masa itu, sebagai budaya yang dibawa oleh kolonialis Belanda, kebiasaan merokok memang baru terbatas pada lingkungan dalam Keraton[13]. Seperti diungkapkan Solichin Salam dalam *Kudus dan Sejarah Rokok Kretek*, tahun 1624, para pembesar Jawa di Keraton Kartasura sudah gemar menghisap rokok dari tembakau.[14] Sedangkan kebiasaan yang lazim dilakukan oleh rakyat jelata dalam menikmati tembakau pada masa itu masih berupa mengunyah sirih pinang.[15]

Perdagangan sigaret diperkirakan baru merambah kalangan masyarakat Jawa beberapa tahun setelah titimangsa yang disebutkan oleh Solichin Salam di atas. Perkiraan ini, sebagaimana disebutkan dalam *Rokok Kretek: Lintasan Sejarah dan Artinya Bagi Pembangunan Bangsa dan Negara* (Amen Budiman & Onghokham, 1987), terlihat dalam riwayat *Pranacitra*, sebuah kisah yang berlatar kesultanan Mataram, pada paro pertama abad ke-17. Legenda ini banyak dikenal sebagai cerita tentang seorang perempuan bernama Rara Mendut, ikon perempuan yang belakang hari kerap disebut dalam interpretasi ulang tentang kretek dan perempuan.

Kisah tentang Rara Mendut bermula ketika Sultan Agung berhasil menumpas pemberontakan Pati tahun 1627. Kala itu, karena kemenangannya, pasukan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Wiraguna membawa pulang banyak harta rampasan. Di antaranya adalah seorang perempuan jelita bernama Rara Mendut. Sebagai tanda terima

13 Tradisi mengisap tembakau dengan pipa juga diikuti oleh pengganti Sultan Agung, Sunan Amangkurat I, seperti dikabarkan oleh duta VOC Zebald Wonderer dan Jan Barentszoon yang mengunjungi Keraton Mataram di tahun 1645. Sedang sebuah informasi dari kurun yang lebih muda, yakni awal abad XVIII, menyebutkan hal serupa dilakukan oleh raja Mataram Sunan Pakubuwono I (1703-1719), putra Sunan Amangkurat I. Catatan mengenai ini dibuat oleh seorang pendeta VOC, F. Valentijn, yang pernah mengunjungi istana Mataram pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono I. Menurut Valentijn, di samping para penjaga, sejumlah abdi juga selalu berjaga di dekat Sri Baginda, masing-masing dengan tugas khusus. Salah seorang di antaranya membawa sepotong buluh, alat merokok Sri Baginda, dan seorang yang lain membawa tempurung kelapa untuk menaruh tembakau yang oleh duta VOC disebut "boengkoezen" (*bungkus*), yakni tembakau yang telah digulung menggunakan daun.

14 "Sigaret Kretek, Tonggak Bangsa", J.A. Noertjahyo, http://heritageofjava.com/portal/article.php?story=20090326214811510 (diakses tanggal 12 Mei 2011).

15 "Legenda Sungai Gajah Wong Yogyakarta", http://jogjaicon.blogspot.com/2011/03/legenda-sungai-gajah-wong-yogyakarta.html (diakses tanggal 12 Mei 2011).

kasih, Sultan Agung kemudian menghadiahkan Rara Mendut kepada Tumenggung Wiraguna. Meski telah berusia paruh baya, tumenggung ini memang dianggap berjasa besar bagi Mataram.

Tetapi Rara Mendut dengan berani menampik lamaran Tumenggung Wiraguna yang disampaikan langsung oleh istrinya, Nyai Ageng Wiraguna, bahkan menjelek-jelekkan perwira Mataram itu tanpa tedeng aling-aling di hadapan Nyai Ageng. Hasil lamaran berbuah cemoohan ini disampaikan sang istri apa adanya kepada sang Tumenggung, yang kontan terbakar amarahnya. Dengan murka, Tumenggung Wiraguna menjatuhkan hukuman bagi Rara Mendut. Gadis ini diwajibkan membayar pajak tiga real sehari. Kalau tak sanggup, Rara Mendut harus bersedia menjadi istri Wiraguna.

Demi menghindari kewajiban menikah, Rara Mendut menyanggupi perjanjian ini. Dengan syarat, ia dibekali modal untuk berdagang. Kepada Nyai Ageng, Rara Mendut hanya meminta bekal sejumlah tiga real. Katanya, bekal itu akan digunakan untuk berjualan rokok panjang berikat benang sutra. Mengetahui jumlah bekal yang diminta Rara Mendut, Nyai Ageng yang terkejut lalu menyampaikan kehendak Rara Mendut untuk berjualan kepada suaminya. Untungnya, sang tumenggung memberi izin. Dengan syarat, warung Rara Mendut mesti ditabir dengan rapat dan seksama, supaya penjualnya tak kelihatan oleh orang yang berlalu-lalang di jalanan. Tumenggung itu bahkan menyuruh istrinya untuk membekali Rara Mendut sejumlah 10 real. Maka, dengan bekal uang itu, dan tembakau sompok dari Imogiri, daun kelobot, bumbu-bumbu, dan ‘wur’ pemberian Nyai Ageng, Rara Mendut pun memulai usahanya.

Syahdan, atas bantuan para abdi kyai tumenggung yang memang mahir membuat kelobot (Rara Mendut sendiri konon tak diizinkan ikut membuat), mereka berhasil membuat tiga puluh bungkus rokok. Kesemuanya lalu dipajang rapi di atas bokor perak berupam kuningan yang diletakkan di muka warung. Kelobot hasil lintingan para abdi kyai tumenggung itu dijual dengan harga setengah rupiah sebatang, jauh lebih mahal daripada harga di pasaran. Puntungnya bahkan berharga

lebih mahal lagi. Demikian alasan Rara Mendut, yang dituliskan oleh Budiman & Onghokham:

"Harga puntung rokoknya menurut panjang dan pendek ukurannya. Ada yang dua real sebatang, ada juga yang dua setengah real, tiga real dan empat real. …. Mau tahu sebabnya? Tentu saja, karena puntung rokok itu bekas kena bibirku dan telah leceh dengan air ludahku yang manis dan harum."

Alhasil, orang-orang lantas berebut mendapatkan kelobot Rara Mendut. Jika tak ada lagi uang, barang seperti kain, ikat pinggang, ikat kepala, keris, pedang, juga mereka berikan. Bahkan para penjual kayu, bambu, dan alang-alang pun rela menyerahkan barang dagangan mereka, demi menonton kecantikan Rara Mendut. Dengan demikian, penghasilan Rara Mendut sudah lebih dari cukup.

Cerita yang disarikan dari paparan dalam *Rokok Kretek: Lintasan Sejarah dan Artinya Bagi Pembangunan Bangsa dan Negara* (Amen Budiman & Onghokham, 1987) ini tampaknya diambil dari buku *Pranatjitra; Een Javaansche Liefde* karya Dr. C.C. Berg. Melalui pembacaan atas buku tersebut, Budiman dan Onghokham menambahkan keterangan bahwa naskah Pranacitra (yang menjadi sumber buku karya C.C. Berg di atas) berasal dari zaman Kartasura (1681-1743). C.C. Berg sendiri dikatakan membubuhkan penjelasan di dalam bukunya, bahwa kisah Pranacitra ini tidak boleh tidak telah muncul antara tahun 1627 dan 1847. Maka, mengutip Budiman & Onghokham: "berdasarkan keterangan inilah tidak berlebihan kiranya jika kita berpendapat, pada abad ke-XVII rokok telah merupakan barang dagangan di kalangan masyarakat Jawa."

Bisa disimpulkan, paling tidak setelah tahun 1627, rokok telah menjadi konsumsi rakyat kebanyakan dan menjadi bagian dari keseharian, hingga berabad-abad seterusnya. Ini diperkuat oleh tulisan J.W. Winter, "*Beknopte Beschrijving Van Het Hof Soerakarta In 1824*", yang memuat catatan tentang cara hidup kebanyakan orang Jawa. Ayahnya pernah tinggal di daerah *Voorstenlanden*, dan Winter mulai menulis memorinya tahun 1824, berakhir tanggal 1 Maret 1825. Menurut catatan tersebut,

seorang laki-laki Jawa menghabiskan sejumlah uang yang cukup besar untuk konsumsi tembakau dengan ilustrasi berikut:

"Seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri bisa hidup dengan dua belas 'duit' sehari. Tanpa perlu memperhatikan makan daging dan ikan, ia menggunakan dua belas duit itu untuk keperluan sebagai berikut: tiga duit untuk membeli sirih dan tembakau. Tiga duit lagi untuk membeli nasi, garam dan tempe, yang digoreng dan dimakan seperti ikan. Enam duit selebihnya untuk membeli beras. Jika orang yang bersangkutan tidak makan sirih, ia menggunakan tiga duit dari uang belanjanya semata-mata untuk membeli tembakau, yang dipakai sebagai bahan untuk merokok dengan menggunakan selembar kulit jagung yang telah dikupas dan dikeringkan. Kulit jagung semacam ini disebut 'klobot'. Dengan demikian jatah uang rokok seorang bujangan pada waktu itu lebih kurang dua puluh lima persen dari jumlah keseluruhan uang belanja sehari-hari yang dikeluarkannya."[16]

Dari pembacaan atas ringkasan sejarah di atas, sekurang-kurangnya dapat disimpulkan bahwa kebiasaan merokok yang diperkenalkan oleh Belanda dipopulerkan mula-mula oleh lingkungan kerajaan, sebelum akhirnya menjadi bagian dari budaya masyarakat kebanyakan dan telah menjadi kebiasaan yang berakar kuat pada awal abad XIX.

Di kurun yang kurang lebih sama, beberapa bulan setelah catatan J.W. Winter berakhir, pemberontakan seorang pangeran Mataram, yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro, pecah di Jawa. Setelah VOC bangkrut dan dilikuidasi di tahun 1799, ganti perekonomian pemerintah Belanda diobrak-abrik. Kerugian ini pada akhirnya membawa Johannes van den Bosch ke HIndia Belanda untuk menerapkan sebuah sistem baru di Jawa, yakni apa yang kita kenal dengan *Cultuurstelsel* atau Tanam Paksa.

16 Budiman, Onghokham, op. cit, hal. 87.

Tembakau di Masa Tanam Paksa

Tanam paksa (*cultuurstelsel*) yang diberlakukan di tanah Jawa tahun 1830, sesungguhnya sudah dimulai sejak pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles (1811-1816) mengeluarkan kebijakan *domein theory*. Beleid ini menyatakan bahwa semua tanah di negara Hindia Belanda adalah milik raja atau pemerintah. Sebagai konsekuensinya, petani dibebani kewajiban untuk membayar pajak tanah, berupa setoran 2/5 hasil buminya kepada pemerintah. Terjadilah *landrente*.

Tak sampai dua dasawarsa kemudian, pemerintah Belanda merugi besar. Perlawanan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah sampai Jawa Timur, dan Perang Paderi di Sumatera Barat menguras kas pemerintah habis-habisan. Untuk menutup kerugian, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang baru, Johannes van den Bosch lantas memperkenalkan kebijakan pertanahan *cultuurstelsel* yang merupakan perkembangan dari *landrente.* Di atas kertas, aturan tanam paksa antara lain:

1. Setiap rakyat Indonesia mesti menyediakan tanah pertanian untuk *cultuurstelsel*, dengan besaran tidak melebihi 20% atau seperlima bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan.
2. Tanah yang disediakan untuk *cultuurstelsel* bebas dari pajak, dengan landasan pemikiran bahwa setoran hasil panen petani dianggap sebagai pembayaran pajak (inatura).
3. Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan, pabrik, atau pengangkutan milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau seperlima tahun.
4. Waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk *culturstelsel* tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih 3 (tiga) bulan.
5. Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat.
6. Kerugian akibat gagal panen yang bukan dikarenakan kesalahan petani, seperti bencana alam dan terserang hama, akan ditanggung pemerintah Belanda.

7. Pelaksanaan teknis aturan tanam paksa diserahkan kepada kepala desa.

Pada pelaksanaannya, poin 1, 3, 4, 5, dan 6 dari beleid di atas tidak berlaku. Seperti dicatat di *1000 Tahun Nusantara*, petani dipaksa untuk menanam sepertiga (bukan seperlima) dari tanahnya dengan tanaman yang ditentukan pemerintah, yakni tanaman-tanaman ekspor seperti kopi, teh, tebu, nira, dan tembakau. Hasilnya mesti diserahkan seluruhnya kepada pemerintah kolonial. Kerugian petani akibat bencana alam, seperti yang pernah terjadi pada kebun tembakau di Muntilan dan Kedu (sekarang Temanggung), yang pada tahun 1832 mengalami gagal panen akibat letusan Gunung Merapi, tak pernah ditanggung oleh Pemerintah Belanda. Penduduk juga dipaksa menanam tanaman *gupernemen* melebihi batas waktu yang ditentukan. Sebagai contoh, seorang kontrolir di Pekalongan pada tahun 1851 memperkirakan seorang petani budidaya nira menghabiskan waktu 176 hari dalam setahun untuk menanam, merawat, memotong dan menyerahkan hasilnya, ditambah lagi 76 hari kerja pada pabrik nira.[17] Pelaksanaan kebijakan tanam paksa, pada praktiknya, merupakan bentuk penindasan kepada petani.

Di sisi lain, Tanam Paksa turut memunculkan perkebunan-perkebunan tembakau di daerah-daerah baru. Di tahun-tahun sebelumnya, tembakau ditemukan tumbuh di beberapa tempat di Jawa, di antaranya Buitenzorg (Bogor), Priangan, dan Cirebon. Setelah tahun 1830, beberapa pusat penghasil tembakau hilang, sementara beberapa yang lain muncul, seperti Kediri, Rembang, Madiun, Surabaya, dan Madura.[18] Proyek Tanam Paksa menyebabkan tanaman tembakau berkembang luas di Karesidenan Rembang. Memang, setelah melakukan percobaan dengan berbagai macam tanaman, jenis tanaman wajib gupernemen

17 Anne Booth, et.al.,(ed.), 1988, *Sejarah Ekonomi Indonesi*a, Jakarta : LP3ES, hal. 45 dalam Tri Handayani, "Petani dan Tembakau Gupernemen di Karesidenan Rembang pada Periode Penanaman Tanaman Wajib", diunduh dari http://eprints.undip.ac.id/19807/1/Petani_dan_Tembakau_Gupernemen-Tri_Handayani.pdf (diakses tanggal 15 Juni 2011).

18 Murray Li, op. cit., hal. 93.

di Karesidenan Rembang adalah tebu, tembakau dan kopi.[19] Tetapi di banyak tempat di Karesidenan Rembang, penanaman tembakau tidak berhasil dengan baik. Sedang daerah yang lebih berhasil dalam pembudidayaan tembakau adalah di sekitar Klaten, daerah-daerah kesultanan, Jember dan Basuki.[20]

Sejak tahun 1830-an pula, tembakau ditemukan di bagian timur Pulau Jawa, yakni Kepulauan Kai dan sekitarnya. Demikian pula tembakau masih merupakan komoditas ekspor yang terkenal di Ternate (pada masa ini tampaknya dibudidayakan di Pulau Makian, Pulau Mori, Buru, dan Seram, Ambon, Hila, dan Saparua, namun setelah periode ini, tidak muncul lagi di sumber-sumber pustaka), dan Bali.

Perkembangan tanaman tembakau di Bali barangkali bisa dikecualikan dari kemunculan wilayah-wilayah perkebunan tembakau baru yang merupakan implikasi dari pemberlakuan Tanam Paksa. Tahun 1830-an, ketika *cultuurstelsel* baru mulai diberlakukan di Pulau Jawa, misionaris yang mengunjungi Bali telah mengatakan bahwa pulau itu "menghasilkan banyak tembakau dengan kualitas yang sangat bagus", dan mencatat tembakau sebagai salah satu dari empat jenis tanaman pokok di Bali. Sedang di tahun 1850, Bali dikatakan sebagai eksportir tembakau utama. Para pedagang dari Pulau Selayar membawanya ke Makassar dan Singapura. Di kepulauan Sunda Kecil, pada masa yang sama, tembakau merupakan ekspor terpenting kedua setelah beras.[21]

Di Kedu, pada periode tanam paksa, Pemerintah Hindia-Belanda berusaha menanam tembakau dengan bibit luar negeri untuk kepentingan ekspor Eropa, yakni jenis Havana dan Maryland. Majalah *De Residentie* (April 1857) menurunkan berita, pada tahun 1831 dan 1832 pemerintah mengadakan percobaan penanaman di Distrik Jetis dan Probolinggo (Muntilan sekarang). Tanam paksa tembakau di Kedu seluas 55 bahu dilakukan dengan cara memberi bibit cuma-cuma kepada petani dan kelak mereka menjualnya ke pemerintah. Penanaman tembakau di Muntilan dan Temanggung ini semula membawa harapan baik bagi

19 Handayani, op. cit.
20 Ibid.
21 Murray Li, op. cit., hal. 101.

petani, karena apabila berhasil mereka akan mendapatkan f 50, per bahu untuk tembakau kualitas rendah dan f 90,- untuk kualitas terbaik. Harga ini hampir seimbang dengan harga tebasan tebu per bahu, yaitu f 85,-. Tahun berikutnya musibah datang. Panen gagal karena dampak letusan abu Gunung Merapi. Tahun 1834, di Kabupaten Bojonegoro dilakukan uji coba penanaman tembakau luar negeri, yaitu Manilla dan Havana. Hasilnya memberi harapan untuk ditanam lebih lanjut pada tahun yang akan datang.[22] Tetapi, sampai tahun 1835, petani terus merugi karena tanaman tidak begitu berhasil. Kemungkinan disebabkan karena petani kurang terbiasa dengan tanaman jenis baru ini, di samping akibat musim kemarau panjang yang merusak tembakau.[23]

Antara tahun 1836 dan tahun 1845, tembakau tampaknya menjadi jenis tanaman yang penting—dan wajib ditanam—di bawah sistem Tanam Paksa, selain tanaman 'tiga besar' lainnya: tebu, kopi, dan nila. Jika ekspor tembakau dari hasil pertanian rakyat di luar Tanam Paksa juga diperhitungkan, kenaikan ekspor tembakau dari Jawa pada masa Tanam Paksa bisa dikatakan cukup baik. Sebagai ilustrasi, berikut adalah hasil produksi padi, kopi, gula, tembakau dan kanel di Karesidenan Rembang antara tahun 1841 sampai 1845:[24]

Rembang Tahun 1841-1845 (dalam pikul)

Tahun	Padi	Kopi	Tebu	Tembakau	Kanel
1841	976.575	1.036,5	7.576	5.631	377
1842	941.253	682	9.153	8.596	742
1843	959.647	2.546	10.706	11.589	973
1844	518.559	1.938	5.037	17.390	973
1845	911.811	1.514	-	-	496
Rata-rata	861.569	1.420,5	8.118	10.801,5	712,2

Sumber: TNI, 1849, I. Residentie Rembang in het jaar 1845, Anonim, hal. 410

22 Handayani, op. cit.
23 *"Dulu Sekarang Sami Mawon"*, Faiz Manshur, http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/04/04/kilas-balik-petani-tembakau-kedu/ (diakses tanggal 16 Juli 2011).
24 Handayani, op. cit.

Ekspor tembakau tahun 1830 berjumlah 180.000 gulden, tetapi tahun 1840 telah meningkat menjadi 1.200.000 gulden. Ekspor tembakau mengalami kemunduran setelah tahun 1840, tetapi meningkat lagi secara mantap setelah tahun 1850 sebagai akibat dari kenaikan produksi pertanian pada umumnya.[25]

Bagaimanapun, secara umum, penanaman tembakau di bawah sistem Tanam Paksa pada dasarnya gagal. Tidak hanya gagal, pemberlakuan tanam paksa juga menjangkitkan kebencian masyarakat. Hal-hal yang menyebabkan ketidakpuasan dan kebencian penduduk Rembang terhadap tanaman tembakau gupernemen, misalnya, adalah perluasan yang terlalu cepat dari tanaman itu, serta terhadap penyelewengan-penyelewengan dan keberatan-keberatan sehubungan dengan berdirinya perusahaan perkebunan tembakau.

Sepanjang periode Tanam Paksa, total terdapat 37 kontrak penanaman tembakau gupernemen yang dikeluarkan di seluruh Jawa pada tahun 1862. Pada tahun 1860, tanam paksa tembakau dihapuskan, dan kontrak terakhir habis masa berlakunya pada tahun 1864. Kontrak ini dibuat bersama perusahaan swasta, 18 di antaranya berada di Karesidenan Rembang, dan 8 di Semarang.

Lucunya, di wilayah Sumatera, perkebunan tembakau komersial berorientasi ekspor yang bisa dikatakan berhasil baru dimulai setelah tahun 1863, setelah periode Tanam Paksa berakhir, ketika seorang juragan perkebunan Belanda bernama Jacobus Neinhuys menanam tembakau di Deli, Sumatera Utara. Tembakau Deli dengan segera dikenal sebagai salah satu jenis tembakau terbaik di dunia karena kualitas daunnya, terutama untuk membungkus cerutu. Pada akhir abad 19, tembakau telah menjadi salah satu sumber utama pendapatan pemerintah Hindia Belanda.

Di sisi lain, periode Tanam Paksa, meski pada praktiknya banyak merugikan petani, membawa modernisasi pertanian secara besar-besaran di Hindia Belanda, khususnya Jawa. Pada periode itu, produksi dan areal pertanian menunjukkan kecenderungan hampir terus meningkat.

25 Ibid.

Peningkatan itu terjadi karena adanya pembangunan saluran irigasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Sejak tahun 1870, budidaya tanaman ekspor seperti tebu dan tembakau di Besuki mempunyai andil cukup besar dalam ekspansi irigasi.[26]

Dari paparan fakta di atas, meski bisa dibilang gagal (terutama dalam tujuan meningkatkan ekspor tembakau ke Eropa, yang kalah oleh konkurensi tembakau Amerika), pemberlakuan Tanam Paksa di beberapa wilayah Nusantara telah turut memperluas persebaran tembakau sebagai tanaman perkebunan rakyat, dan sebagai konsekuensinya juga turut meningkatkan konsumsi tembakau di kalangan masyarakat. Untuk melipur kegagalan ini, pemerintah Hindia Belanda kemudian mengarahkan penanaman tembakau di Nusantara untuk konsumsi lokal. Dan tembakau, meskipun bukan tanaman *indigenous* Indonesia, dalam kurun dua abad telah menjadi salah satu produk pertanian Nusantara yang diunggulkan.

Pertanian Tembakau Masakini

Kini, khasanah pertanian dalam negeri tak bisa tidak memperhitungkan sektor perkebunan tembakau. Selain tembakau Besuki (Jember), yang—seperti tembakau Deli—juga dikenal sebagai salah satu bahan cerutu terbaik di dunia, hampir seluruh hasil perkebunan tembakau di Jawa terserap ke pasar domestik, yakni industri kretek. Uniknya, tembakau Jawa nyaris tak bisa diklasifikasikan ke dalam golongan-golongan besar, karena beragam faktor yang memengaruhi kualitas dan karakteristiknya; mulai dari ketinggian lahan, keadaan tanah, cuaca, sampai dengan cara pengelolaan yang diaplikasikan petani—apakah ia menggunakan pestisida dan pupuk kimia, atau memilih kotoran ayam sebagai kompos. Ini menjadikan tembakau Jawa salah satu varietas paling kompleks dan paling sulit dipahami di dunia internasional. Terdapat sekitar seratusan

26 "*Irigasi dan Perkebunan di Karesidenan Besuki 1870-1930*", Marjono, Soegijanto Padmo, Program Studi Sejarah, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Sosiohumanika, 15(1): 2002, diunduh dari http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=6302 (diakses tanggal 17 Juli 2011).

jenis tembakau Jawa, yang masing-masing memiliki karakteristiknya yang khas. Dan ada lebih dari seratus jenis tembakau yang tumbuh di Indonesia, kesemuanya nyaris tak bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan saja, sebab setiap tanaman tembakau akan memunculkan jenis yang berbeda, bergantung dari kondisi tanah dan cuaca lokal di mana ia ditanam. Inilah yang secara signifikan memengaruhi rasa dan aroma masing-masing jenis tembakau. Salah satu tembakau paling legendaris dalam khasanah kretek adalah tembakau Temanggung.

Jika dunia mengenal Vuelta Abajo, dan cerutu Havana terbaik mestilah mengandung tembakau dari daerah ini, maka Indonesia memiliki Temanggung. Temanggung adalah kota kabupaten yang diapit gunung kembar Sindoro-Sumbing di bilangan Jawa Tengah. Di sanalah, terutama di lereng terjal Gunung Sumbing, tembakau terbaik dan paling dicari di Indonesia ditanam. Layaknya Vuelta Abajo, Temanggung menjadi legenda tersendiri bagi industri kretek. Sampai-sampai muncul klaim, kretek terbaik mestilah mengandung tembakau Temanggung. Salah satu jenis tembakau istimewa yang hanya muncul di Temanggung adalah *srinthil.*

'Berkat' periode Tanam Paksa dan kebiasaan merokok yang membudaya, perkebunan tembakau di Indonesia dimiliki dan dikelola oleh banyak petani kecil. Rata-rata mereka hanya memiliki dua hingga tiga hektar lahan tembakau. Ini unik, sebab lazimnya di luar negeri para petani menanam dan mengelola ratusan hektar tembakau. Ini menyebabkan ada begitu banyak kepala yang terlibat dalam matarantai industri kretek dan berbagi penghidupan melalui bisnis tembakau. Belum terhitung mereka yang tidak memiliki lahan pertanian. Tembakau rajangan yang digunakan dalam kretek seluruhnya dipanen, dirajang, dan diproses oleh petani tembakau dan warga yang tinggal di sekitarnya, sebelum dikirim ke perusahaan-perusahaan kretek. Bagi perusahaan kretek besar, memanen dan merajang sendiri tembakau hasil panenan bukan hal sulit, terutama jika efisiensi merupakan pertimbangan yang utama. Bagaimanapun, kebiasaan memanen dan merajang tembakau adalah bagian dari tradisi petani tembakau yang telah menyejarah dan

dipertahankan dalam matarantai industri tembakau sampai sekarang. Itu sebabnya, industri kretek di Indonesia menyerap puluhan juta tenaga kerja, dari hulu hingga ke hilir.

Sementara itu, jika kita membandingkannya dengan cengkeh, salah satu unsur utama kretek yang lain, perjalanan historis rempah indigenous Nusantara ini, di periode yang kurang lebih sama, bisa dibilang sama sekali berbeda dengan tembakau.

Cengkeh: Tanaman Emas Nusantara

The history of spices is the history of trade. –the Economist –[27]

Dalam resensinya mengenai *Max Havelaar, or the Coffee Auctions of the Dutch Trading Company* karya Multatuli, Pram menulis: "bukankah penyebab kolonisasi dunia oleh Eropa adalah pulau-pulau penghasil rempah di Indonesia?"[28] Pernyataan itu bukannya tanpa dasar. Selama berabad-abad, cengkeh dan pala, dua tanaman *indigenous* Indonesia, merupakan jenis rempah-rempah favorit yang diburu dunia. Kesohor-nya cengkeh dan pala telah mendorong Vasco da Gama untuk mencari asal-usulnya hingga ke benua jauh dan pada akhirnya menemukan Hindia Belanda. Adalah cengkeh (*syzygium aromaticum*) pula yang telah mendatangkan kekayaan luar biasa bagi VOC dan Negara Belanda, setelah balatentaranya mengusir Portugis dari bumi Nusantara.

Kendati belum ada kesepakatan dari para ahli botani mengenai asal muasal tanaman ini[29], seorang saudagar Venesia bernama Nicolo Conti mengatakan bahwa cengkeh berasal dari Banda. Pernyataan ini didukung oleh banyak ahli, yang menyatakan bahwa tanaman rempah serupa paku ini berasal dari gugusan Pulau Ternate, Tidore, Roti, Makian, dan Bacan di Kepulauan Maluku. Sedang pohon cengkeh tertua,

27 Hanusz, op. cit., hal. 53.
28 "After all, wasn't the world colonized by Europe because of Indonesia's Spice Islands?"
29 Seorang biarawan Mesir, Cosmos Indocoplantus, menyatakan bahwa cengkeh berasal dari Tiongkok dan Thailand.

konon, ditemukan di Pulau Ternate. Begitu leburnya makna tanaman cengkeh dalam keseharian masyarakat Maluku, sehingga mereka bahkan memiliki ritus tradisi yang terkait dengan cengkeh. Orang Maluku biasa menanam pohon cengkeh untuk menandai kelahiran seorang anak dan merawat pohon itu baik-baik, karena mereka memercayai adanya pertalian psikologis antara pohon cengkeh dengan sang anak. Hingga abad kedelapan belas, Maluku memang menjadi penghasil cengkeh terbesar di dunia.[30]

Ada pula yang mengatakan bahwa rempah-rempah purbakala ini telah dikenal dan digunakan ribuan tahun sebelum Masehi, dan dihargai cukup mahal sejak zaman kerajaan Romawi Kuno. Albert Kusen dalam tulisannya bahkan mengisahkan bahwa petani cengkeh yang tersebar di sebagian besar wilayah pertanian Minahasa, seperti di Kecamatan Sonder dan wilayah Tondano Pante, pernah menikmati kejayaan sebagai penduduk Indonesia dengan pendapatan perkapita tertinggi, bahkan sampai menyamai Swiss, negeri terkaya di Eropa.[31] Meski mahal, rempah ini bertahan sebagai komoditas yang paling diburu karena khasiat dan kegunaannya. Di Barat (Eropa dan Amerika), cengkeh digunakan untuk mengawetkan bahan makanan dan campuran masakan. Sedangkan masyarakat Timur lebih mengenal cengkeh sebagai tanaman obat. Sebagaimana diungkapkan oleh Hanusz, di Cina, cengkeh telah masyhur digunakan untuk berbagai macam kebutuhan pengobatan. Biji cengkeh juga dikembangkan sebagai terapi bagi penyakit jantung, yang oleh masyarakat Barat dianggap sebagai penyebab kematian terbesar.

Karena cengkeh dan pala pulalah, selama masa jabatan tiga gubernur jenderal VOC yang pertama: Pieter Both (1610-1614), Gerard Reynst (1614-1615) dan Dr. Laurens Reael (1615-1619), pusat kegiatan VOC ditempatkan di Benteng Oranje, Ternate. Pemilihan Ternate sebagai markas besar VOC terutama didasarkan pada pertimbangan kedudukan

---

30 "*Kajian Ekonomi Keterkaitan Antara Perkembangan Industri Cengkeh dan Industri Rokok Kretek Nasional*", Grace A.J. Rumagit, IPB, 2007, dari http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/40530/Cover_2007gaj.pdf?sequence=13 (diakses tanggal 17 Juli 2011).

31 *"Cengkeh di Mata Orang-Orang Minahasa"*, http://desaku.blogdetik. com/2010/06/15/%E2%80%9Chabis-batu-bara-kereta-api-tak-bisa-jalan%E2%80%9D-cerita-perokok-perokok-tua-minahasa-2/ diakses tanggal 12 Mei 2011).

strategis Maluku ketika itu, sebagai sentra perniagaan rempah-rempah, dan Ternate sebagai kerajaan Maluku pertama yang memberikan hak monopoli perdagangan rempah-rempah kepada VOC.[32] Hak ini diberikan sebagai tukar guling atas bantuan VOC memerangi Spanyol di Maluku, dan disepakati dalam perjanjian antara Laksamana Matelief de Jonge mewakili VOC dengan Kesultanan Ternate, 29 Maret 1607.

Bagaimanapun, hingga paruh pertama abad ke-17, usaha memaksakan monopoli atas produksi pala, bunga pala, dan cengkeh belum bisa dikatakan berhasil. Bahkan muncul persekutuan lokal untuk menentang VOC, terdiri atas kaum muslim Hitu (Ambon bagian utara) dan pasukan-pasukan Ternate di Hoamoal (Semenanjung Seram bagian barat), dengan dukungan Kerajaan Gowa, bangsa Makassar.

Tahun	Peristiwa Penting
1625	Stelsel Hongi Tocten dimulai, di dalamnya terkandung: 1) penebangan/penghancuran kebun-kebun cengkeh rakyat; 2) kerja paksa; 3) tanam paksa; 4) penyerahan paksa.
1634	Gubernur Gilels menghancurkan perkebunan cengkeh rakyat. Perlawanan rakyat mulai berkobar.
1817	Di bawah pimpinan Philip Latumahina, Anthony Rebak, Said Perintah dan Pattimura alias Thomas Matulessy , rakyat Maluku bangkit mengadakan perlawanan.
1824	Van Der Capellen secara formal menghapus Hongi Tochten.

Tahun Bersejarah di Maluku[33]

Persekutuan anti VOC ini dipimpin oleh Kakiali, seorang Hitu beragama Islam (salah satu murid Sunan Giri di Jawa). Sejak tahun 1633, ia menggantikan ayahnya menjadi *Kapitein Hitoe*, pemimpin masyarakat Hitu di bawah naungan VOC, tetapi penyelundupan cengkeh yang melanggar peraturan-peraturan monopoli VOC semakin

32 Amal, M. Adnan, *Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta: 2010.

33 http://radarambon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=2 (diakses tanggal 15 Juni 2011).

berkembang. Dan sejak tahun 1634, akibat dihancurkannya perkebunan cengkeh milik rakyat, peperangan terus terjadi antara VOC dengan persekutuan ini. Tahun 1643, Kakiali meninggal dunia, tetapi banyak orang Hitu melanjutkan perang melawan VOC dari Kapaha, tempat baru di sebelah utara Hitu. Baru pada Juli tahun 1646, Kapaha akhirnya dapat ditaklukkan oleh VOC, dan pemimpin tahap terakhir perlawanan masyarakat Hitu, Telukabesi, menyerah. Telukabesi dihukum mati di Ambon pada September 1646, dan perlawanan terhadap VOC di Hitu mencapai akhirnya.

Akan tetapi berakhirnya perang tidak berarti fajar baru bagi kolonialis Belanda dan sistem monopoli rempah-rempah yang mereka terapkan di Maluku. Orang-orang Makassar dan Ternate masih tetap giat berdagang rempah dengan melanggar monopoli VOC. Cara untuk menyelesaikan masalah tersebut ditemukan oleh Arnold de Vlaming, gubernur Ambon (1647-1650), dan Outshoorn, Inspektur atas Ambon, Banda, dan Ternate (1652-1656). Pada tahun 1650, raja Ternate, Mandarsyah, telah diturunkan dari tahta dalam suatu kudeta istana. Mandarsyah melarikan diri lalu meminta bantuan VOC. De Vlaming, melihat kesempatan menghadapi kelebihan produksi cengkeh, lalu membawa Mandarsyah ke Batavia, guna menandatangani sebuah perjanjian yang melarang penanaman pohon cengkeh di semua wilayah terkecuali Ambon atau daerah lain yang dikuasai VOC. Pada saat itu (Januari 1652), Ambon mampu menghasilkan cengkeh dalam jumlah yang lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk konsumsi seluruh dunia, sehingga tujuan VOC bukanlah semata-mata untuk memonopoli, melainkan juga membinasakan tanaman cengkeh di tempat-tempat lain.

Selanjutnya, de Vlaming melawan orang-orang Ternate yang melakukan perlawanan dan berpangkalan di Hoamoal. Perang berlangsung dari tahun 1652 sampai 1658 di sekitar Hoamoal, berakhir dengan kemenangan VOC. Tahun 1656, penduduk yang masih tersisa di Hoamoal dibuang ke Ambon dan semua tanaman rempah di Hoamoal dimusnahkan. Tahun 1663, Spanyol menyerahkan sisa-sisa pos mereka di Ternate dan Tidore, dan tahun 1667 Tidore secara resmi

mengakui kekuasaan VOC. Pihak VOC kini menjaga dengan hati-hati ditaatinya persetujuan-persetujuan yang melarang penanaman pohon cengkeh di luar daerah-daerah miliknya. Pasca periode itu, monopoli VOC dalam perdagangan cengkeh menjadi lebih aman, walaupun masih terjadi penyelundupan pada tingkat yang lebih kecil, salah satunya dari Makassar.

18 November 1667, dibantu oleh Arung Palakka dan orang-orang Bugis di Bone dan Soppeng sebagai sekutu, VOC berhasil memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani Perjanjian Bongaya. Peperangan terus terjadi sampai tahun 1669, ketika kekuasaan Gowa di Makassar akhirnya runtuh dan diambil alih oleh Bone sebagai negara terbesar di Sulawesi Selatan. Keruntuhan ini melepaskan kekuasaan Makassar atas Minahasa, Butung, dan Sumbawa, dan pedagang-pedagang Eropa selain VOC segera diusir dari sana. Setelah tahun 1677, VOC juga menancapkan kekuasaan di Gorontalo, Limboto, negara-negara kecil Minahasa lainnya, serta Pulau Talaud dan Sangihe.

Setelah tunduknya Sulawesi Selatan dan sekitarnya kepada VOC, dapat dikatakan hampir tak ada lagi kekuatan besar yang mengancam monopoli rempah-rempah oleh VOC di wilayah Indonesia Timur. Tanaman rempah-rempah yang tidak dapat diawasi oleh VOC telah ditebangi, tak ada lagi penduduk yang tinggal di Hoamoal, dan tujuan VOC untuk memonopoli rempah-rempah Maluku hampir tercapai. Di bawah Gubernur Jenderal Mattheus de Haan (1725–1729) dan kemudian dilanjutkan oleh Diederik Durven (1729–dipecat tahun 1732) dilakukan *extirpartie* secara besar-besaran, guna menjaga agar harga rempah-rempah tetap tinggi. Untuk melaksanakan *extirpartie* tersebut, setiap tahun VOC melakukan pelayaran hongi atau “Hongi tochten”, yaitu armada yang terdiri dari sejumlah kora-kora, kapal tradisional Ternate-Tidore.[34]

34 Menurut catatan statistik Kompeni, sebagai hasil *extirpatie* dari pelayaran Hongi yang hanya berlangsung satu tahun, yaitu dari 10 Desember 1728 sampai 17 Desember 1729, telah dimusnahkan lebih dari 96.000 pohon dan dari 14 Juli 1731 sampai 27 Juli 1732 telah habis dimusnahkan 117.000 pohon rempah-rempah di Pulau-Pulau Makian, Moti, Weda, Maba dan Ternate, sebagaimana tertulis dalam Sejarah VOC di Indonesia, http://www.scribd.com/doc/13353992/Sejarah-VOC-di-Indonesia (diakses tanggal 20 Juni 2011).

Ironisnya, justru ketika penguasaan atas rempah-rempah itu menjadi semakin pasti, semakin lama rempah-rempah menjadi semakin kurang menguntungkan bagi VOC. Alasannya antara lain: pertama, memang tidak mudah menggantungkan keuntungan dari perdagangan rempah, karena kolonialis Belanda kesulitan meramalkan permintaan, penawaran, dan harga secara tepat (karena itulah acapkali terjadi perubahan besar dalam kebijakan ketika pohon ditanam, kemudian ditebangi, sesudah itu ditanami lagi dalam usaha mendapatkan jumlah yang tepat). Kedua, pada tahun 1700 barang dagangan yang paling penting adalah tekstil, sementara di abad XVIII kopi dan teh-lah yang menjadi barang perdagangan penting.

Bagaimanapun, selama hampir dua abad, perdagangan cengkeh dunia dikuasai oleh VOC atas pendudukannya terhadap Maluku dan sekitarnya. Sebelum seorang penjelajah Perancis, Pierre Poivre, berhasil 'mencuri' bibit cengkeh dan pala dari Kepulauan Maluku, menanamnya di tanah jajahan Perancis (di antaranya adalah Kepulauan Zanzibar), dan pada akhirnya membuat The French East India Company berhasil menggeser kedudukan VOC yang sebelumnya tak terkalahkan: penguasaan atas perdagangan cengkeh dunia. Pada akhirnya sekaligus juga menjatuhkan organisasi dagang Belanda ini ke jurang kebangkrutan.

Di Hindia Belanda, cengkeh bertahan sebagai tanaman lokal Maluku hingga tahun 1798, tiga tahun setelah hegemoni VOC atas persediaan cengkeh dunia runtuh. Baru ketika Inggris menjajah Bengkulu, budidaya cengkeh di luar Kepulauan Maluku mulai dilakukan.

Agaknya, bukan sesuatu yang berlebihan jika Pram lantas berpendapat bahwa penyebab kolonisasi dunia oleh Eropa adalah pulau-pulau penghasil rempah di Indonesia. Rempah-rempah *indigenous* Nusantara berarti pula kekayaan luar biasa bagi negara Eropa yang menguasainya. Kolonisasi, pada saat itu, seolah menjadi pintu masuk sekaligus satu-satunya jalan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Apalagi, sumbernya adalah gugusan pulau 'tak bertuan' di timur Nusantara.

Perdagangan cengkeh Indonesia mengalami masa surut ketika pada

pertengahan abad XIX, pemerintah Belanda mengambil alih pendudukan atas Nusantara dari tangan VOC, dan memberlakukan tanam paksa. Salah satu contohnya adalah Minahasa tahun 1850-an, di mana menurut catatan Roderick C. Wahr, penduduknya dipaksa menanam kopi secara massal, kemudian dibeli dengan harga yang sangat murah.

Monopoli Cengkeh dan Penanaman Paksa

Lain Jawa, lain di Minahasa, berbeda pula kisah cengkeh di Ambon-Lease. Di bawah monopoli pemerintah Hindia Belanda, penanaman cengkeh, yang sejak awal abad ke-16 merupakan kegiatan yang disukai oleh penduduk Ambon-Lease secara turun temurun, berubah menjadi kegiatan yang memberatkan mereka karena berbagai peraturan dan larangan yang harus dipatuhi. Semenjak sistem penanaman paksa dan monopoli cengkeh diterapkan di abad XVII, daerah Ambon, Saparua, Haruku, dan Nusalaut ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai wilayah yang wajib menanam cengkeh. Setiap daerah penanam cengkeh itu terdiri dari beberapa negeri yang masing-masing dikepalai oleh seorang *kepala negeri*. Setiap negeri terdiri dari beberapa kelompok genealogis yang disebut *dati*. *Dati-dati* itulah yang dipakai sebagai alat organisasi dan sekaligus alat produksi dalam pelaksanaan tanam paksa cengkeh.

Sejak diterapkannya sistem tanam paksa dan monopoli cengkeh di Ambon-Lease, penduduk di daerah itu harus mematuhi berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Salah satu aturannya adalah bahwa setiap keluarga diwajibkan menanam 40 pohon cengkeh di kebun cengkeh dan dianjurkan menanam tidak lebih dari 50 pohon di dusun cengkeh. Penduduk juga diharuskan menyerahkan seluruh hasil panen cengkeh mereka kepada pemerintah Hindia Belanda dengan harga yang telah ditetapkan.

Aturan yang lain adalah seluruh hasil panen cengkeh, setelah dibersihkan dan dikeringkan di bawah sinar matahari, harus dibawa ke

gudang cengkeh milik pemerintah Hindia Belanda yang terdapat hampir di setiap *afdeling*. Pengangkutan cengkeh ke gudang-gudang tersebut adalah atas tanggungan penduduk. Ini biasanya dilakukan dengan cara memikul hasil panenan cengkeh melalui jalan darat atau membawanya dengan perahu. Apabila hasil panen sudah terkumpul semua, maka selanjutnya cengkeh-cengkeh tersebut diangkut ke kota Ambon atau langsung dikapalkan ke Jawa (bagi cengkeh yang terkumpul di Saparua dan Haruku), untuk kemudian diekspor ke Eropa.

Pada saat pengumpulan cengkeh di gudang, dilakukan pencatatan nama pemilik dan jumlah cengkeh yang diserahkan, serta jumlah uang yang dibayarkan kepada pemilik cengkeh tersebut. Pada saat pembayaran cengkeh itulah pemerintah menarik berbagai macam pajak dengan jalan memotong harga pembelian cengkeh. Jumlah uang yang akan diserahkan kepada pemilik cengkeh sudah dipotong sebesar sekitar 20% untuk kepentingan para kepala bumiputra, yakni untuk *cultuurprocenten*.

Dengan adanya *cultuurprocent* dan stimulus lain seperti perubahan gelar (kenaikan pangkat), maka para *kepala negeri* cenderung menekan penduduk agar dapat menghasilkan panen cengkeh yang melimpah, antara lain dengan jalan memperbanyak penanaman dan mengintensifkan pemeliharaan pohon-pohon cengkeh.

Belum lagi, uang hasil penyerahan cengkeh tidak selalu langsung bisa diterima oleh penduduk, karena pemerintah kolonial hanya mau membayar bila seluruh cengkeh sudah dipanen dan diserahkan. Untuk menikmati uang hasil jerih payah mereka, kadang penduduk harus menunggu berbulan-bulan karena panen cengkeh baru selesai seluruhnya dalam waktu kurang lebih tiga bulan. Cara pembayaran yang merugikan tersebut membuat penduduk secara sembunyi-sembunyi menjual cengkeh mereka kepada para pedagang (biasanya Cina atau Arab) dengan harga yang sangat rendah. Meskipun cengkeh mereka dibeli dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang dipatok oleh pemerintah kolonialis Belanda, penduduk lebih suka bertransaksi dengan para pedagang Cina atau Arab ini, sebab dengan demikian mereka akan langsung mendapatkan pembayaran atas hasil panen, atau

mendapatkan barang yang mereka butuhkan sebagai barternya. Nanti-nya, para pedagang Cina atau Arab ini akan menjual cengkeh mereka kepada pemerintah Belanda sesuai harga yang dipatok kolonialis, atau memperdagangkannya ke pihak lain. Artinya, kolonialis Belanda se-sungguhnya tidak mengalami kerugian yang signifikan, kecuali bahwa telah terjadi kecurangan dalam sistem monopoli perdagangan cengkeh yang mereka terapkan.

Kenyataan yang muncul karena ketidakpuasan terhadap cara pem-bayaran dari pemerintah telah mendorong pemerintah kolonial untuk mengubah cara pembayaran cengkeh yang selama ini diterapkan. Tahun 1857 pemerintah kolonial Belanda berencana mengubah cara pembayaran cengkeh supaya penduduk lebih tertarik dan tetap mengem-bangkan tanaman cengkeh. Cara baru ini adalah pembayaran akan langsung diterima oleh penduduk, untuk penyerahan cengkeh minimal seberat 1 pon.

Tabel berikut menunjukkan hasil produksi cengkeh penduduk selama 10 tahun terakhir, sebelum dihapuskannya sistem Tanam Paksa dan monopoli cengkeh di Ambon-Lease.

Hasil produksi cengkeh dan penghasilan penduduk pada tahun 1855-1864

Tahun	Jumlah *Dati*	Jumlah Jiwa	Jumlah Produksi (pon)	Harga beli gubernemen (per pon)	Jumlah penghasilan penduduk (gulden)
1855	-	-	29.205	30 sen	8.761,50
1856	-	-	617.250	30 sen	185.175
1857	-	-	187.093	30 sen	56.127,90
1858	2.758	39.033	233.818	24 sen	56.044,32
1859	-	-	390.888	24 sen	93.813,12
1860	-	-	258.117	24 sen	61.948,08
1861	-	-	417.323	24 sen	100.157,52
1862	-	-	85.124	24 sen	20.429,76
1863	-	-	946.653	24 sen	227.196,72
1864	-	-	-	-	-

Sumber:

- Koloniaal Verslag 1855-1864.
- Koleksi arsip De Vriese no. 14; Reisverslag van zijn bevindingen in de residentie. Amboina (December 1859 – februari 1860)[35]

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi harga cengkeh dari Ambon-Lease di pasaran Eropa pada pertengahan kedua Abad XIX mengalami fluktuasi dan kemudian bahkan merosot terus. Munculnya cengkeh Zanzibar yang kemudian mendominasi pasaran Eropa ternyata merupakan saingan sangat berat bagi produksi cengkeh Ambon-Lease. Harga cengkeh Ambon-Lease merosot terus karena konsumen di Eropa lebih suka membeli cengkeh Zanzibar yang konon tidak terlalu banyak mengandung minyak. Tabel berikut memperlihatkan situasi harga cengkeh Ambon-Lease untuk pasaran Eropa:

35 "*Perubahan Pola Agraris di Ambon-Lease dari Pola Monokultur menjadi Multikultur, 1855-1890*", Endang Susilowati, UI, 1988, dari: http://eprints.lib.ui.ac.id/13413/1/83087-T9039-Perubahan%20pola.-TOC.pdf (diakses tanggal 18 Juli 2011).

Harga cengkeh Ambon-Lease di pasaran Eropa pada tahun 1852-1862

Tahun	Harga per pon	Tahun	Harga per pon
1852	41 sen	1858	24 sen
1853	47 sen	1859	24 sen
1854	38 sen	1860	24 sen
1855	41 sen	1861	20 sen
1856	33 sen	1862	22 sen
1857	31 sen		

Sumber: Beknopte memorie overgegeven aan den benoemden Gouverneur der Moluksche eilanden H.M. Andrie Wiltens door den Assintenr Residen P. van der Crab waarnemende het bestuur. (Jakarta: ANRI)[36]

Situasi harga jual yang terus menurun seperti terlihat pada tabel di atas adalah salah satu hal yang mendorong rencana penghapusan tanam paksa dan monopoli cengkeh.

Rencana penghapusan kedua sistem itu sebenarnya sudah cukup lama dibicarakan di kalangan gubernemen, yaitu sejak gubernur Maluku C.F. Goldman memerintah, antara tahun 1850-1860. Namun pelaksanaan penghapusan Tanam Paksa dan monopoli cengkeh baru terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Andrie Wiltens (pengganti Goldman). Penghapusan kedua sistem tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1864.

Tanaman cengkeh memang bukan satu-satunya sumber mata pencaharian bagi penduduk, tetapi sudah sejak beberapa abad sebelum pemerintah Hindia Belanda memberlakukan sistem monopoli, produksi cengkeh merupakan salah satu sumber penghasilan utama secara turun temurun. Bahkan selama diberlakukannya sistem monopoli, cengkeh tetap merupakan andalan untuk memperoleh uang. Selama sistem monopoli sampai Tanam Paksa berlangsung (kurang lebih dua setengah abad lamanya), pendapatan penduduk dalam bentuk uang dapat dikatakan tergantung pada hasil produksi cengkeh. Ketika kedua sistem ini dihapus, agar penduduk tetap dapat membayar pajak,

36 Ibid.

pemerintah kolonial Belanda kemudian mengubah pola pertanian yang semula bersifat monokultur (hanya cengkeh) menjadi multikultur dengan berbagai jenis tanaman ekspor antara lain coklat, kopi, dan pala. Sementara itu penduduk tetap diberi kesempatan untuk menjual hasil produksinya, baik berupa cengkeh (sampai tahun 1868), coklat, kopi, dan pala, maupun produk-produk ekspor lainnya, kepada pemerintah Hindia Belanda. Dengan jalan demikian, penduduk diharapkan masih bisa membayar pajak.

Monopoli dan Tanam Paksa cengkeh di Ambon-Lease berakhir tahun 1863. Tetapi sampai dengan tahun 1868, pemerintah Hindia Belanda masih bersedia membeli cengkeh hasil produksi Ambon-Lease, dengan harga 24 sen per pon.

Akibat langsung yang dapat dilihat dari penghapusan sistem tanam paksa cengkeh, karena penduduk belum tahu pasti apa yang akan mereka lakukan agar tetap memiliki pendapatan dalam bentuk uang, adalah diabaikannya perawatan dan pengembangan tanaman cengkeh. Bahkan di beberapa *afdeling* diberitakan bahwa penduduk menebangi pohon-pohon cengkeh mereka karena khawatir suatu saat nanti pemerintah kolonial akan kembali memberlakukan sistem tanam paksa cengkeh. Sebagai akibat kurangnya perawatan dan penanaman pohon cengkeh, jumlah hasil produksi cengkeh menjadi sangat berkurang. Himbauan pemerintah Hindia Belanda agar penduduk tidak meninggalkan tanaman cengkeh begitu saja rupanya tidak begitu digubris. Semenjak tanam paksa dan monopoli cengkeh dihapus, jumlah pohon cengkeh dari tahun ke tahun makin berkurang, yaitu dari 442.023 pohon pada tahun 1865 menjadi 279.000 pohon pada 1878. Baru ketika harga cengkeh di pasaran mulai menunjukkan tanda-tanda kenaikan kembali dan tampaknya memang akan terus meningkat, penduduk mulai tampak kembali berusaha mengembangkan tanaman cengkeh. Untuk pertama kalinya, tahun 1886, 23 tahun setelah sistem Tanam Paksa dihapus, diberitakan bahwa jumlah tanaman cengkeh di Ambon-Lease bertambah sebanyak 13.000 pohon, sedangkan pada tahun berikutnya bertambah sekitar 5811 pohon. Sementara itu pada tahun 1888 jumlah

pohon cengkeh di *afdeling* Ambon bertambah, yaitu dari 139.740 pohon menjadi 144.442 pohon, sedangkan di *afdeling* Saparua dari 206.297 pohon menjadi 214.839 pohon. Perluasan tanaman cengkeh, walaupun sedikit demi sedikit, dapat dikatakan sudah cukup berarti.[37]

Kenaikan ini layaknya dapat dikaitkan dengan munculnya rokok asli Indonesia yang merupakan percampuran antara tembakau dan cengkeh, dan mula-mula ditemukan (dan dengan segera menjadi produk yang populer) di Jawa: kretek.

Rokok Asli Indonesia

"Orang-orang Indonesia pada masa itu (sekira tahun 1624—pen.) mempunyai suatu kebiasaan untuk menggulung rokoknya sendiri, dengan cara yang amat sederhana susunan maupun bentuknya. Oleh sebab itu rokok bagi penduduk asli di Indonesia di zaman itu belum merupakan barang dagangan yang menarik. Sesudah adanya usaha untuk mencampur tembakau dengan berbagai rempah-rempah seperti cengkeh misalnya, atau damar dan akar-akar wangi, bentuk kesederhanaan rokok itu mulai beralih ke arah barang dagangan yang lebih berarti dan menguntungkan."[38]

Sejak kebiasaan mengonsumsi rokok mula-mula diperkenalkan oleh orang Belanda, diikuti pembesar di lingkungan kerajaan, dan akhirnya menular ke masyarakat awam hingga saat ini, terdapat bermacam jenis rokok asli Indonesia hasil kreativitas rakyat jelata untuk menikmati tembakau dengan caranya yang khas. Selain kretek, sebutlah beberapa di antaranya: rokok diko, klembak menyan, kelobot, rokok kawung, dan ico dari Bugis.

37 Susilowati (1998), op. cit.
38 Solichin Salam, *Kudus dan Sejarah Rokok Kretek,* dalam J.A. Noertjahyo, "Sigaret Kretek, Tonggak Bangsa", http://heritageofjava.com/portal/article.php?story=20090326214811510 (diakses tanggal 12 Mei 2011).

Rokok diko adalah hasil temuan seorang mantri keraton Sala, Mas Ngabehi Irodiko (dari sanalah nama rokok ini berasal), dan merupakan kembangan dari rokok klembak menyan. Rokok ini dibungkus dengan daun nipah, berisi tembakau yang dicampur dengan berbagai macam bahan (di kalangan masyarakat Jawa disebut dengan *wur* atau *uwur)* seperti klembak, kemenyan, kemukus, kayu manis, pala, adas, pulosari, pucuk, cendana, ganti, tegari, mesoyi, waron, klabet, dupa, dll.

Seturut penuturan Van der Reijden, Mas Ngabehi pertama kali membuat rokok hasil temuannya ini tahun 1890, kira-kira sedasawarsa setelah Djamhari menemukan kretek. Sebelum tahun ini, para pemerhati secara mutlak belum bisa menyatakan adanya industri rokok di wilayah kerajaan Surakarta, oleh karena 'rokok nipah' yang umum dipakai orang pada waktu itu hanya dilinting sendiri oleh para pemakainya. Akan tetapi, setelah 'rokok *wangen'* ciptaan Mas Ngabehi Irodiko ini berhasil menarik perhatian masyarakat ramai, dan karena pembuatan bahan campuran tembakaunya bagi para konsumen yang biasa melinting sendiri nampaknya tidak mudah, dalam tempo singkat muncullah kerajinan rumah tangga dalam pembuatan 'rokok diko'. Produksi rumah tangga ini kelak ternyata berkembang dan meluas ke berbagai daerah lain di wilayah Surakarta, bahkan juga belakangan terjumpai di sebagian besar wilayah kerajaan Yogyakarta.

Dibanding jenis rokok-rokok asli Indonesia lainnya, rokok diko memang muncul belakangan. Yang paling 'tua' adalah kelobot. Menikmati tembakau dengan *kelobot* atau daun jagung yang dikeringkan, seperti disebutkan dalam catatan J.W. Winter maupun tersurat dalam *Serat Centhini*, sudah awam terlihat antara tahun 1824 dan 1825, dan diperkirakan bahkan telah dimulai pada pertengahan abad XVII. Rokok kelobot merupakan jenis rokok yang umum dinikmati di kalangan masyarakat Jawa dan berbagai suku bangsa di luar Jawa dan Madura pada abad ke-19, sekalipun bahan pembungkus yang dipakai untuk membuatnya bisa berbagai macam, tidak hanya berupa "kelobot" saja (di Papua misalnya, orang-orang kerdil Tapiro menggunakan daun pandan, dan di beberapa tempat lain di Irian, tembakau dibungkus

dengan daun pisang, Hibiscus, atau daun-daun lainnya). Ini juga terjumpai di kalangan masyarakat Jawa sendiri. Dalam karangannya "Geneeskundige Topographie van Samarang" bagian I, yang dimuat dalam majalah *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie* tahun 1848, Dr. P. Bleeker menyebutkan penggunaan daun pandan di samping "kelobot" sebagai bahan pembungkus rokok di kalangan penduduk kota Semarang pada masa itu. Isi tembakaunya sangat sedikit. Sekalipun demikian, "rokok kelobot" semacam ini bisa diisap hampir lima menit.[39]

Lebih setengah abad kemudian, baru kretek atau rokok cengkeh ditemukan oleh Djamhari, diikuti dengan rokok diko ciptaan Mas Ngabehi Irodiko, dan rokok kawung di Jawa Barat. Rokok kawung dibuat dengan pembungkus daun kawung (di kalangan masyarakat Jawa, pohon kawung dikenal dengan nama pohon aren). Penemunya adalah seorang Tionghoa penduduk Bandung, yang untuk pertama kalinya membuat rokok kawung di tahun 1905. Pasaran rokok di daerah Jawa Barat (belakangan bahkan juga meluas ke Jakarta, Cirebon, dan Sumatera) mula-mula didominasi oleh jenis rokok ini. Rokok kawung sebenarnya tidak menggunakan campuran cengkeh, tetapi beberapa modifikasi yang muncul di Ciledug Wetan, dan Cilimus sudah menggunakan gilingan cengkeh.

Sedangkan klembak menyan adalah racikan tembakau dengan akar klembak, tumbuhan obat yang berfungsi sebagai laksatif (menenangkan), dengan kemenyan, wewangian yang bernuansa magis. Selain sebagai campuran rokok, akar klembak atau *Chinese rhubarb* ini digunakan pula sebagai campuran jamu. Rokok "klembak menyan" populer di kalangan masyarakat menengah ke bawah di Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan pabriknya banyak ditemukan di Purworejo, Jawa Tengah. Sampai sekarang, rokok klembak menyan masih disukai oleh masyarakat Kabupaten Purworejo, Kebumen dan Banyumas. Tiga wilayah tersebut merupakan basis konsumen rokok klembak menyan meski dengan selera yang berbeda-beda.

---

39 Budiman, Onghokham, op. cit., hal 88.

Yang muncul paling belakangan adalah rokok ico, rokok khas Bugis, Sulawesi Selatan. Ico mula-mula berupa gulungan tembakau kering, sebelum Haji Palerei mencampur ico dengan saus gula merah (yang saat itu masih diproduksi oleh banyak pembuat gula dari pohon aren) dan membakarnya di dalam bambu (*timpo*). Cara menikmati tembakau hasil kreativitas Haji Palerei ini dibuat di Wanua Barae pada 1970.

Tetapi di antara sekian rokok asli khasanah Nusantara, yang hingga kini masih bertahan dan berkibar menjadi penguasa di negeri sendiri adalah kretek, rokok cengkeh dari Kudus yang legendaris.

Sejarah Kretek, Peralihan Budaya

Ketimbang tembakau lintingan yang belakangan dikenal dengan sebutan kretek, masyarakat Nusantara mengenal sirih pinang lebih dulu. Belum diketahui kapan sesungguhnya tradisi mengunyah sirih pinang dimulai di Indonesia. Namun, berita akurat tertua mengenai pemakaian buah pinang dan sirih baru muncul pada tahun 1346-1347, diberikan oleh seorang musafir Arab terkenal bernama Ibnu Batuta. Ketika mengunjungi kerajaan Samudra di Sumatera Utara, ia menyaksikan upacara perkawinan putra Raja Samudra, Sultan Malik Al-Zahir. “Dalam upacara perkawinan ini mempelai laki-laki dan perempuan telah duduk di sebuah tempat yang ditinggikan. Mempelai laki-laki kemudian bangkit berdiri, mencium kaki ayahnya. Selanjutnya mempelai perempuan datang menghampiri suaminya, mencium tangannya. Setelah itu,

…keduanya saling menyuapkan buah pinang dan selembar daun sirih ke mulut mereka masing-masing. Suatu adat resam yang hinga sekarang juga masih terjumpai di kalangan masyarakat Melayu di Sumatera, dikenal dengan istilah ‘pinang-meminang’.”[40]

Menginang memang menjadi bagian kebudayaan Nusantara dan merupakan jenis narkose yang paling digemari, sebelum Belanda memperkenalkan jenis tembakau lintingan dan berbagai produk

40 Budiman, Onghokham, op. cit., hal. 77.

modernisasi Barat lainnya di Indonesia.[41] Boleh dibilang menginang merupakan cikal bakal perkenalan orang Indonesia dengan kretek. Terutama ketika tradisi ini, di kemudian hari, disertai dengan penggunaan kapur (*injet*), gambir, dan tembakau. Apalagi, dari segi unsur pendukungnya, bahan-bahan dasar untuk menginang bisa dibilang sama persis dengan apa yang terkandung dalam kretek.[42]

Tembakau untuk campuran sirih pinang dikenal dengan nama "tembakau sugi". Orang-orang Jawa menyebutnya *mbako susur.* Campuran tembakau digunakan dalam tradisi menginang untuk menapis air liur. Dengan segumpal tembakau sugi, air ludah yang merah warnanya karena telah bercampur dengan kunyahan buah pinang dan sirih bisa terserap.

Betapapun, kehadiran tembakau nampak jelas membawa dua dampak yang saling bertolak belakang terhadap kebiasaan makan sirih. Pada satu pihak bisa melengkapi dan menambah kenikmatan mereka yang mempunya kegemaran makan sirih, namun pada pihak lain justru membawa efek yang sangat merugikan, oleh karena di belakang hari telah muncul sebagai rekan tandingan dalam bentuk rokok. Banyak orang lelaki yang sebelumnya terbiasa makan sirih, telah menyeberang menjadi perokok yang setia atau melakukan keduanya. Konkurensi ini mencapai puncaknya pada awal abad ke-XX, di mana makan sirih telah terdesak sama sekali oleh merokok. Padahal, seabad sebelumnya telah berhasil menjadi kebiasaan yang umum di kalangan wanita Belanda di tanah air kita, sebagaimana dipaparkan oleh sejarawan Belanda terkenal Dr. H.J. De Graaf dalam karangannya *"Het sirih-genot bij de westerlingen"*.[43] Monika Arnez dalam makalahnya mengungkapkan hal serupa. *"Both women and men throughout Indonesia used it as an additive to the betel squid* (Columbijn, Columbijn, & Columbijn, 2001, p. 53)."[44]

Sementara itu, meski sigaret asal Barat pertama baru diimpor

41 "In South-East Asia and Melanesia chewing betel was a wide spread practice for thousands of years. According to Louis Lewin (1931) betel was the widest spread narcotic in the history of mankind." (Arnez, op. cit., hal. 50).

42 Hanusz, op. cit., hal 90.

43 Budiman, Onghokham, op. cit., hal. 79-80.

44 Arnez, op. cit., hal 52.

ke Batavia di tahun 1845, penggunaan tembakau dalam bentuk *indigenous* maupun menggunakan pipa sesungguhnya telah bermula di pertengahan abad 17. Sigaret ala pribumi ini biasanya berupa rajangan tembakau yang dibungkus daun jagung kering, daun pisang, atau daun palem. Sebutan pribumi Hindia untuk rokok jenis ini adalah kelobot, sementara orang Belanda menyebutnya *strootje*. Baru pada era Politik Etis, masyarakat Nusantara mengenal sigaret yang dibungkus kertas. Terutama setelah the British American Tobacco (BAT), seperti ditunjukkan oleh Budiman dan Onghokham (1987, hal. 173), membuka pabrik pertamanya di Cirebon tahun 1924[45]. Diasumsikan, dari sanalah muncul sebutan 'rokok putih' untuk menamai rokok konvensional yang berasal dari Barat: yakni rokok milik kaum kulit putih atau rokok yang dibungkus dengan kertas putih.

Menilik sejarah yang demikian, ihwal ditemukannya kretek di Jawa, meminjam istilah Denys Lombard, pantaslah disebut sebagai osmosis kebudayaan.[46] Ketika orang Belanda memperkenalkan kebiasaan mengisap rokok kepada masyarakat bumiputera, kebiasaan itu lantas diadaptasi dengan menciptakan sigaret pribumi: kelobot, yang terbungkus daun jagung, palem, atau daun pisang kering. Kebiasaan ini tidak dilarang oleh para penguasa Belanda, sebab menurut Prof. PM Laksono, tembakau merupakan jenis narkose yang mampu membuat rakyat melupakan 'rasa penderitaan', dan efeknya membuat mereka, yang juga terdiri dari para buruh, lebih giat bekerja.[47] Tembakau sendiri, pada masa itu, jelas bukan komoditas yang sulit diakses. Dengan kreativitasnya, masyarakat bumiputera 'mengakali' keadaan ekonomi yang serbaterbatas, dan muncullah kelobot. Kemampuan memadupadankan budaya yang datang dari luar dengan keadaan dan persepsi masyarakat sendiri inilah yang mesti diapresiasi sebagai proses osmosis, di mana masyarakat yang menghasilkan kreasi tersebut dan hasil kreasinya sendiri merupakan karakteristik Nusantara yang unik

45 Ibid.
46 *"Kretek sebagai Kritik Kebudayaan"*, Waskitogiri Sasongko, http://komunitaskretek.or.id/artikel-22-kretek-sebagai-kritik-kebudayaan.html (diakses tanggal 12 Mei 2011).
47 Wawancara dengan Prof. PM Laksono, Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP) UGM, 17 Februari 2011.

dan khas. Dengan sendirinya, pelaku osmosis kebudayaan dan produk budayanya adalah anak kandung bumi pertiwi yang pantas dihormati.

Kelak, adalah kreativitas kaum pribumi pulalah yang secara intuitif menciptakan kretek, dengan membubuhkan serpihan cengkeh ke dalam sigaret. Pribumi itu bernama Haji Djamhari.

Penemuan Kretek: Misteri Djamhari

"Pada awal mulanya, penduduk Kudus menyebut jenis rokok baru hasil penemuan Haji Jamahri ini 'rokok cengkeh'. Akan tetapi, oleh karena jika dihisap rokok ini menimbulkan bunyi 'kretek-kretek' seperti bunyi daun dibakar (dalam bahasa Jawa disebut 'kumretek'), sebagai akibat pemakaian rajangan cengkeh untuk campuran tembakau isinya, jenis rokok ini akhirnya disebut orang 'rokok kretek'."[48]

Jika kretek identik dengan sebuah kota di sebelah utara Semarang: Kudus, penyebabnya bukan hanya karena sebagian raja kretek yang kini dikenal luas di Indonesia membangun dan mengembangkan industrinya di sana. Tak pelak, sejumlah nama besar yang menguasai pasar kretek seperti Nojorono, Djambu Bol, dan Djarum memang lahir dan berkembang di Kudus. Bagaimanapun, sesungguhnya secara historis kretek memang tak bisa dilepaskan dari Kudus. Sebab di kota inilah industri rumahan kretek dimulai. Bahkan faktanya, kretek sebagai produk kebudayaan sendiri diciptakan di kota Kudus.

Ada beberapa pendapat mengenai siapa yang mula-mula menciptakan kretek. Tetapi yang paling populer adalah kisah tentang seorang pribumi muslim Kudus bernama Hadji Djamhari. Kisah tentang Hadji Djamhari dan kretek sendiri tak ubahnya kumpulan keping-keping pazel yang dituturkan kembali secara terpisah-pisah oleh penduduk Kudus, tetapi secara garis besar, riwayatnya bermula dari sakit dada yang diderita

48 Budiman, Onghokham, op. cit., hal. 106.

Hadji Djamhari. Demikian diceritakan oleh Budiman dan Onghokham dalam bukunya:

"Pada suatu waktu Hadji Djamhari menderita penyakit dada. Penyakit ini telah lama diidap olehnya. Ia benar-benar sangat menderita, setiap kali serangan sesak napasnya datang. Untuk mengobati penyakitnya yang telah lama merana ini ia mencoba memakai minyak cengkeh, digosokkan di bagian dada dan punggungnya. Ternyata, ia merasa mengalami kebaikan, sekalipun belum sembuh sama sekali. Selanjutnya ia mencoba mengunyah cengkeh. Hasilnya jauh lebih baik, hingga kemudian terlintas dalam pikirannya untuk memakai rempah-rempah ini sebagai obat. Adapun caranya, sangat sederhana sekali. Cengkeh ini dirajang halus-halus, kemudian dicampurkan pada tembakau yang dipakainya untuk merokok. Dengan cara ini ia bisa menghisap asapnya sampai masuk ke dalam paru-parunya.

Hasilnya benar-benar di luar dugaan. Penyakit dadanya menjadi sembuh. Cara pengobatan ini dengan cepat telah terkenal di seluruh daerah sekitar tempat tinggalnya. Teman-teman dan handai taulannya beramai-ramai meminta rokok mujarab yang dihisapnya. Mereka ternyata merasakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Karena demikian banyaknya permintaan, Hadji Djamhari terpaksa membuatnya dalam jumlah yang melimpah ruah."

Seperti dinyatakan oleh Hanusz, minyak cengkeh memang telah lama dikenal sebagai penghilang rasa sakit. Sementara ini memang belum ditemukan literatur yang menerangkan penyakit yang diderita oleh Hadji Djamhari, apakah asma atau penyakit jantung, namun tembakau sendiri disebut-sebut memiliki manfaat untuk melonggarkan pernapasan. Menariknya, di masa itu, kretek bahkan dijual di toko-toko obat, karena dianggap lebih memiliki kualitas pengobatan ketimbang semata-mata sebagai agen kenikmatan. Hingga akhir dekade 80-an, kretek masih dipersepsikan sebagai obat. Salah satu buktinya adalah tulisan di belakang kemasan salah satu merek sigaret kretek yang beredar

di masa itu: "Kalau Anda batuk dan isep ini rokok, maka batuk Anda akan sembuh."

Penemuan Hadji Djamhari ini kemudian menumbuhkan para produsen kretek berskala rumahan di Kudus. Diriwayatkan, kala itu kretek dibuat di rumah-rumah berdasarkan pesanan, untuk dibawa atau dinikmati saat itu juga (barangkali layaknya kini kita memesan minuman hangat di rumah makan). Hadji Djamhari sendiri meninggal dunia tahun 1890, sebelum bisa benar-benar menikmati kesuksesannya berdagang kretek. Dan sebagaimana siapa yang mula-mula menciptakan kretek bertahan sebagai misteri, terdapat beberapa pendapat mengenai kapan tepatnya kretek ditemukan. Budiman dan Onghokham mengestimasi peristiwa kelahiran industri kretek di Kudus terjadi antara tahun 1870 sampai tahun 1880, sementara Hanusz menyebut "awal tahun 1880" sebagai masa kelahiran kretek.

Belum ada yang bisa memastikan pendapat mana yang benar. Tetapi setidaknya dua literatur di atas menyatakan bahwa dari sanalah industri kretek bermula: ketika Hadji Djamhari mulai memasarkan obat temuannya di lingkungan sekitar, dan banyak orang kemudian berusaha mengikuti jejaknya.

Kretek Hari Ini

Jika sebagian orang percaya, dengan Coca-Cola Amerika menguasai dunia[49], Indonesia sesungguhnya memiliki 'ramuan' yang tak kalah dahsyat. Ramuan itu tersembunyi di dalam sebatang kretek dan luar biasa kaya. Resep rahasia yang digadang-gadang itu, dalam khasanah kretek, disebut saus.

49 Tom Standage dalam bukunya tentang jenis-jenis minuman paling berpengaruh di dunia: *A History of World in 6 Glasses* (Walker Publishing Company, New York: 2006) mengisahkan ihwal minuman ini dalam satu bab khusus dan mengaitkannya dengan kebangkitan Amerika. Merek minuman terkenal ini diciptakan pada era yang nyaris berbarengan dengan kretek, ditemukan oleh seorang ahli obat paten bernama John Pemberton, dan—mirip dengan kisah penemuan kretek—mula-mula diklaim sebagai penyembuh penyakit saraf dan sakit kepala.

"Often the sauce recipe for a popular brand of kretek is known to only two or three members of a company, which would make it a more closely guarded secret than the formula for Coca-Cola."[50]

Bukalah satu pak kretek dan hirup aroma yang menguar, untuk membuktikannya. Rasakan sensasi yang melanda indera penciuman Anda; apakah ada aroma jeruk, pisang, atau nangka? Atau cengkeh? Jika belum yakin, cobalah sekali lagi. Barangkali Anda, sebagaimana saya, akan mengidentifikasi kerumitan sekaligus kekayaan rasa yang terbawa dalam sekali hirup. Aroma apakah itu?

Tak ada yang salah dengan hidung maupun saraf otak kita. Kenyataannya demikianlah; seturut yang diungkapkan Hanusz, terdapat sekurang-kurangnya lima puluh sampai dengan lebih dari seratusan rasa berbeda dalam saus kretek. Kemunculan saus dalam kretek sangat mencirikan kebiasaan masyarakat Indonesia: gemar menambahkan perisa pada apa pun yang masuk ke mulut—entah itu gula pada teh dan kopi, atau sambal pada nyaris setiap makanan. Kegemaran khusus ini sesungguhnya tecermin pula dalam tradisi mengunyah sirih pinang, sebab orang bumiputera biasa menambahkan cengkeh dan rempah lainnya untuk menemani bahan-bahan utamanya.

Ada dua alasan utama mengapa Saus menjadi penting bagi kretek. Alasan pertama mengacu pada kepentingan pemasaran, di mana setiap merek kretek mestilah memiliki karakter rasanya sendiri, guna membedakannya dengan merek lain. Untuk itulah resep saus tertentu ditambahkan, demi memperkuat rasa racikan berbagai jenis tembakau di dalamnya, sekaligus berfungsi sebagai 'bumbu penyedap', yang kelak mencirikan keunikan kretek merek tersebut di indera para penikmatnya.

Tetapi bukan hanya itu. Alasan kedua sesungguhnya tak kalah penting dan lebih fundamental. Sedikit saja yang tahu bahwa sebagian besar tembakau kering yang digunakan sebagai bahan dasar kretek (utamanya tembakau Jawa) tak langsung 'siap saji', karena tingginya kadar alkohol yang dikandungnya. Di sinilah Saus memegang peranan

50 Hanusz, op. cit., hal. 90.

dalam menetralisir rasa tembakau yang masih kasar, sekaligus menjaga dan menstabilkan konsistensi rasanya.

Lantas, kapan sesungguhnya saus mula-mula dicampurkan sebagai bahan dasar kretek? Apakah saus ditambahkan semata-mata sebagai resep rahasia oleh industri kretek yang berkembang di awal abad XX, demi menaikkan daya jual produk dan mengambil tempat di pasar, di antara para pesaingnya, atau sudah dilakukan sejak kretek pertama kali diciptakan di Kudus, tahun 1880? Tak ada yang tahu pasti. Sementara Tarmidi dalam *Changing Structure* menyebut penemuan kretek mula-mula hanya melibatkan unsur tembakau dan cengkeh (tanpa saus), Freek, Max, dan Hans Columbijn dalam *Kreteks Crackle in Children's Hands* mengasumsikan berbeda: bahwasanya saus telah digunakan sejak kretek pertama kali ditemukan.[51]

Pada masa awal perkembangan industri kretek, bahan-bahan yang digunakan untuk meracik saus terdiri dari esens buah-buahan lokal yang mudah didapat, seperti pisang, nangka, kayumanis, panili, dan lain-lain. Bagaimanapun, ketika industri ini berkembang menjadi luar biasa besar dan menumbuhkan kultur persaingan yang tidak enteng, sejumlah produsen kretek mulai memesan bahan-bahan perisa makanan dari luar negeri untuk meramu resep rahasia mereka. Kerahasiaan ramuan saus untuk setiap merek kretek memang dijaga betul, salah satunya dengan cara membeli bahan tertentu pada perusahaan bahan makanan yang berbeda-beda setiap tahunnya, atau dengan membedakan kuantitas pembelian bahan tertentu itu, dari waktu ke waktu. Dengan demikian, melacak bahan-bahan penyusun saus sebuah merek kretek yang terkenal sama sekali bukan pekerjaan mudah, dan kerap kali rahasia dapur ini hanya diketahui oleh pemilik perusahaan dan peramu senior di perusahaan tersebut. Belum terhitung bahan-bahan lokal, seperti esens tembakau, esens buah, dan bumbu-bumbu tradisional, yang diramu dan ditambahkan di dapur perusahaan.

---

51 Arnez, op. cit., hal. 53.

"The taste of kretek is a reflection of the taste of the people."[52]

Pasar dengan selera yang berbeda juga menjadi bahan pertimbangan lain bagi para produsen kretek. Untuk pasar Jawa Tengah yang suka manis, misalnya (ditilik dari kesukaan orang Jawa Tengah mencampur makanan mereka dengan kecap manis), Djarum mencampurkan esens buah manis seperti strawberry dan raspberry dalam sigaret produksi mereka. Sementara bagi masyarakat Jawa Timur, yang lebih berselera terhadap yang gurih dan pedas, Gudang Garam sengaja menciptakan kretek bercitarasa 'pedas', serta menggembar-gemborkan pemakaian kayumanis dalam sigaret buatannya.

Dari risalah di atas, dapat dibayangkan betapa rumitnya perjalanan yang mesti ditempuh industri kretek hingga menghasilkan merek tertentu. Menentukan campuran bahan yang mesti digunakan untuk menciptakan citarasa kretek merek tertentu saja sudah bukan hal sepele. Belum lagi upaya yang harus dilakukan demi menjaga konsistensi rasa dan aroma merek tersebut dari tahun ke tahun, sekaligus mempertahankan resepnya sebagai rahasia dapur perusahaan, untuk bisa tetap bersaing di pasaran. Belum terhitung proses pembuatan kretek di luar soal citarasa, mulai dari tahap pelintingan sampai dengan pengemasan.

Alur produksi kretek di luar proses pertanian tembakau memang mencakup waktu dan matarantai yang tidak pendek. Biasanya, petani tembakau mula-mula mengirim sampel tembakau rajangan yang sudah dikeringkan ke perusahaan kretek, untuk dikurasi oleh para *grader*. *Grader* adalah orang kunci yang merepresentasikan pabrik rokok. Peran *grader* amat menentukan, sebab ialah yang memutuskan tembakau mana saja yang mesti digunakan untuk melengkapi rasa sebatang kretek jenis tertentu. Mengingat setiap pabrik kretek rata-rata membuat lima jenis sigaret/merek, dan konsistensi rasa sebuah merek adalah salah satu faktor yang signifikan dalam mengikat konsumen, tugas *grader* tak bisa dibilang enteng. Seorang *grader* bisa dibayar sangat tinggi oleh sebuah industri kretek, sebab pada *grader*-lah rasa dan aroma kretek bertumpu.

52 Hanusz, op. cit., hal. 96.

Setelah dinilai dan dipilih oleh *grader*, tembakau-tembakau ini tidak langsung diproduksi, melainkan disimpan dulu selama satu sampai tiga tahun di gudang tembakau milik perusahaan kretek, untuk mencapai tingkat kekeringan yang sempurna. Selama masa penyimpanan, posisi tembakau terus diputar, supaya seluruh tembakau yang disimpan dalam gudang mengalami proses pengeringan/penuaan yang merata. Proses pematangan ini pulalah yang memberikan karakteristik kretek yang khas dan membedakannya dari jenis produk tembakau yang lain.

Dalam matarantai industri kretek mulai hulu hingga ke hilir, selain pertanian tembakau (yang dengan sendirinya melibatkan banyak petani karena keragaman jenis tembakau yang digunakan dalam satu merek kretek), proses pelintingan dan pengemasan merupakan tahapan produksi kretek yang juga menyerap sumber daya manusia dalam jumlah besar. Meski pada tahun 1970-an telah terjadi mekanisasi dalam industri kretek, proses produksi tradisional yang melibatkan banyak pekerja tetap bertahan tak berubah. Salah satu penyebabnya, barangkali, adalah sistem abon yang diberlakukan pada masa awal perkembangan industri kretek.

Sistem abon bisa jadi merupakan tradisi tinggalan Nitisemito yang ruhnya bertahan sampai hari ini. NV Bal Tiga Nitisemito diasumsikan merupakan perusahaan yang pertama kali memperkenalkan sistem *outsource* di Hindia Belanda. Pada masa itu, sebagian proses pembuatan kretek, yakni pelintingan, oleh Nitisemito dipercayakan kepada pihak ketiga melalui perantaraan seseorang yang disebut 'abon'.

Abon sesungguhnya merupakan kependekan dari *abonemen* (bahasa Belanda dari 'berlangganan'). Istilah ini muncul ketika perusahaan kretek 'berlangganan' kepada seseorang, untuk menyelesaikan mata-rantai proses produksinya yang melibatkan lebih banyak tenaga. Layaknya agen tenaga kerja, seorang abon bertanggung jawab terhadap pengorganisasian pekerja. Ialah yang mengumpulkan, membayar, dan kalau perlu memecat pelinting. Tugas abon adalah membawa pulang racikan tembakau yang telah dipersiapkan oleh perusahaan, kertas, serta peralatan melinting ke desanya, untuk didistribusikan kepada

para pekerja di rumah-rumah tangga, yang disebut *kernet*. Para *kernet* ini dibayar berdasarkan jumlah lintingan yang berhasil mereka buat. Biasanya, beberapa hari kemudian, sang abon akan mengambil kretek hasil lintingan para *kernet* dan mengembalikan batangan-batangan rapi kelobot ke Nitisemito, sembari mengambil komisinya.

Sistem abon bisa dibilang merupakan upaya efisiensi yang pengaruhnya cukup signifikan. Dengan memberlakukan sistem abon, Nitisemito tak perlu berurusan langsung dengan pekerja, maupun membangun pabrik ataupun infrastruktur produksi untuk menangani pesanan yang terus meningkat. Perusahaan hanya perlu mempersiapkan racikan kretek siap-linting, serta menyediakan kertas dan peralatan melintingnya. Dalam sistem ini, kesejahteraan buruh menjadi tanggung jawab abon.

Karena efektivitasnya, sistem ini dengan segera ditiru oleh industri-industri kretek yang lebih kecil di daerah Kudus. Hingga pada puncaknya, seorang abon rata-rata bisa mengelola delapan sampai sepuluh orang pelinting, dan perusahaan kretek yang cukup besar akan berhubungan dengan lebih dari seratusan orang abon. Sayangnya, meskipun mula-mula diciptakan oleh Nitisemito, adalah sistem ini pulalah yang di kemudian hari menjadi salah satu faktor penyebab keruntuhan Bal Tiga.

Kelemahan sistem abon adalah peluang terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh abon yang 'berkhianat'. Pada kasus Bal Tiga, yang terjadi adalah abon dengan sengaja melinting racikan milik Nitisemito dengan kertas pembungkus kretek merek lain milik perusahaan kompetitor Bal Tiga. Sebaliknya, sang kompetitor bisa meminta abon pembelot ini untuk merusak racikan Nitisemito dengan menambahkan tembakau bermutu rendah di dalamnya. Dengan demikian, kualitas kretek Bal Tiga yang beredar di pasaran menurun, sementara pada saat yang sama terdapat kretek merek lain dengan rasa Bal Tiga yang beredar di pasaran. Ini dengan segera merusak reputasi Nitisemito. Sehingga pada satu titik, raja kretek bumiputera pertama ini terpaksa mendirikan pabrik dan menyelesaikan proses pembuatan kretek di tempatnya, untuk menjaga kualitas. Bagaimanapun, cara ini tidak berhasil menangani besarnya permintaan pasar akan kretek Bal Tiga.

Sistem abon kini telah ditinggalkan, meski sebagian kecil industri kretek (salah satunya adalah Nojorono) masih memberlakukan sistem ini. Bagaimanapun, seperti disinggung di atas, mekanisasi dalam industri kretek tidak serta-merta melenyapkan tradisi melinting yang melibatkan sejumlah besar pekerja dalam proses produksinya.[53] Unsur ini dipertahankan, dan hingga kini sigaret kretek tangan masih dengan mudah ditemukan di pasaran (proporsi Sigaret Kretek Tangan—SKT di pasaran adalah sepertiga jumlah kretek yang dipasarkan)[54]. Di sisi lain, berkat mekanisasi, perusahaan-perusahaan kretek dapat lebih memfokuskan diri kepada pengembangan bentuk dan varian kretek. Sehingga pada tahun 80-an, setelah ditemukannya kretek rendah tar dan rendah nikotin (ringan), secara signifikan terjadi lonjakan konsumen kretek, dan mereka yang tadinya memilih rokok putih berhijrah ke jenis kretek baru ini.

Penemuan kretek jenis ringan bisa dikatakan merupakan salah satu tonggak kesuksesan kretek di pasar Indonesia. Pada era inilah perusahaan kretek besar seperti Bentoel, Sampoerna, dan Djarum menciptakan kemasan kretek yang tak kalah menarik dengan rokok putih—dengan menimbulkan kesan elegan yang dicitrakan melalui bentuk batangan yang lebih bersih, juga iklan dan propaganda yang menyasar kelas menengah (tadinya, kretek sempat kalah populer dengan rokok putih, dan di tahun 70-an orang-orang lebih memilih untuk mengonsumsi rokok putih di lingkungan sosialnya sebagai simbol kelas, sementara pada saat yang sama secara sembunyi-sembunyi mengonsumsi kretek ketika berada di rumah).

Kini, kretek—yang berfilter maupun tidak, jenis ringan maupun berat—adalah penguasa yang berjaya di negerinya sendiri. Kejayaan kretek secara signifikan memengaruhi kondisi makro-ekonomis Indo-

53 Menurut Arnez, penyebab terjadinya mekanisasi adalah: (1) pada akhir tahun 1960-an firma-firma besar seperti Bentoel mengalami kekurangan buruh, akibat tingginya permintaan pasar atas kretek dan bermunculannya perusahaan-perusahaan kretek untuk merespon pasar—yang dengan sendirinya menyerap sejumlah besar tenaga kerja; (2) kretek filter mulai populer di kalangan konsumen, dan (3) mekanisasi, tak pelak, adalah metode yang efektif untuk meningkatkan produksi.

54 Arnez, op. cit., hal. 56.

nesia: sebuah prestasi yang tidak main-main. Bagi perusahaan rokok kelas dunia, nyaris mustahil mematahkan kedigdayaan kretek dan merebut pasar melalui rokok putih. Tak bisa dinafikan, industri kretek memiliki sumbangsih yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia (ditinjau dari besaran cukai yang didapat pemerintah setiap tahunnya), belum terhitung kegiatan-kegiatan olahraga dan kesenian yang didukung sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kretek kepada masyarakat.

KRETEK

Ketangguhan Industri yang Teruji

Industri kretek telah membuktikan diri menjadi hanya sedikit, bahkan mungkin satu-satunya, dari industri nasional yang mampu bertahan dari berbagai terpaan badai pergolakan sosial dan politik, perang dan pemberontakan bersenjata, juga krisis perekonomian global maupun lokal.[1]

Awal abad XX. Hadji Djamhari telah tiada, tetapi permintaan atas kretek tidak ikut mati, sebaliknya justru terus meningkat. Permintaan bahkan meluas dari sekitar Kudus sampai ke daerah-daerah lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dasar ekonomi kota Kudus pun bergeser. Industri berkembang. Seluruhnya milik pribumi.

Pada masa yang sama, Belanda makin mengukuhkan kekuasaan. Untuk pertama kalinya sejak ratusan tahun yang dilewatkan dengan upaya penaklukan, seluruh wilayah di Nusantara akhirnya berhasil ditundukkan. Perlawanan di berbagai daerah yang masih tersisa di abad XX berhasil dikandaskan. Tahun 1904, perlawanan di Sumatera Utara kandas. Tahun 1907, perlawanan di Tanah Batak dan Jambi kandas. Tahun 1908, perlawanan di Bali, yang lebih dikenal dengan Perang Puputan, dan di Kalimantan (Selatan dan Tengah) kandas. Terakhir, tahun 1912, perlawanan di Aceh kandas.

Sementara itu, pernyataan-pernyataan keprihatinan atas kesejahteraan Hindia Belanda—sebutan untuk Nusantara pada waktu itu—telah melahirkan Politik Etis. Fajar baru seolah-olah merekah, tetapi tidak ada yang berubah kecuali bentuk penjajahan. Kebijakan yang lahir tetap dalam kerangka liberalisme. Agresivitas modal terus menekan, bahkan kian tak terbendung. Jika di tahun 1900 penetrasi modal asing di Nusantara baru mencapai angka 750 juta gulden, di tahun 1914 telah melesat menjadi 1,7 miliar gulden.[2]

1 Topatimasang, Roem, (ed), dkk, *Kretek: Kajian Ekonomi dan Budaya 4 Kota*, Indonesia Berdikari, Yogyakarta, 2010, hal. 139.

2 Poesponegoro, Marwati Djoened & Notosusanto, Nugroho, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda*, Balai Pustaka, Jakarta: 2008, hal. 169.

Perkebunan tembakau tidak lepas dari penetrasi modal asing. Suntikan modal yang masuk berhasil memacu produktivitas perkebunan-perkebunan besar tembakau. Puncaknya adalah pada tahun 1913, di mana ekspor tembakau Hindia Belanda mencapai jumlah terbesar, yaitu sebanyak 160 ribu bal.[3]

Industri kretek di Kudus tumbuh sebagai industri yang unik. Dalam pemerintahan yang dikendalikan oleh bangsa asing, dan dalam perekonomian yang didominasi oleh modal asing, industri kretek di Kudus tumbuh dan berkembang sebagai basis usaha pribumi. Basis usaha yang—menurut Lance Castles—dapat diharapkan, bersama-sama dengan "kesadaran" umum masyarakat Indonesia sejak dasawarsa pertama abad XX, untuk membentuk inti dalam mencapai "Indonesianisasi" ekonomi umum.[4]

Salah seorang yang berperan penting di masa itu adalah Nitisemito, pengusaha pribumi yang kelak dikenal sebagai "raja kretek". Jika Hadji Djamhari dikenal sebagai penemu kretek, Nitisemito dikenal sebagai orang yang memajukan industri kretek. Saat produksi kretek mulai semarak di Kudus, tidak ada yang menggunakan merek. Adalah Nitisemito yang mula-mula menggunakan dan memperkenalkannya, mulai dari Kodok Mangan Ulo, Bulatan Tiga, Tiga Bola, hingga akhirnya disempurnakan menjadi Bal Tiga di tahun 1906. Pada tahun 1908, ia mendaftarkan perusahaannya sebagai NV Bal Tiga Nitisemito.

Bal Tiga segera merebut kedudukan di pasaran. Nitisemito menerapkan strategi pemasaran yang belum pernah ada di masanya. Yang paling menonjol adalah kemasan produk. Sementara desain kemasan produk kretek lain masih sangat sederhana, Nitisemito sudah memakai desain *full-color* dengan ornamen berkualitas tinggi yang dicetak di Jepang.

Apa yang berhasil dicapai Kudus kemudian juga menular ke Jawa Timur. Kali ini bukan hanya permintaan kretek saja, tetapi berdirinya perusahaan kretek. Tahun 1909, di Blitar berdiri perusahaan kretek. Menyusul kemudian di Kediri tahun 1911, dan di Surabaya tahun 1914.

---

3 Ibid. hal. 188.

4 Castles, Lance, *Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*, Sinar Harapan, Jakarta: 1982, hal. 139.

Perang Dunia I

Juni 1914. Putera mahkota Austria-Hongaria dan istrinya dibunuh dalam kunjungan ke Sarajevo. Konflik kepentingan ekonomi-politik antar-bangsa Eropa menemukan momentumnya. Perang pecah sampai November 1918. Sejarah menulis dekade kedua abad XX ini dengan tinta darah. Tak kurang dari 40 juta manusia meregang nyawa hanya dalam waktu 4 tahun 4 bulan.

Hindia Belanda terguncang. Negeri induknya, Belanda, memang tidak ambil bagian dalam perang. Namun nilai investasi Jerman yang tinggi di sana, ditambah hubungan dagang yang erat, membuat Inggris melakukan blokade atas pelabuhan-pelabuhan Belanda. Koloni-koloni Belanda terimbas, tak terkecuali Hindia Belanda. Ricklefs menggambarkannya sebagai "jaman kacau"[5] di Hindia Belanda; pelayaran antara Indonesia dan Eropa terganggu oleh perang, komunikasi terhambat, anggaran belanja militer kolonial meningkat, sedangkan anggaran belanja untuk kesejahteraan dikurangi, harga barang-barang naik, dan kesejahteraan rakyat merosot.

Uniknya, dalam "jaman kacau", ketika terjadi kelumpuhan di mana-mana, industri kretek terus berkembang. Sampai tahun 1918, puluhan perusahaan kretek baru justru bermunculan di Kudus. Industri kretek juga semakin meluas di Jawa Timur, ditandai dengan berdirinya perusahaan kretek pertama di Nganjuk dan Madiun tahun 1915. Khusus di Kudus, perkembangan industri yang begitu pesat menarik minat para pengusaha Tionghoa untuk ikut terjun ke bisnis kretek. Sayangnya, perkembangan yang terjadi di kota kelahiran kretek ini tidak berbuah manis. Persaingan para pengusaha pribumi dengan para pengusaha Tionghoa terjadi sepanjang Perang Dunia I, dan berujung pada kerusuhan di bulan Oktober 1918, beberapa minggu sebelum perang berakhir. Budiman dan Onghokham menggambarkan bencana tersebut sebagai berikut:

"Pada awal mulanya seluruh perusahaan rokok di Kudus berada di tangan orang pribumi. Namun, setelah para pengusaha ini berhasil

5 Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Serambi, Jakarta: 2007.

mencapai demikian banyak kemajuan dalam waktu yang relatif singkat, para pengusaha Tionghoa beramai-ramai mengikuti jejak mereka. Di antara kedua pihak kemudian muncul persaingan hebat. Pada tahun 1918 persaingan ini telah mencapai puncaknya, hingga menjadi salah satu faktor penting penyebab meletusnya sebuah kerusuhan hebat yang meledak di Kudus pada tanggal 31 Oktober tahun itu juga.

Banyak korban berjatuhan pada kedua pihak. Sejumlah rumah dan pabrik terbakar. Banyak pengusaha pribumi yang berpengaruh diajukan ke muka pengadilan dan dijatuhi hukuman. Akibatnya, industri kretek di Kudus mengalami kemunduran. Sebaliknya, dengan terpidananya para pengusaha pribumi tersebut, para pengusaha Tionghoa berhasil memperkuat posisi mereka dalam industri rokok kretek di Kudus. Fajar kemakmuran mereka pun mulai merekah."[6]

Dalam situasi di mana konsepsi kebangsaan Nusantara belum lagi jelas, atau semata-mata ditentukan oleh pemerintah kolonial untuk kepentingan mereka, sejumlah kerusuhan dengan orang-orang Tionghoa dengan cepat mewabah dan merebak di banyak tempat, khususnya di Jawa. Sepanjang tahun 1913 – 1914, kerusuhan etnis pecah di banyak kota, antara lain di Surabaya, Solo, Semarang, Cirebon, Tangerang, dan Bekasi, dengan motif serupa—persaingan bisnis.

Tetapi lagi-lagi, industri kretek adalah anomali. Pascakerusuhan, tidak dibutuhkan waktu lama bagi industri kretek di Kudus untuk pulih dan bangkit kembali. Masih menurut gambaran Budiman dan Onghokham,[7] di tahun 1924, industri kretek di Kudus sudah bisa dibedakan ke dalam 3 golongan, yaitu besar (produksi di atas 50 juta batang per tahun), menengah (produksi 10 - 50 juta batang per tahun) dan kecil (produksi di bawah 10 juta batang per tahun). Di tahun itu, tercatat ada 12 perusahan besar, 16 perusahaan menengah, dan 7 perusahaan kecil. Jumlah seluruhnya sebanyak 35 perusahaan, dan terus meningkat di tahun-tahun selanjutnya: menjadi 38 perusahaan di tahun 1925, 42 perusahaan di tahun 1926, dan 46 perusahaan di tahun 1927.

6 Budiman, A., & Onghokham, *Rokok Kretek: Lintasan Sejarah dan Artinya bagi Pembangunan Bangsa dan Negara*, Jarum, Kudus: 1987, hal. 107-108.

7 Ibid. hal. 109.

Di tahun 1928, industri kretek telah mencapai jumlah 50 perusahaan, dengan perincian 13 perusahaan besar, 26 perusahaan menengah, dan 11 perusahaan kecil.

Pulihnya industri kretek di Kudus juga ditandai dengan semakin berkibarnya perusahaan Nitisemito. Tahun 1924, Bal Tiga telah melibatkan 15.000 orang pekerja.[8] Salah satu faktor penting di balik kesuksesan Bal Tiga adalah strategi promosinya yang luar biasa. Nitisemito dan Bal Tiga menyediakan sejumlah hadiah gratis berupa sepeda, jam dinding, jam tangan, gelas, cangkir, piring—semua berlogo Bal Tiga, yang bisa didapatkan pelanggan hanya dengan menukarkan sejumlah bungkus kosong kretek. Agar promosinya berjalan lebih massif, Nitisemito membeli beberapa bis yang didesain khusus dengan jendela besar, dan menggunakannya sebagai etalase hadiah (jendela besar membuat hadiah bisa terlihat lebih jelas) yang dibawa berkeliling dari kota ke kota di Jawa. Strategi "jemput bola" ini memudahkan pelanggan yang hendak menukar sejumlah bungkus kretek dengan hadiah, dan dengan sendirinya menaikkan kepopuleran Bal Tiga di mata masyarakat.

Tak hanya itu, setiap ada pasar malam di Jawa Tengah, Nitisemito mendirikan stan Bal Tiga. Sandiwara atau tonil juga digelar dari kota ke kota. Yang ingin menonton tidak perlu merogoh kocek untuk membeli karcis, tetapi cukup menukarkan beberapa bungkus kosong Bal Tiga sebagai tiket masuk.

Cengkeh, Rokok Putih, dan Depresi Besar

Tahun 1928. Perusahaan kretek telah meluas di hampir seluruh ibukota kabupaten di Jawa Tengah. Di Jawa Timur, setelah Blitar, Kediri, Surabaya, Nganjuk, dan Madiun, perusahaan kretek telah berdiri di Jombang, Tulungagung, Probolinggo, Besuki, Bojonegoro, Ponorogo, Tuban, Sidoarjo, Mojokerto, dan Malang. Perusahaan kretek juga telah mengenal pembungkus kertas yang memungkinkan penggunaan alat

8 Hanusz, Mark, *Kretek: The Culture and Heritage of Indonesia's Clove Cigarettes,* Equinox Publishing (Asia), Jakarta: 2003, hal. 47.

pelinting dalam pembuatannya. Kertas sebagai pembungkus rokok ini dikenal dengan istilah *"papersigaretten"*.

Di tahun yang sama, harga cengkeh dunia melejit. Harga cengkeh memang cenderung fluktuatif, tetapi kegagalan panen di Zanzibar dan Madagaskar—dua daerah utama penghasil cengkeh dunia—telah melejitkan harga sampai dua kali lipat lebih. Waktu itu, ketergantungan industri kretek terhadap cengkeh impor cukup tinggi. Salah satu sebabnya adalah karena hasil panen di perkebunan cengkeh Nusantara tidak seperti yang diharapkan, sehingga gagal memenuhi kebutuhan cengkeh yang meningkat, terutama sejak berkembang pesatnya industri kretek di tahun 1920-an.

Industri kretek kembali terpukul. Pukulan kali ini tidak hanya menghunjam Kudus saja—meskipun dampak terbesar memang melanda kota itu—tetapi juga ke seluruh pabrik kretek yang ada. Banyak pengusaha bermodal kecil yang lantas gulung tikar. Sementara yang masih bertahan kebanyakan mesti menurunkan kualitas produk mereka maupun memotong upah pekerja. Kenyataan itu diperparah dengan membanjirnya produk rokok putih, melalui impor dan pendirian pabrik.

Industri kretek berada pada posisi yang sulit. Menurunkan kualitas produk maupun memotong upah pekerja akan menjatuhkan reputasi dan bisa menghancurkan bisnis. Ini banyak dialami oleh produsen dari Kudus. Tetapi bertahan dengan harga cengkeh selangit bisa-bisa justru membuat konsumsi turun atau mengalihkan konsumen ke pilihan rokok putih.

Sejak awal abad XX, rokok putih—yang tentu saja semuanya impor—memang sudah membanjir. Tahun 1923, jumlahnya diperkirakan mencapai 1 miliar batang per tahun. Banjir pun meninggi ketika, untuk pertama kalinya, pabrik rokok putih berdiri di Indonesia. Tahun 1924, British American Tobacco (BAT), perusahaan patungan Inggris dan Amerika Serikat, membuka pabrik di Cirebon. Empat tahun kemudian, BAT kembali mendirikan pabrik di Surabaya. Di tahun 1931, pabrik BAT di kedua kota tersebut telah menghasilkan sekitar 7 miliar batang rokok putih. Ditambah impor rokok putih sebesar 100 juta batang di

tahun yang sama, total jumlah rokok putih yang beredar adalah 7,1 miliar batang.[9] Jumlah tersebut melampaui peredaran kretek. Tahun 1931 peredaran kretek hanya 6,95 miliar batang.[10]

Badai yang menerpa industri kretek tidak cukup sampai di situ. Masih akan datang lagi badai berikutnya. Gonjang-ganjing ini bermula ketika tahun 1929 bursa saham di New York jatuh. Lima hari setelahnya, 16 juta saham diobral di bursa Wall Street. Miliaran dolar AS raib seketika. Industri ambruk. Perdagangan remuk. Kebangkrutan, pengangguran, dan kelaparan berkecamuk. Depresi Besar melanda. Perekonomian dunia terjerembab secara dramatis.

Keyakinan bahwa pasar sanggup mengurus dirinya sendiri, dan karena itu tidak diperlukan campur tangan negara dalam perekonomian, tidak terbukti. Liberalisme runtuh. Pasar, mengutip Revrisond Baswir[11] ternyata tidak hanya tidak mampu mengurus dirinya sendiri, tetapi dapat menjadi sumber malapetaka bagi kemanusiaan.

Imbas depresi terasa sampai ke Hindia Belanda. Perdagangan luar negeri melemah drastis. Pendapatan pemerintah dari pajak jauh menipis. Menyikapi kenyataan pahit itu, pemerintah kolonial menerapkan beban pajak sebesar 20 persen bagi semua hasil tembakau pabrik. Maka, sejak tahun 1932 pabrik rokok harus membeli stiker *banderol* pajak atau pita cukai untuk dipasang di tiap bungkusnya (praktek ini masih berlangsung sampai sekarang). Peraturan baru tersebut telah membangkitkan ketakutan besar bagi industri kretek, melebihi ketakutan atas persoalan lain.

Tahun 1928 sampai 1932 merupakan salah satu masa terberat industri kretek. Tidak sedikit perusahaan yang tergilas. Di masa itu, industri kretek terhitung mengalami penurunan produksi sebanyak dua kali. Produksi kretek sebesar 7,27 miliar batang di tahun 1930 turun menjadi 6,95 miliar batang di tahun 1931, kemudian turun lagi menjadi 6,08 miliar batang di tahun 1932.

---

9 Budiman, Onghokham, op. cit., hal. 173.
10 Castles, op. cit., hal. 168.
11 *"Analisis Neoliberalisme"*, Revrisond Baswir, http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid= 198648& actmenu=45 (diakses tanggal 16 Mei 2011).

Tetapi tahun berikutnya industri kretek telah berhasil bangkit. Tahun 1933, jumlah produksi meningkat menjadi 8,43 miliar batang. Sampai tahun ini pula, semua karesidenan di Jawa Timur: Madiun, Malang, Kediri, Surabaya, Bojonegoro, Probolinggo, Besuki, dan Madura, telah mengembangkan perusahaan kretek, termasuk Kabupaten Tuban, Lamongan, dan Gresik. Begitu juga di Jawa Tengah. Kecuali Karesidenan Banyumas, semua karesidenan tidak lepas dari perusahaan kretek: Kedu, Jepara, Pekalongan, Rembang, Semarang, Tegal. Hal yang sama berlaku untuk daerah kerajaan Surakarta dan Yogyakarta.

Impor Cengkeh dan Produksi Kretek, 1930 – 1934

Tahun	IMPOR CENGKEH (Ton)	PRODUKSI KRETEK (Miliar Batang)	
		Sebenarnya	Perkiraan
1930	3060	7,27	7,11
1931	5190	6,95	Tidak ada data
1932	2070	6,08	Tidak ada data
1933	3560	8,43	8,68
1934	5050	11,47	Tidak ada data

Sumber: Lance Castles, *Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*, 1982.

Dari Karesidenan Jepara dan Rembang (Kudus, Pati, Blora, dan Rembang), Karesidenan Madiun (Madiun, Ponorogo, Magetan, dan Ngawi), dan Karesidenan Malang (Malang, Pasuruan, dan Bangil) saja tercatat ada 502 perusahaan. Jika ditambah karesidenan lain, termasuk kabupaten dan daerah kerajaan, yang tidak ada datanya, khususnya Karesidenan Kediri (Kediri, Blitar, dan Tulungagung) yang merupakan pusat industri kretek terbesar setelah Kudus, mestinya jumlah perusahaan kretek telah menembus angka 1000 di tahun 1933. Perkembangan yang sungguh luar biasa.

Perusahaan Kretek, 1933

	Karesidenan	Jumlah Perusahaan Kretek
	JAWA TENGAH	
-	Jepara dan Rembang	269
-	Semarang	Tidak ada data
-	Pekalongan	Tidak ada data
-	Banyumas	Tidak ada produksi
-	Kedu	Tidak ada data
-	Tegal	Tidak ada data
	JAWA TIMUR	
-	Madiun	113
-	Malang	93
-	Kediri	Tidak ada data
-	Surabaya	Tidak ada data
-	Bojonegoro	Tidak ada data
-	Probolinggo	Tidak ada data
-	Madura	Tidak ada data
-	Besuki	Tidak ada data
	DAERAH LAIN	
-	Kabupaten Tuban	Tidak ada data
-	Kabupaten Lamongan	Tidak ada data
-	Kabupaten Gresik	Tidak ada data
-	Surakarta	Tidak ada data
-	Yogyakarta	Tidak ada data

Sumber: Amen Budiman dan Onghokham, *Rokok Kretek: Lintasan Sejarah dan Artinya Bagi Pembangunan Bangsa dan Negara*, PT Djarum Kudus, 1987.

Di tahun-tahun berikutnya, laju perkembangan industri kretek semakin tak terbendung, terutama pada tahun-tahun terakhir sebelum Perang Dunia II. Lance Castles menyebutnya sebagai masa "kemakmuran industri", dan memastikan (dari impor cengkeh, karena data lengkap tidak ada) produksi tertinggi terjadi di masa tersebut.[12]

12 Castles, op. cit., hal. 67.

Impor Cengkeh dan Produksi Kretek, 1935 – 1940

Tahun	IMPOR CENGKEH (Ton)	PRODUKSI KRETEK (Miliar Batang)	
		Sebenarnya	Perkiraan
1935	4360	Tidak ada data	Tidak ada data
1936	5430	Tidak ada data	10,05
1937	4420	Tidak ada data	Tidak ada data
1938	5700	Tidak ada data	Tidak ada data
1939	8660	Tidak ada data	15,14
1940	7060	Tidak ada data	Tidak ada data

Sumber: Lance Castles, *Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*, 1982.

Memang, laju perkembangan itu tidak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah kolonial yang lebih menguntungkan industri kretek daripada industri rokok putih. Misalnya, kebijakan pajak yang pada akhirnya—berkat tekanan *Volksraad*—dipungut secara diferensial sejak tahun 1932, di mana industri rokok putih harus membayar *banderol* pajak lebih tinggi dibanding kretek. Kemudian, tahun 1935 pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan harga eceran minimum untuk rokok putih. Di samping itu, kebijakan yang tak kalah penting adalah adanya pelarangan operasi bagi mesin-mesin baru tanpa izin pemerintah.

Bagaimanapun, perlu digarisbawahi, kebijakan pemerintah kolonial dalam melindungi industri kretek ini tidak lahir atas "kebaikan hati". Pertama, meskipun ada korporasi perdagangan besar Belanda (Jacobson van den Berg) yang mendirikan pabrik rokok di Jakarta, mayoritas modal dalam industri rokok putih dimiliki oleh Inggris – Amerika dan Belgia. Kedua, depresi telah melemahkan perdagangan internasional secara drastis. Politik proteksi diberlakukan di mana-mana. Padahal Hindia Belanda sangat bergantung pada ekspor bahan mentahnya. Akibat depresi, harga rata-rata dan volume ekspor Hindia Belanda merosot tajam. Ini menyebabkan adanya kelebihan produksi di dalam negeri. Kesejahteraan rakyat terpuruk. Dalam situasi serbasulit semacam ini, karakter industri kretek menjadikannya jauh lebih menguntungkan bagi

perekonomian dalam negeri dibanding industri rokok putih.

Di sisi lain, pemerintah kolonial sangat berkepentingan untuk meredam gejolak akibat depresi, setidaknya dengan tetap mempertahankan pekerjaan dan pendapatan penduduk di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Industri kretek bisa menopang itu. Lain halnya dengan industri rokok putih yang melibatkan sedikit tenaga kerja (rokok putih seluruhnya dikerjakan dengan mesin, sedangkan kretek dengan tangan). Selain itu, hampir seluruh tembakau yang diserap industri kretek berasal dari dalam negeri. Pemerintah kolonial jelas berkepentingan dengan ekspor tembakau yang macet karena depresi. Manakala pada industri rokok putih, sebagian besar tembakaunya jelas diimpor.

Kepentingan pemerintah kolonial terhadap industri kretek terlihat pula pada kasus pembayaran pajak di perusahaan Nitisemito, Bal Tiga. Di tahun-tahun ini, perusahaan Nitisemito sudah sangat maju. Tahun 1937, Nitisemito membangun diversifikasi usaha, sekaligus sebagai alat promosi Bal Tiga, dengan mendirikan Radio Vereneging Koedoes. Alat promosi lain yang digunakan, yang juga membuat nama Nitisemito semakin berkibar, adalah pesawat terbang. Produksi Bal Tiga melesat sampai 3,5 miliar batang di tahun 1938. Di tahun yang sama pula, Paku Buwono X, raja terkaya sepanjang riwayat Kasunanan Surakarta, mengunjungi pabriknya (Nitisemito sempat menghadiahkan jam besar kepada Paku Buwono X, jam tersebut sekarang tersimpan di masjid Keraton Surakarta dan masih hidup[13]).

Sayangnya, perselisihan internal lantas menyeret perusahaan Nitisemito ke dalam kasus manipulasi pajak. Nitisemito dianggap tidak membayar pajak sebagaimana mestinya. Hartanya disita. Tetapi, mengingat peran besar Nitisemito sebelumnya dalam menyumbang pemasukan dari pajak dan peran Bal Tiga bagi industri kretek secara keseluruhan, sikap pemerintah kolonial melunak. NV Bal Tiga diizinkan terus beroperasi agar dapat mencicil hutang pajaknya setiap bulan.

13 "*Wangsit Di Bungkus Rokok*", http://202.158.52.214/id/arsip/1980/09/06/ILS/mbm. 19800906. ILS52637.id.html (diakses tanggal 16 Mei 2011).

Pendudukan Jepang

Rahim liberalisme melahirkan depresi. Angin berembus ke paham fasisme. Dalam satu dekade, wabah fasisme telah menyebar ke Eropa, Amerika Selatan, Asia Timur, dan Asia Tengah. Tahun 1940, Pakta Tiga Pihak mengesahkan persekutuan Jepang – Jerman – Italia.

Sepanjang depresi, penetrasi ekonomi Jepang ke Indonesia sudah berjalan massif. Dan sangat sukses. Arti penting Indonesia bagi Jepang semakin tidak diragukan. Bahkan pemimpin-pemimpin Jepang secara terbuka berani memunculkan wacana 'pembebasan' Indonesia. Wacana tersebut berbuah aksi konkret di bulan Februari 1942. Di Laut Jawa, pasukan Jepang merontokkan pasukan gabungan Belanda, Inggris, Australia, dan Amerika. Bulan Maret 1942, Belanda menyerah pada Jepang. Kekuasaan di Indonesia berpindah tangan.

Sekali lagi, Perang Dunia berkecamuk. Kali ini jauh lebih besar dari yang pertama. Indonesia seolah-olah menjadi 'pelanduk yang mati di tengah-tengah'. Tidak ada yang lebih penting bagi Jepang, kecuali mengarahkan perekonomian Indonesia guna menopang keperluan perang. Sektor perkebunan babak belur. Tanaman perkebunan dibongkar, diganti dengan tanaman pangan dan jarak. Tanaman jarak diperlukan untuk pelumas mesin-mesin, termasuk pesawat terbang. Akibatnya, produksi karet, teh, kopi, tebu, kelapa sawit, dan tak terkecuali tembakau, jatuh pada titik terendah. Selama masa pendudukan Jepang, produksi perkebunan Indonesia merosot sampai 80 persen.[14]

Industri kretek dirundung gelap. Tembakau sangat terbatas dan sulit didapat. Nasib cengkeh lebih parah. Impor dari Zanzibar dihentikan. Perusahaan kretek hanya bisa bertahan dari stok cengkeh yang ada, itu pun bagi yang punya. Dan ketika stok akhirnya habis, batang daun cengkeh, bahkan garam (demi mempertahankan bunyi *keretek-keretek*), terpaksa digunakan agar roda industri bisa tetap merangkak.

Keadaan semakin gelap karena Jepang menyita banyak perusahaan kretek. Salah satu yang disita adalah NV Bal Tiga, perusahaan Nitisemito.

14 Pahan, Iyung, *Panduan Lengkap Kelapa Sawit*, Penebar Swadaya, Jakarta: 2008, hal. 44.

Hampir semua aset Bal Tiga disita Jepang. Masa pendudukan Jepang menjadi titik nadir bagi industri kretek secara keseluruhan.

Agresi Militer Belanda

Maret 1945. Setelah posisinya terdesak dalam Perang Dunia, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Anggotanya terdiri dari pemimpin berbagai macam aliran pemikiran, seperti Radjiman, Soekarno, Hatta, Wachid Hasyim, dan M. Yamin. Tanggal 1 Juni 1945, di depan BPUPKI, Soekarno mendapat kesempatan untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka—kelak tanggal ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Kejayaan kretek tersirat melalui penyebutan nama Nitisemito oleh Soekarno dalam pidatonya: "Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia."

Tanggal 6 Agustus 1945, bom *Little Boy* dengan bahan ledak uranium menghantam Hiroshima. Menyusul kemudian tanggal 9 Agustus 1945, bom *Fat Man* dengan bahan ledak plutonium menghajar Nagasaki. Ratusan ribu orang tewas, sedangkan ratusan ribu lainnya tersiksa akibat efek radioaktif. Kekalahan Jepang sudah di ambang mata.

Soekarno, Hatta, dan Radjiman pun terbang ke Saigon menemui Panglima Tertinggi Terauchi. Terauchi menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi tanggal 15 Agustus 1945, Jepang keburu menyerah tanpa syarat pada Sekutu. Skenario kemerdekaan Indonesia versi Jepang berantakan.

Indonesia dihadapkan pada situasi kekosongan kekuasaan; Jepang yang berkuasa telah menyerah, sementara pihak Sekutu tidak menaklukkan kembali Indonesia. Dengan cepat, di luar perkiraan pihak asing mana pun, Indonesia membuat manuver dan menciptakan skenario kemerdekaannya sendiri. Tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan diproklamirkan, disusul pengibaran bendera merah-putih dan kumandang

lagu Indonesia Raya.

Bagaimanapun, secara ekonomi, Indonesia tetap penting bagi Belanda. Semua tentang pasar, bahan mentah, dan penanaman modal. Kepentingan ini membuat Belanda enggan melepaskan cengkeraman kukunya di tanah air. Dengan membonceng Sekutu, Belanda kembali ke Indonesia, dan dengan cepat menguasai beberapa daerah penting. Pelabuhan-pelabuhan besar dikuasai. Blokade ekonomi diberlakukan. Arus keluar-masuk barang ditutup. Tidak hanya hubungan antarnegara, hubungan antarpulau pun jadi sangat sulit bagi Indonesia.

Lagi, industri kretek kemudian dihadapkan pada persoalan mendasar seperti di zaman Jepang; sulitnya akses bahan baku. Perkebunan tembakau belum pulih, impor cengkeh apalagi. Akibatnya, sepanjang masa agresi, industri kretek hanya berkembang di kota-kota yang dikuasai Belanda, seperti Surabaya, Malang, dan Semarang. Tidak adanya blokade ekonomi di situ memungkinkan industri melakukan impor cengkeh. Tahun 1947 – 1948, terjadi impor cengkeh secara besar-besaran dari Zanzibar.

Sementara itu, blokade telah memukul telak perekonomian Indonesia secara umum, tidak hanya bagi industri kretek. Di kota-kota lain yang tidak dikuasai Belanda seperti Kudus, mengakses cengkeh impor sama sekali mustahil. Industri kretek di Kudus menyiasatinya sebagaimana ketika zaman Jepang. Akibatnya, kualitas kretek produksi Kudus kalah jauh dibanding kretek produksi Surabaya, Malang, dan Semarang.

Baru setelah agresi militer Belanda yang kedua, industri kretek di Kudus bisa mengakses cengkeh impor. Kudus jatuh ke kekuasaan Belanda akhir tahun 1948. Setahun berikutnya, impor cengkeh masuk ke Kudus.

Negara Baru

27 Desember 1949. Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia. Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan dalam genggamannya. Tahun berikutnya, Presiden Soekarno mengumumkan

pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Konstitusi RIS diganti Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.

Keadaan sosial, ekonomi, dan politik pada masa itu sungguh sulit. Perang telah menghancurkan banyak infrastruktur, sementara jumlah penduduk bertumbuh cepat, tingkat buta huruf tinggi, jumlah orang terpelajar hanya beberapa ribu saja, hutang hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) cukup besar, nilai rupiah jatuh, kegiatan ekspor menurun, inflasi melaju, dan krisis devisa terus berlanjut.

Di berbagai daerah, ketegangan politik muncul dan seringkali berujung pada konflik senjata, di antaranya: Andi Aziz di Sulawesi Selatan, Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku, Darul Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia (TII) di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan, dan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)/Perjuangan Semesta (Permesta) di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, dan Sulawesi Utara.

Demokrasi parlementer terus dilanda instabilitas. Kabinet berganti-ganti dalam waktu singkat; Natsir, Sukiman – Suwirjo, Wilopo, Ali Sastroamidjojo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamidjojo II, dan Djuanda. "Jadi, impian tentang bangsa mulai saling bertabrakan, kita susah mengatakan siapa yang benar," kata sejarawan Taufik Abdullah, "Tetapi rasanya negara tidak bisa disalahkan karena negara yang baru merdeka ini ingin mewujudkan negara yang tertib, demokratis dan membangun."[15]

Dekrit Presiden keluar. Demokrasi Parlementer berakhir, UUDS 1950 dikembalikan ke Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Indonesia memasuki periode baru yang dikenal dengan Demokrasi Terpimpin. Sementara itu, konfrontasi dengan Belanda soal Irian Barat berlanjut, bahkan makin memanas. Berikutnya konfrontasi dengan Malaysia, yang juga diikuti langkah Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

15 "*Taufik Abdullah, Sejarawan dan Peneliti*", http://urangminang.wordpress.com/2008/01/03/taufik-abdullah/ (diakses tanggal 16 Mei 2011).

Rentetan gejolak dan ketegangan politik ini mencapai puncaknya begitu peristiwa 30 September 1965 meletus. Saat itu, perekonomian sudah benar-benar kacau. Inflasi sangat tinggi. Harga beras melonjak sampai 900 persen, sementara harga barang-barang secara umum naik 500 persen.[16] Antrian beras, minyak, gula dan barang-barang kebutuhan lain terlihat di banyak tempat. Sejarah kemudian mencatat berbagai kerusuhan, pembunuhan—bahkan pembantaian massal—mewarnai pergantian kekuasaan di Indonesia.

Industri kretek tumbuh dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang sulit. Kenyataan tersebut masih ditambah harga cengkeh yang kembali melejit akibat gagal panen di Zanzibar dan dampak Perang Korea. Tetapi secara keseluruhan, industri kretek justru berkembang. Jumlah produksi kretek tidak kalah dengan tahun-tahun terakhir sebelum Perang Dunia II, bahkan jauh melampauinya di tahun 1959 – 1963. Jumlah produksi tahun 1939 diperkirakan sebanyak 15,14 miliar batang. Melihat impor cengkeh yang terjadi di sekitar tahun itu, bisa diperkirakan jumlah produksi kretek, kalaupun lebih besar, tidak akan jauh dari angka di tahun 1939. Sementara jumlah produksi di tahun 1959 – 1963 berturut-turut adalah 21,22 miliar batang, 21,37 miliar batang, 20,22 miliar batang, 19,30 miliar batang, dan 20,71 miliar batang.[17]

Selain peningkatan jumlah, produksi kretek juga meluas ke luar Jawa. Tahun 1961, perusahaan kretek telah berdiri di Karesidenan Sumatera Timur, Bali, dan Lombok. Jumlah produksi kretek di daerah-daerah tersebut mencapai hampir 1,4 miliar batang dari total 20,22 miliar batang di tahun 1961.

Berkembangnya industri kretek berpengaruh besar terhadap penerimaan negara dari cukai tembakau yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikannya bahkan fantastis, hampir 2000 persen dari tahun 1951 ke tahun 1962, seperti tampak dalam tabel di bawah ini:

16 "Era Baru, Ekonomi Menjadi Panglima", http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh= V1gDXVZSAg5Q (diakses tanggal 16 Mei 2011).

17 Castles, op. cit., hal. 171.

Tahun	Cukai Tembakau
1951	Rp. 46.920.000,-
1952	Rp. 63.11o.000,-
1953	Rp. 84.220.000,-
1954	Rp. 101.610.000,-
1955	Rp. 102.900.000,-
1956	Rp. 123.360.000,-
1957	Rp. 153.790.000,-
1958	Rp. 205.750.000,-
1959	Rp. 244.930.000,-
1960	Rp. 508.320.000,-
1961	Tidak ada data
1962	Rp. 920.050.000,-

Sumber: Lance Castles, *Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*, 1982.

Catatan penting lain dari masa ini adalah meningkatnya produksi cengkeh dalam negeri. Sejak bibit cengkeh Maluku "dicuri" kemudian ditanam di Zanzibar akhir abad XVIII, terlebih sejak permintaan cengkeh dunia menurun drastis di pertengahan abad XIX, produksi cengkeh dalam negeri melemah, bahkan nyaris mati suri. Baru ketika industri kretek menjamur di awal abad XX, produksi cengkeh dalam negeri bangkit dan kembali menunjukkan peran dalam perekonomian. Namun sayang, perannya masih kecil. Permintaan atas cengkeh—yang sebagian besar datang dari industri kretek—lebih banyak dipenuhi dengan mengimpor, utamanya dari Zanzibar. Sebagai gambaran, produksi cengkeh dalam negeri di tahun 1925 hanya 331 ton, sementara impor cengkeh 13.000 ton.[18] Kemudian di tahun-tahun terakhir sebelum Perang Dunia II, produksi cengkeh dalam negeri hanya berkisar antara 500 – 1000 ton[19] (bandingkan dengan data impor cengkeh selama tahun 1935 – 1940).

18 Hanusz, op. cit., hal. 69.
19 Castles, op. cit., hal. 169.

Lepas dari tahun 1952, produksi cengkeh dalam negeri semakin besar dan mulai menunjukkan rasio perbandingan yang lebih kecil dengan impor. Hingga di tahun 1962, rasio perbandingannya sempat sangat kecil, bahkan di tahun 1960 dan 1962 produksi cengkeh dalam negeri lebih besar dari impor. Angin segar itu tentu tidak lepas dari perkembangan industri kretek, yang juga menunjukkan produktivitas bagus, sebagai penentu sebagian besar permintaan cengkeh.

**Cengkeh Impor dan Produksi Dalam Negeri;
Produksi Kretek, 1952 – 1962**

Tahun	CENGKEH (Ton)		PRODUKSI KRETEK (Miliar Batang)	
	Impor	Produksi Dalam Negeri	Sebenarnya	Perkiraan
1952	6200	6100	Tidak ada data	Tidak ada data
1953	3300	3200	Tidak ada data	14,64
1954	7700	6500	Tidak ada data	Tidak ada data
1955	6800	2500	17,34	Tidak ada data
1956	12700	4000	Tidak ada data	Tidak ada data
1957	7200	5100	Tidak ada data	18,30
1958	8300	3800	Tidak ada data	Tidak ada data
1959	6300	5600	21,22	Tidak ada data
1960	6900	7300	21,34	Tidak ada data
1961	9000	7400	20,22	Tidak ada data
1962	5000	7600	19,30	Tidak ada data

Sumber: Lance Castles, *Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*, 1982.

Catatan penting lain dari masa ini adalah perlindungan pemerintah yang diberikan kepada industri kretek, khususnya dalam menghadapi industri rokok putih sebagai pesaingnya. Pajak diferensial ala pemerintah kolonial tetap dipertahankan, bahkan diferensiasinya lebih mencolok di akhir tahun 1950-an. Tahun 1950, rokok yang dibuat dengan mesin dikenakan pajak 50 persen dari harga eceran, sementara kretek hanya 40 persen. Tahun 1959, pungutan untuk rokok buatan mesin tetap 50

persen, sedangkan kretek turun menjadi 20 persen. Yang juga turut memengaruhi adalah pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik asing terutama milik Belanda, Inggris, dan Amerika, di mana Jacobson van den Berg dan BAT tak lepas dari pengambilalihan tersebut.

"Revolusi" Kretek

Sejak kemerdekaan Indonesia, yang pertama di tahun 1945, dan berikutnya di tahun 1950 dalam bingkai hukum internasional, untuk pertama kalinya pergantian kekuasaan terjadi di Indonesia. Pergantian yang berlumur darah, dan menjadi sejarah paling kelam dalam perjalanan bangsa Indonesia. Jutaan orang tewas dibantai tanpa proses peradilan. Sampai sekarang tidak pernah ada jumlah pembunuhan massal sebesar itu, tidak pernah ada tingkat kegilaan kolektif seperti itu juga.

Demokrasi Terpimpin jatuh, Orde Baru berkuasa. Kiblat ekonomi berubah. Bantuan keuangan dalam jumlah besar mengucur dari negara-negara barat. Sebagai kompensasi, Orde Baru mengangkat World Bank (WB) dan International Monetary Fund (IMF) sebagai mentor perekonomian Indonesia. Dalam perjalanannya, WB dan IMF terus memuji kebijakan-kebijakan yang diambil Orde Baru, apalagi ditambah kehadiran ahli-ahli ekonomi Indonesia lulusan Universitas Berkeley yang memainkan peran penting dalam berbagai kebijakan.

Perubahan kiblat ekonomi juga berarti dikembalikannya perusahaan-perusahaan milik Inggris dan Amerika Serikat yang diambil alih di era pemerintahan Soekarno. Salah satu perusahaan tersebut adalah BAT, produsen rokok putih terbesar di Indonesia. Tahun 1968 – 1969, BAT segera menjadi lokomotif rokok putih yang melesat cepat hingga mendesak kretek. Sejak awal ditemukan, segmen kretek memang untuk kalangan menengah ke bawah. Namun keadaannya menjadi lebih parah di masa ini. Citra dan prestise rokok putih, terutama merek internasional, telah menenggelamkan kretek. Mark Hanusz menggambarkan: *"Even if they personally liked the taste of kretek, well-to-do Indonesians in the 1960s would light up a white cigarette in public and only enjoy their kretek in the*

privacy of their home."[20]

Ancaman seperti awal tahun 1930-an berulang. Tahun 1970, hanya tiga tahun setelah BAT dikembalikan, rokok putih telah menguasai 40 persen pasar rokok Indonesia. Tetapi industri kretek kembali mendapat perlindungan pemerintah. Perbaikan ekonomi yang dicanangkan di awal kekuasaan Orde Baru tidak bisa tidak mempertahankan industri kretek. Menimbang kebutuhan cengkeh yang tinggi dikarenakan industri kretek, tahun 1970 swasembada cengkeh dicanangkan untuk mengurangi impor dan menguatkan devisa. Kemudian, dari *oil booming* di tahun 1974, pemerintah mengucurkan pinjaman lunak bagi industri kretek. Pinjaman itu digunakan industri kretek untuk menambah investasi. Revolusi kretek terjadi. Dimulai dari perusahaan besar, yaitu Djarum tahun 1976, Gudang Garam tahun 1978, lalu Sampoerna tahun 1984, pemerintah memberikan izin mekanisasi industri (Bentoel sudah lebih dulu melakukannya di tahun 1968). Sejak saat itu pula, kretek mulai menggunakan filter. Ditambah kemasan yang jauh lebih bagus dan iklan yang mengubah citra maupun prestisenya, kretek akhirnya berhasil menggusur rokok putih dari konsumsi kalangan elit. Citra kretek sebagai konsumsi kalangan menengah ke bawah, yang selalu lekat sejak ditemukan oleh Hadji Djamhari, lenyap sudah.

Kejayaan kretek kemudian dipastikan melalui program transmigrasi pemerintah Orde Baru mulai dekade tahun 1970-an. Secara "tidak sengaja", transmigrasi mengantarkan distribusi kretek secara luas ke daerah-daerah di luar Jawa, membuat kretek semakin tak tertandingi rokok putih dan menjadi primadona di negerinya sendiri.

Krisis Moneter

Sampai tahun 1997, industri kretek telah mencatat banyak kemajuan dan melesat jauh meninggalkan industri rokok putih. Swasembada cengkeh telah dinyatakan berhasil tahun 1991, di mana terjadi perluasan lahan yang mencolok, dari 82.387 Ha tahun 1970 menjadi 724.986 Ha tahun

20 Hanusz, op. cit., hal. 25.

1990.[21] Indonesia semakin mempertegas posisinya sebagai penghasil cengkeh terbesar di dunia, meninggalkan Zanzibar dan Madagaskar, sekaligus menghapus ketergantungan tinggi industri kretek atas impor cengkeh.

Di sisi lain, sejak awal industri kretek hidup dari pasokan tembakau dalam negeri. Meskipun Indonesia tidak termasuk dalam 10 besar negara penghasil tembakau terbesar di dunia, tetapi industri kretek tidak pernah punya ketergantungan tinggi pada impor tembakau. Tembakau impor sebagian besar dipasok untuk kebutuhan produksi rokok putih.

Keadaan di atas memantapkan industri kretek. Seluruh proses produksi dari hulu ke hilir, mulai dari bahan baku—tembakau dan cengkeh—sampai produk akhir—kretek—dikerjakan di dalam negeri. Seluruh lini produksi dipastikan menyerap tenaga kerja dan memberi nilai tambah bagi perekonomian. Tak heran, ketika krisis finansial melanda Asia, industri kretek menunjukkan ketangguhannya.

Krisis berawal dari Thailand. Pasar saham dan mata uang Baht jatuh. Krisis segera menjalar ke Indonesia. Nilai rupiah anjlok sampai Rp 16.000 per dolar Amerika di akhir Januari 1998. Bursa saham Jakarta hancur. Hampir semua perusahaan modern di Indonesia bangkrut, tabungan kelas menengah lenyap, dan jutaan pekerja diberhentikan dari pekerjaan mereka. Inflasi besar-besaran segera menyulut kerusuhan di banyak tempat, hingga Sang Jenderal yang telah berkuasa selama 32 tahun akhirnya tergulingkan.

Secara teoretik, industri dengan muatan impor *(import content)* tinggi akan mengalami guncangan sangat keras pada saat terjadi guncangan ekonomi global.[22] Sebaliknya, industri dengan basis material dalam negeri seperti kretek akan cenderung aman dari guncangan. Berbeda dengan industri nasional lain yang juga kuat, katakanlah industri mi instan dan industri besi baja. Bahan baku industri mi instan (gandum) hampir seluruhnya impor. Begitu juga dengan bahan baku industri besi baja. Sementara industri kretek, meskipun ada muatan impor namun

21 "*Ringkasan Eksekutif Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Cengkeh*", Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, 2007.

22 Topatimasang, op. cit., hal. 3.

kecil sekali, hanya sekitar 4 persen saja.[23] Muatan impor yang rendah dari keseluruhan bahan baku produksinya membuat industri kretek menjadi salah satu sektor perekonomian yang paling kuat bertahan dari terpaan krisis.

Dalam catatan Sumarno dan Kuncoro,[24] pendapatan negara dari cukai rokok—yang mayoritasnya dibayarkan oleh industri kretek—justru meningkat, dari Rp 4,153 triliun di tahun 1996 menjadi Rp 4,792 triliun di tahun 1997 dan Rp 7,391 triliun di tahun 1998. Tiga raksasa kretek, yaitu Sampoerna, Gudang Garam, dan Djarum, juga tergolong sebagai 10 perusahaan Indonesia yang dikategorikan bekerja prima di antara 200 perusahaan terbaik di kawasan Asia tahun 1999 – 2000, versi majalah Far Eastern Economic Review (FEER). Sementara, dalam catatan Tri Wibowo, [25] selama masa krisis (1997 – 2002), rata-rata pertumbuhan jumlah perusahaan industri kretek naik sebesar 1,85 persen, di mana kenaikan terbesar terjadi di tahun 1998 sebesar 5,26 persen. Selama masa krisis itu pula, rata-rata pertumbuhan pekerja industri kretek meningkat sebesar 4,43 persen per tahun, di mana peningkatan terbesar terjadi di tahun 1998 sebesar 9,73 persen.

Krisis finansial Asia, atau di Indonesia lebih dikenal sebagai krisis moneter, telah menjadi ajang pembuktian ketangguhan industri kretek untuk yang kesekian kalinya. Industri kretek yang lahir di zaman kolonial sebelumnya juga telah melewati berbagai terpaan badai: Perang Dunia I, Depresi Besar tahun 1930-an, penjajahan Jepang (Perang Dunia II), Agresi Militer Belanda, masa penuh kekacauan negara baru, dan suksesi berdarah 1965 – 1966. Melewati sekian cobaan itu, industri kretek tidak saja menunjukkan kemampuannya untuk bertahan. Ia bahkan semakin kuat, terutama setelah bahan baku mampu dicukupi oleh produksi dalam negeri. Para pelaku usaha rokok putih (rokok asing) tentu lebih bisa bercerita banyak soal itu.

---

23 Ibid., hal. 4.

24 *"Struktur, Kinerja, dan Kluster Industri Rokok Kretek: Indonesia, 1996-1999"*, Simon Bambang Sumarno, Mudrajat Kuncoro, http://www.mudrajad.com/upload/journal_struktur-kinerja-kluster-industri-rokok.pdf (diakses tanggal 16 Mei 2011).

25 *"Potret Industri Rokok Di Indonesia"*, Tri Wibowo, http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/Tri-2.pdf (diakses tanggal 16 Mei 2011).

Pada pengujung milenium kedua, lolos dari rangkaian badai dan krisis yang menerpanya, dapat disimpulkan bahwa memang tidak ada industri nasional yang berkarakter seperti industri kretek: seluruhnya modal dalam negeri, berproduksi di dalam negeri, sebagian besar bahan bakunya dari dalam negeri, dari hulu ke hilir melibatkan puluhan juta tenaga kerja di dalam negeri, mayoritas hasil produksinya dipasarkan di dalam negeri, dan menjadi raja di negeri sendiri dengan menguasai nyaris 90 persen pasar rokok.[26] Karena itu, mempertimbangkan seluruh karakter tersebut, layak rasanya mendudukkan industri kretek di atas industri nasional lain.

26 *"Produksi Lokal Turun, Rokok Ilegal Makin Marak"*, http://preview.detik.com/detiknews/read/2006/09/01/135941/667059/4/produksi-lokal-turun-rokok-ilegal-makin-marak(diakses tanggal 16 Mei 2011).

Kesaksian WS Rendra

Sidang Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Selasa, 28 April 2009

Assalamualaikum wr. wb. Dan juga salam sejahtera untuk semuanya. Hormat saya untuk Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan para hakim-hakim dari Mahkamah Konstitusi yang bersidang hari ini.

Tembakau itu sesuatu tanaman asing yang dipaksakan ditanam di Indonesia untuk pembentukan modal bagi kekuatan merkantilisme dan industri di negeri Belanda yang waktu itu menjajah Indonesia. Sebagai penjajah, *Nederlandse Indie* akan menjadikan Indonesia sebagai perkebunan raya yang menghasilkan hasil agraria yang nanti akhirnya menjadi modal bagi pembentukan industri dan kekuatan merkantilisme di Ibu Negeri jajahan.

Orang Indonesia menanam tanaman-tanaman seperti kopi, lalu termasuk tembakau dan lain sebagainya tanpa dia bisa mengekspornya sebagai tanaman yang sangat menguntungkan perdagangan luar negeri. Bayangkan saja para petani tembakau, getah, gula dan lain sebagainya tidak bisa mengekspornya, harus disetor kepada penjajah dan merekalah yang akan mengekspornya. Kita menanam tembakau dan kopi, tetapi yang menentukan harga dan penggunaan produk itu adalah Bremen dan Antwerpen. Jadi sebetulnya tertekan sekali keadaan para penanam tembakau itu, dari dahulu sampai sekarang. Tetapi kreativitas dari para leluhur dan para penduduk Indonesia luar biasa. Tembakau dicampur dengan klembak, tembakau dicampur dengan cengkeh, menjadi rokok klembak, menjadi rokok cengkeh dan ini suatu kreativitas yang luar biasa.

Dari segi kebudayaan harganya sangat tinggi kreativitas semacam ini. Ini menunjukkan daya adaptasi bangsa Indonesia yang ternyata bangsa yang tidak asli, bahasanya tidak asli, tanaman tidak asli, mulai dari padi sampai irigasi, mentok, itik, semua tidak asli, sapi tidak asli, tetapi toh bisa diadaptasi dengan kreatif. Singkong tidak asli, tetapi lihat saja, singkong bisa jadi lemet, jadi macam-macam. Itu harus ada tempat untuk diperkembangkan dan dihargai daya adaptasi bangsa. Bangsa yang tidak asli roh, batin, sukma, raga, nama-nama Soekarno, Soeharto, Muhammad Yamin, semua tidak asli, Rendra tidak asli, tetapi toh bisa melahirkan kepribadian yang asli. Ini aspek budaya yang harus dihargai dan diperkembangkan.

Rokok kretek. Rokok kretek itu sekarang dalam masa krismon bisa bertahan dengan baik karena cengkehnya dari dalam negeri, kertasnya dalam negeri, tembakau dalam negeri, saosnya dalam negeri, lalu konsumennya yang terbesar dalam negeri, sehingga akhirnya menjadi suatu kekuatan ekonomi yang baik. Tentu saja sebagai seniman dan budayawan saya sangat menghargai, sangat mempertimbangkan sekali proses pembangunan. Maka saya menganggap bahwa *survival* dari rokok kretek ini membantu kekuatan pembangunan Indonesia.

Bayangkanlah sejak dari zaman Hindia Belanda sampai sekarang kita hidup dalam tatanan pembangunan, tatanan pemerintahan, tatanan hukum, yang berasal dari Hindia Belanda, tidak mandiri. Bukannya tidak punya ahli hukum, ahli tata negara atau ahli ekonomi, tetapi nyatanya masih terbelenggu dengan tatanan penjajahan. Hukum yang kita miliki tidak bisa membela Pancasila, padahal Pancasila sangat penting. Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, sekarang sudah ada hukum-hukumnya. Tetapi pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat, pelanggaran terhadap keadilan sosial, kalau dilanggar tidak ada hukumnya.

Nah, dalam ekonomi kita tidak pernah membangun industri hulu, tidak pernah membangun modal dalam negeri, infrastrukturnya saja tidak ada. Karena apa? Karena kita terikat pada hukum penjajah Ordonansi Pajak 1925. Industri dibangun dengan tidak membangun industri hulu, dengan tidak membangun modal dalam negeri, karena

modal didatangkan dari Ibu Negeri, dari Belanda, alat produksi dari Hindia Belanda, bahan baku didatangkan dari Hindia Belanda, padahal bahan mentahnya diisap dari Indonesia. Itu berlangsung sampai sekarang. Ordonansi Pajak 1925 cuma diubah namanya menjadi Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Lalu sekarang, ya hal ini tentu saja akan dipelihara oleh kekuatan-kekuatan kapitalisme liberal yang pada dasarnya inti penjajahan yang menguasai kita. Sekarang ada kesempatan bahwa ternyata kita memiliki industri rokok cengkeh yang tidak gampang terserang krismon karena kemandiriannya dalam bahan baku, di dalam proses berproduksi, dan di dalam konsumen.

Ini harus kita dukung, secara budaya harus kita dukung, inilah kesempatan kita mandiri, tentu saja ini tidak mengenakkan. Pengertian hegemoni global dari dunia kapitalisme liberal barangkali juga kapitalisme komunis, kapitalisme partai juga lama-lama tidak akan mengizinkan. Dunia dikuasai oleh dua macam kapitalisme sekarang ini, kapitalisme liberal dan kapitalisme komunis, kapitalisme partai yang tidak ramah pada alam, pada lingkungan, tidak ramah pada buruh, tidak ramah pada desa, tidak ramah pada agraria dan berorientasi pada kekuatan pasar, dominasi pasar.

Dalam pergulatan, perspektif pergulatan kekuasaan ekonomi global semacam ini yang satu menganjurkan globalisasi yang lain menganjurkan revolusi internasional. Globalisasi di mana saja kapan saja sepanjang sejarah umat manusia selalu bersifat imperialistik dan menekan hak asasi manusia, menekan keadilan sosial. Jadi sekarang seandainya pemerintah itu bijaksana dan waspada, seandainya pemerintah memang mempunyai *industrial tree* tidak hanya sekadar pembangunan yang tanpa arah.

Mereka bisa manfaatkan sekarang industri yang bisa berdiri di kaki sendiri ini, ini dibesarkan, dilindungi termasuk caranya beriklan segala macam dilindungi. Lalu kemudian mereka sebetulnya bisa diberi kesempatan menjadi *captain of industry*, menjadi pintu untuk berdirinya kekuatan nasional, pintu untuk pembentukan modal nasional, modal dalam negeri, supaya mereka akhirnya bisa membantu juga membantu industri hulu, supaya ekspansi dari usaha mereka tidak hanya *furniture*,

tidak hanya *real estate* seperti mana ditekan-tekan waktu Orde Baru karena industri-industri kunci dikuasai oleh beberapa cukong saja dan diawasi oleh kekuatan luar negeri.

Tapi sekarang kalau datang masanya kita akan membereskan diri, kita harus mencari kekuatan ekonomi apa yang bisa memelopori pembentukan industri modal dalam negeri dan lalu membentuk industri hulu. Krakatau Steel misalnya, kenapa tidak dibangun oleh kekuatan-kekuatan yang mampu membentuk modal dalam negeri. Krakatau Steel tidak bisa mengolah *steel* apa itu? Tidak bisa mengolah pasir besi. Apa itu? Lambang-lambang penjajahan saja, tipu-tipu dari kaum penjajah saja.

Nah, kalau akhirnya ini ada kekuatan bisa membentuk modal dalam negeri, bisakah kau sekarang bikin industri hulu? Bisakah Krakatau Steel diperbaiki, listrik diperbaiki, bendungan-bendungan diperbaiki, *airport*, alat dan sarana-sarana komunikasi semua diserahkan kepada perusahaan-perusahaan semacam ini, itu kan menguntungkan sekali. Oleh karena itu, dari segi etika dan dari segi hukum yang bebas dari aspirasi penjajah kita harus menaruh perhatian kepada faktor ini dan akhirnya kalau alasannya kesehatan dan lain sebagainya tidak *fair*. *Junk food* merajalela tapi karena itu ulah dari kekuatan asing ya dilindungi, tapi kekuatan-kekuatan dalam negeri di mana saja akan ditekan demi hegemoni utara, hegemoni kekuatan pembangunan, kapitalisme liberal, ataupun kapitalisme partai.

Saya kira kita sebagai bangsa harus melawan kekuatan itu dan harus dengan rajin dan dengan setia, dengan semangat patriotik membela kesempatan-kesempatan bangsa kita untuk bangkit terutama di bidang ekonomi pembangunan. *Wassalamualaikum wr. wb.*

KRETEK

Di Tengah Medan Perang Global Melawan Tembakau

Maka, pelan-pelan saya menyadari, bisnis ini lebih dari sekadar berharga untuk dimusuhi dan juga lebih dari layak dirampas dengan berbagai cara.
(Mohamad Sobary)

Mei 1998. Suksesi kekuasaan kedua dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia terjadi. Kembali, seperti yang pertama, suksesi merenggut banyak air mata, darah, dan nyawa. Kekacauan ekonomi dan politik menggulirkan serentetan demonstrasi, penculikan, dan kerusuhan di berbagai tempat. Nilai tukar rupiah anjlok, hutang luar negeri tinggi, manajemen dalam negeri buruk, masih diperparah dengan melambungnya harga-harga kebutuhan pokok yang memunculkan keresahan sosial luar biasa.

Kekacauan berbuntut panjang hingga di tahun-tahun berikutnya. Tiba-tiba, pertengahan tahun 1999, isu kontrol tembakau menyeruak ke permukaan. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan sudah siap dan segera ditetapkan. Iklan, promosi, dan *sponsorship* diatur. Peringatan kesehatan harus dicantumkan dan harus mudah dibaca. Larangan merokok diberlakukan di tempat-tempat tertentu. Penjualan rokok dibatasi. Kadar kandungan tar dan nikotin juga dibatasi di level maksimum 20 mg (tar) dan 1,5 mg (nikotin).

Industri kretek terpukul. Kretek tidak mungkin mengikuti pembatasan kadar kandungan tar dan nikotin seperti diatur RPP tersebut. Kadar kandungan tar dan nikotin pada kretek sangat tinggi, apalagi kretek buatan tangan. Sebaliknya, industri rokok putih sangat diuntungkan. Kadar kandungan tar dan nikotin rata-rata rokok putih memang sudah rendah. Terjadi perseteruan antara Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri)—yang mewakili kekuatan industri kretek—dan Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia (Gaperindo)—yang

mewakili kekuatan industri rokok putih.[1] Menurut Gappri, untuk menuruti pembatasan itu, tembakau untuk kretek mau tidak mau harus diganti dengan tembakau Virginia, bahan baku rokok putih selama ini. Dan kalau diganti, citarasa kretek yang selama ini menggunakan tembakau lokal Indonesia akan sama sekali berubah, bahkan bisa jadi bukan kretek lagi. Gappri kemudian menuding Gaperindo ada di balik pembatasan itu. Gaperindo tentu saja mengelak. Menurut Gaperindo, pembatasan itu memang akan menguntungkan rokok putih. Namun itu murni lahir dari rekomendasi Badan Kesehatan Dunia.

Gaperindo boleh saja mengelak. Tetapi, yang tak kalah penting untuk digarisbawahi dan dicermati, RPP tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan menyebut bahwa aturan pembatasan kadar kandungan tar dan nikotin akan berlaku setahun sejak ditetapkan. Itu sama saja membunuh industri kretek secara cepat. Ditambah dengan kenyataan bahwa rokok putih sepanjang sejarah tidak pernah bisa menggeser pasar kretek, serta rapuhnya landasan ilmiah (kalau tak boleh dibilang menyesatkan) dari slogan *"low tar – low nicotin"*, kecurigaan Gappri menjadi sangat beralasan. Dengan membonceng pada isu kesehatan, bisa disimpulkan bahwa industri rokok putih telah diam-diam berusaha memenangkan persaingan melalui lobi-lobi di tingkat kebijakan.

Perang Global Melawan Tembakau

Bagaimanapun keras dan liatnya perdebatan tentang beleid baru ini, pemerintah seolah-olah menutup mata. RPP tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan akhirnya ditetapkan di bulan Oktober 1999. Lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 (PP 81/1999) sebagai anak sulung kebijakan kontrol tembakau di Indonesia. Masa penyesuaian pembatasan kadar kandungan tar dan nikotin memang direvisi, menjadi lima tahun bagi industri besar, dan sepuluh tahun bagi industri kecil. Tetapi tak bisa tidak, industri rokok putih tetap di atas

1 *"Kalau Kretek tak Lagi Kemripik"*, http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1999/05/31/EB/mbm.19990531.EB95624.id.html (diakses tanggal 20 Juni 2011).

angin. Lebih mendasar daripada itu, lahirnya PP 81/ 1999 menandai bahwa perang global melawan tembakau telah merambah Indonesia.

Di balik itu, sedikit saja yang tahu bahwa perang global melawan tembakau sesungguhnya bermula dari persaingan bisnis nikotin antara industri farmasi dengan industri tembakau di Amerika Serikat. Nikotin menjadi bisnis baru yang menggiurkan. Miliaran dolar AS berputar di situ. Kenneth Warner, John Slade, dan David Sweanor dalam *"The Emerging Market for Long-term Nicotine Maintenance" (Journal of the American Medical Assn., Oct., 1, 1997),* menulis: *"…a series of technological, economic, political, regulatory, and social developments augurs a strange-bedfellows competition in which these industries (tobacco and pharmaceutical) will vie for shares of a new multibillion dollar long-term nicotine-maintenance market."*

Lebih lengkap lagi, Wanda Hamilton menelanjangi persaingan tersebut dalam bukunya, *Nicotine War* (Yogyakarta: InsistPress, 2010). Diungkapkan Wanda, di balik perang global melawan tembakau, tersembunyi kepentingan besar bisnis perdagangan obat-obat *Nicotine Replacement Therapy* (NRT) alias obat-obatan penghenti kebiasaan merokok, seperti permen karet nikotin, koyok, semprot hidung, obat hirup, dan *zyban*. Kampanye kesehatan publik *(public health)* tentang bahaya tembakau hanyalah kedok bagi kepentingan bisnis: memasarkan produk-produk NRT tersebut.

Perusahaan-perusahaan farmasi berkepentingan menguasai nikotin sebagai bahan dasar produk-produk NRT mereka. Sudah diketahui sejak lama bahwa nikotin punya banyak manfaat medis. Persoalannya, nikotin tidak bisa dipatenkan. Nikotin terkandung secara alami pada tembakau, tomat, kentang, dan banyak sayuran lain. Sayangnya, hanya senyawa "mirip nikotin" dan sarana pengantar nikotinlah yang bisa dipatenkan. Dari sini, persaingan bergulir dan membesar di tahun 1990-an.

Dengan gelontoran dolar, perusahaan-perusahaan farmasi mendorong sekian banyak riset kesehatan tentang bahaya tembakau, program-program hibah antitembakau, hingga dukungan untuk berbagai konferensi kesehatan dunia antitembakau, termasuk untuk WHO

Tobacco Free Initiative yang lahir tahun 1998.

WHO Tobacco Free Initiative disokong oleh 75 persen dana perusahaan farmasi multinasional, yaitu: Pharmacia Upjohn yang menjual permen karet nikotin, koyok transdermal, semprot hidung, dan obat hirup; Novartis yang menjual koyok habitrol; dan Glaxowelcome yang menjual *zyban*. Salah satu misi WHO Tobacco Free Initiative adalah mempromosikan WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sebagai landasan hukum internasional dalam memerangi tembakau.

Pada bulan Januari 1999, kemitraan WHO dengan ketiga perusahaan farmasi multinasional tersebut: Pharmacia Upjohn, Novartis, dan Glaxowelcome, diumumkan oleh Director-General WHO Gro Harlem Brundtland dalam pidatonya di World Economic Forum di Davos. Kemudian, bulan April 1999, WHO mengeluarkan lembar fakta yang diberi judul *"Tobacco Dependence"*, dan menyebut istilah "treatment" tak kurang dari tiga puluh enam kali. Sebuah upaya untuk menuding para perokok sebagai pesakitan yang membutuhkan perawatan demi 'kesembuhan'. Pada akhirnya, Brundtland sendiri mengakui kepentingan perusahaan-perusahaan farmasi multinasional tersebut dalam kemitraannya dengan WHO: *"They all manufacture treatment products against tobacco dependence"*—ketiga perusahaan tersebut memanukfaktur obat-obat NRT.

Sokongan dana berlanjut. Tahun 2000, Pharmacia Upjohn, Novartis, dan Glaxowelcome menggerakkan kampanye dunia memerangi tembakau dengan menggelar Konferensi Dunia tentang Tembakau dan Kesehatan ke-11 di Chicago. Kali ini, SmithKline Beecham, perusahaan farmasi yang menjual produk NRT berupa koyok nikotin, Nicoderm CQ, dan permen karet Nicorette, turut menyokong. WHO, World Bank, Centers for Disease Control, dan Cochrane Tobacco Addiction Group, memberikan dukungan di konferensi tersebut.

Sokongan dana dari perusahaan-perusahaan farmasi multinasional untuk memerangi tembakau juga melibatkan perusahaan seperti Pfizer dan Johnson & Johnson, yang sudah memulai program hibah memerangi

tembakau sejak sebelum tahun 1998.

Agresivitas perusahaan-perusahaan farmasi multinasional, tak pelak, telah berhasil menjadikan tembakau sebagai musuh kesehatan dunia. Semua keberhasilan tersebut tidak dicapai dengan nilai investasi yang kecil, memang. Tapi baru di permulaan sekali abad ke-21, keuntungan yang mereka peroleh bisa dibilang sangat spektakuler:

"Sepuluh perusahaan obat terbesar dilaporkan menghasilkan laba rata-rata 30 persen dari pendapatan—margin yang mencengangkan. Selama beberapa tahun belakangan, industri farmasi secara keseluruhan sejauh ini merupakan industri yang paling beruntung di Amerika Serikat." (Angell M, *"The Pharmaceutical Industry –To Whom Is It Accountable?" New England Journal of Medicine*, June 22, 2000.)

"Setiap tahun sejak 1992, industri obat adalah industri paling beruntung di Amerika Serikat, menurut pemeringkatan majalah *Fortune.* Selama tahun-tahun itu, besarnya imbalan pendapatan (laba sebagai persentase penjualan) industri obat rata-rata tiga kali laba rata-rata semua industri lain yang tercantum dalam *Fortune 500.*" (Public Citizen Report, "Rx R&D Myths: The Case Against the Drug Industry's R&D Scare Card," July 23, 2001.)

"Jika ditotal, kapitalisasi pasar dari empat perusahaan (farmasi) terbesar itu jumlahnya melebihi perekonomian India." (David Earnshaw, mantan direktur urusan pemerintah Eropa untuk SmithKline Beecham, kini ketua Oxfam untuk akses terhadap obat-obatan. Dikutip dalam Roger Dobson, *"Drug Company Lobbyist Joins Oxfam's Cheap Drugs Campaign,"* BMJ, 322, April 28, 2001, p. 1011.)

Potensi keuntungan tersebut masih bisa berkali lipat lebih besar di tahun-tahun mendatang. WHO terus gencar mengampanyekan perang global melawan tembakau. Apalagi, Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), perjanjian internasional pengendalian tembakau yang bersifat menyeluruh (mengatur produksi, penjualan, distribusi, iklan, hingga perpajakan tembakau), telah diadopsi oleh Majelis Kesehatan Dunia pada tahun 2003 dan mulai diberlakukan di tahun 2005. FCTC yang bermula dari WHO Tobacco Free Initiative tahun 1998 menjelma

menjadi salah satu perjanjian yang paling besar pengaruhnya dalam sejarah PBB. Tercatat 172 negara turut terlibat dalam FCTC.

Pasar Tembakau Global

Keberhasilan perusahaan-perusahaan farmasi multinasional menjadikan tembakau sebagai musuh kesehatan dunia tidak lantas mengesahkan kehancuran perusahaan-perusahaan tembakau multinasional. Sebaliknya, justru agresivitas ekspansi dan akuisisi perusahaan-perusahaan tembakau multinasional—katakanlah Philip Morris dan BAT—makin menjadi. Buku *Kriminalisasi Berujung Monopoli: Industri Tembakau Indonesia di Tengah Pusaran Kampanye Regulasi Anti Rokok Internasional* (Jakarta: Indonesia Berdikari, 2011) mencatat bagaimana agresivitas gerakan mereka:

"Pada tahun 1992 Philip Morris mengambil mayoritas kepemilikan saham di perusahaan milik negara Ceko, Tabak AS, sebesar 420 juta dolar AS, sebuah investasi tunggal terbesar oleh perusahaan Amerika Serikat di Eropa Tengah pada saat itu. Pada awal 1990-an Philip Morris mengambil bagian dalam privatisasi pabrik-pabrik rokok di negara-negara lain, termasuk Kazakhstan, Lithuania, dan Hungaria. Tahun 1995, Philip Morris membuka pabrik pertama di Seremban, Malaysia. Tahun 2003, Philip Morris membuka sebuah pabrik di Filipina, yang merupakan investasi perusahaan rokok terbesar di Asia pada saat itu. Pada tahun yang sama, Philip Morris mengakuisisi saham mayoritas di Papastratos Tobacco Company SA, produsen dan distributor rokok terbesar di Yunani. Pada tahun yang sama pula, Philip Morris memperoleh 74,22 persen dari DIN Fabrika Duvana AD Nis di Serbia, dan per Desember 2007 memegang saham dari perusahaan ini lebih dari 80 persen. Pada tahun 2005, Philip Morris mengakuisisi PT HM Sampoerna Tbk di Indonesia dan Compania Colombia de Tabaco SA (Coltabaco) di Kolombia. Kedua perusahaan itu adalah produsen rokok terbesar di negara masing-masing. Di tahun yang sama, Philip Morris mengumumkan perjanjian dengan China National Tobacco Company

(CNTC) untuk lisensi produksi Marlboro China dan pembentukan sebuah usaha ekuitas internasional bersama di luar China. Tahun 2007 Philip Morris membeli 50,2 persen saham tambahan di Lakson Tobacco Company, Pakistan, dan menjadikannya memegang total saham menjadi sekitar 98 persen.

Demikian juga halnya dengan British American Tobacco, yang pada tahun 2001 mengumumkan serangkaian investasi baru di negara-negara seperti Turki, Mesir, Vietnam, Korea Selatan, dan Nigeria. Tahun berikutnya British American Tobacco mengontrol keuntungan dari perusahaan Peru Tabacalera Nacional dan memenangkan tawaran untuk perusahaan negara mantan pemonopoli tembakau di Italia, ETI, dan Serbia Duvanska Industrija Vranje. Tahun 2004 British American Tobacco menggabungkan AS Brown & Williamson dan RJ Reynolds Tobacco Company menjadi Reynolds America, di mana British American Tobacco mengontrol 42 persen saham. Tahun 2008, British American Tobacco mengeluarkan dana 1.720.000.000 dolar AS untuk mengambil alih aset Tekel, perusahaan tembakau negara di Turki. Tahun 2009 British American Tobacco melakukan akusisi perusahaan kretek terbesar keempat di Indonesia, Bentoel, dengan nilai pembelian sebesar 580.000.000 dolar AS.

Telah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar keuntungan yang diperoleh dari hasil operasi bisnis perusahaan rokok di negara berkembang umumnya ditransfer ke kantor pusat perusahaan raksasa tersebut di negara-negara maju. Keadaan ini tentu merupakan kerugian tersendiri bagi negara berkembang dalam upaya meningkatkan pembentukan modal (*capital formation*) di dalam negerinya."

Buku tersebut juga mencatat, meskipun kampanye global melawan tembakau semakin gencar, pasar tembakau tidak lantas menurun: "Secara keseluruhan pasar tembakau global bernilai 378 milyar dolar AS, dan bertumbuh sebesar 4,6 persen pada tahun 2007. Pada tahun 2012, nilai pasar tembakau global diproyeksikan meningkat 23 persen lagi, mencapai 464,4 milyar dollar AS. Jika seluruh industri tembakau besar digabungkan dan diibaratkan sebuah 'negara', maka posisinya

akan menduduki peringkat ke-23 terbesar di dunia dalam hal produk domestic bruto (PDB), melebihi PDB dari negara-negara seperti Norwegia dan Arab Saudi."

Dan kenyataannya adalah, dalam rentang waktu 50 tahun dari 1960 – 2007, produksi daun tembakau dunia meningkat dari rata-rata 3,57 ton menjadi 6,33 juta ton per tahun, atau tumbuh rata-rata sebesar 1,21 persen per tahun. Sejalan dengan itu, produksi rokok dalam kurun waktu yang sama mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,72 persen per tahun.

Industri Kretek Nasional

Melalui PP 81/1999, perang global melawan tembakau telah merambah Indonesia. Regulasi tersebut tidak hanya didorong oleh kelompok-kelompok antitembakau yang mengusung isu kesehatan, tetapi juga oleh industri rokok putih. Lebih spesifik lagi, oleh dua perusahaan tembakau multinasional, yaitu Philip Morris dan BAT. Setelah PP 81/1999 lahir, Philip Morris yang terkenal dengan produk rokok putih Marlboro, dan BAT yang terkenal dengan Lucky Strike, berada di atas angin.

Beruntung bagi industri kretek, taring itu segera tumpul. Presiden Abdurrahman Wahid mengamandemen PP 81/1999 dengan PP 38/2000. Masa penyesuaian pembatasan kadar kandungan tar dan nikotin diubah, tidak lagi berdasarkan skala perusahaan, tetapi berdasarkan jenis rokok yang diproduksi. Jenis rokok putih diberi waktu 2 tahun, kretek buatan mesin 7 tahun, sementara kretek buatan tangan 10 tahun.

Di tahun 2003, taring itu malahan patah. Presiden Megawati Soekarnoputri melakukan amandemen ketiga melalui PP 19/2003. Pasal tentang pembatasan kadar kandungan tar dan nikotin dihapus. Setiap perusahaan hanya diharuskan melakukan ujicoba di laboratorium terakreditasi, dan mencantumkan kadar kandungan tar dan nikotin di kemasannya. Industri kretek bisa bernafas lega. Di sisi lain, kelompok-kelompok yang mengusung isu kesehatan bersuara keras. Sementara industri rokok putih, meskipun juga sangat berkepentingan, tentu tidak

mungkin bersuara terbuka di hadapan publik.

Dinamika terus terjadi. Isu kontrol tembakau terus menyesaki ruang-ruang publik. Sosialisasi melalui workshop, seminar, dialog dan lain sebagainya tentang bahaya tembakau terus berjalan. Media massa dengan cukup intens juga memberitakan berbagai riset dan wacana negatif tentang tembakau. Tokoh-tokoh antitembakau bermunculan. Mereka bersuara lantang menentang tembakau. Pelan tapi pasti, wacana tembakau yang berbahaya bagi kesehatan menjelma jadi kebenaran umum. Nyaris tidak ada wacana tandingan. Semuanya seakan *taken for granted.*

Tiba-tiba, langkah mengejutkan diambil Philip Morris. Baru tanggal 27 Februari 2005 FCTC dinyatakan efektif berlaku sebagai konvensi hukum internasional pengendalian tembakau, bulan Maret 2005 Philip Morris justru membeli 40 persen saham PT HM Sampoerna—perusahaan kretek terbesar ketiga di Indonesia. Di bulan Mei 2005, Philip Morris menambah pembelian 50 persen saham lagi. Total sejumlah 97 persen saham PT HM Sampoerna berpindah tangan. Nilai pembeliannya mencapai Rp 48, 5 triliun, dan menjadi akuisisi terbesar yang pernah dilakukan Philip Morris di dunia.[2]

Empat tahun kemudian, tepatnya bulan Juni 2009, giliran Bentoel—perusahaan kretek terbesar keempat di Indonesia—dicaplok BAT. Sebesar 85,125 persen saham berpindah tangan dengan nilai transaksi Rp. 5 triliun.[3] Masih di tahun 2009, kenaikan cukai rokok yang di-atur melalui Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 203/PMK.011/2008 membuat ratusan perusahaan kretek kecil gulung tikar.[4]

Persaingan sepanjang sejarah, yang nyaris dimenangkan melalui lobi-lobi kebijakan pada penyusunan PP 81/1999, berubah menjadi akuisisi. Jika dulu industri rokok putih menentang kretek, kini mereka

2 *"Sampoerna, Setelah Akuisisi Terbesar Itu"*, http://ip52-214.cbn.net.id/id/arsip/2005/05/23/EB/mbm.20050523.EB114038.id.html (diakses tanggal 25 Juni 2011).

3 *"Otoritas Bursa Temukan Kejanggalan Dalam Akuisisi Bentoel"*, http://www.tempo.co/hg/saham/2009/06/19/brk,20090619-182808,id.html (diakses tanggal 25 Juni 2011).

4 *"Pita Cukai Naik, Ratusan Pabrik Rokok Bertumbangan"*, http://industri.kontan.co.id/v2/read/1240460944/12267/Pita-Cukai-Naik-Ratusan-Pabrik-Rokok-Bertumbangan(diakses tanggal 27 Juni 2011).

memproduksinya. Memproduksi dengan banyak catatan, tentu. Sementara kenaikan cukai, sebagai salah satu poin penting FCTC sebagaimana tercantum di Pasal 6 tentang kebijakan harga dan cukai untuk mengurangi permintaan tembakau, telah mempersempit persaingan. Agenda kenaikan cukai susulan terus didorong oleh lembaga-lembaga internasional dan kelompok-kelompok antitembakau. Hasilnya, di tahun 2012, Kementerian Kesehatan akan kembali menaikkan cukai sampai 12,2 persen. Diprediksi akan lebih banyak lagi perusahaan kretek kecil yang gulung tikar.

Industri kretek makin terimpit. Dana puluhan miliar rupiah dari Bloomberg Initiative mengucur ke lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga-lembaga akademis di Indonesia. Bloomberg Initiative adalah lembaga yang didirikan untuk menyukseskan perang global melawan tembakau melalui penguatan kebijakan dan kemampuan pengendalian tembakau, terutama di negara berkembang dan miskin. Lima negara mendapat perhatian khusus, termasuk Indonesia. Demi mencapai tujuannya, Bloomberg Initiative membangun kemitraan dengan World Lung Foundation, Center for Tobacco Free Kids, CDC Foundation, WHO, dan John Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Bloomberg Initiative diprakarsai oleh Michael Bloomberg, seorang Yahudi Amerika Serikat, multi-miliarder, walikota New York tiga kali berturut-turut. Untuk memerangi tembakau, tahun 2006 Bloomberg mengucurkan 125 juta dolar AS. Disusul tahun 2008 sebesar 250 juta dolar AS. Dan berikutnya, bersama Bill Gates, Bloomberg sukses menghimpun donasi gabungan sebesar 500 juta dolar AS. Di sebalik citra 'mulia' yang tampak mengusung isu filantropis ini, sosok Michael Bloomberg cukup fenomenal. Untuk menjabat walikota New York yang ketiga kalinya, ia mengeluarkan dana 102 juta dolar AS. Tidak ada pejabat publik yang mengeluarkan dana sebesar itu sepanjang sejarah politik Amerika Serikat. Bloomberg memecahkan rekor dana kampanye yang ia buat sendiri. Pada kampanye tahun 2001, ia menghabiskan dana 74 juta dolar AS. Sedangkan pada kampanye tahun 2005, ia

menghabiskan 85 juta dolar AS.[5]

Michael Bloomberg terdaftar sebagai orang terkaya ke-8 di Amerika Serikat versi majalah *Forbes*. Surat kabar keuangan *TheMarker* juga menempatkannya di jajaran atas orang-orang Yahudi terkaya di dunia, bersama Mark Zuckerberg—pendiri Facebook—dan Roman Abramovich—juragan minyak, pemilik Chelsea, klub elit *English Premiere League*.

Sepintas lalu, barangkali sulit membayangkan bahwa di balik 'kemuliaannya' dalam memerangi tembakau dan memperjuangkan kesehatan dunia, Bloomberg ternyata memberi dukungan untuk operasi militer Israel ke Palestina. Ia mengunjungi Israel dan bertemu dengan Perdana Menteri Ehud Olmert serta Menteri Pertahanan Ehud Barak. "Bukti dukungan Amerika terhadap Israel dapat Anda saksikan lewat kedatangan kami ke Israel," kata Bloomberg.[6] Sikap itu menuai kutukan dari banyak kalangan, termasuk warga New York sendiri, karena operasi militer Israel menewaskan sedikitnya 800 warga Palestina—termasuk 89 perempuan dan 220 anak-anak—sementara 3.125 lainnya luka-luka.[7] Mayoritas orang yang terdaftar dalam *TheMarker* memang memiliki relasi bisnis dengan Israel dan juga terlibat dalam donasi untuk Yahudi, termasuk Michael Bloomberg.

Sementara, kepentingan perusahaan-perusahaan farmasi jelas ada di balik penggalangan donasi untuk kampanye antitembakau. Bloomberg dikenal getol membela para eksekutif farmasi yang dikambinghitamkan dalam perdebatan layanan kesehatan di New York. William R. Brody, sahabat dan penasehat Bloomberg, duduk sebagai direktur Novartis, salah satu perusahaan farmasi terbesar di dunia.[8]

5 *"Michael Bloomberg: Rp. 953,3 Miliar Demi Bertahan Jadi Walikota"*, http://dunia.vivanews.com/news/read/109578-rp_959_3_miliar_demi_bertahan_jadi_walikota (diakses tanggal 25 Juni 2011).

6 *"Kunjungan Walikota New York Sebagai Dukungan Serangan Israel"*, http://www.suaramedia.com/berita-dunia/dunia-islam/3198-kunjungan-walikota-new-york-sebagai-dukungan-serangan-israel.pdf (diakses tanggal 25 Juni 2011).

7 Ibid.

8 *"Partai Nazi",* http://www.beritasatu.com/articles/read/2010/11/1534/partai-nazi- (diakses tanggal 25 Juni 2011). Lihat juga "John Hopkins President To Retire at End of Year", http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/03/10/AR2008031002686.html (diakses tanggal 25 Juni 2011).

Berikut daftar penerima dana Bloomberg Initiative di Indonesia:[9]

Policy Advocacy for Effective Tobacco Tax and Price Measures in Indonesia **Demographic Institute; Faculty of Economics; University of Indonesia** To influence the policy-makers in Indonesia for undertaking effective tobacco tax and price policy. This will be achieved through relevant advocacy activities and capacity building for raising tobacco taxes to policy-makers and other stakeholders. Country: Indonesia Amount: $280,755 Start Date: Oct 2008 End Date: Jul 2010
Building the capacity of public health systems in Indonesia to implement effective tobacco control. **Directorate of Non Communicable Disease Control** The project aims to train the NCDC team and reinforce their capacity to develop and implement a national tobacco control strategy and to support tobacco control activities in at least seven provinces, focusing on 100% smokefree environments. Provincial steering committees will be established. Country: Indonesia Focus: Tobacco Control Policy (general) Amount: $315,825 Start Date: Sep 2008 End Date: May 2011

9 *Bloomberg Initiative To Reduce Tobacco Use, What We Fund*, http://www.tobaccocontrol-grants.org/Pages/40/What-we-fund (diakses tanggal 8 Oktober 2011).

Endorsing Good Governance on Tobacco Policy in Indonesia

Indonesia Corruption Watch

To carry out a good governance campaign with anti-tobacco coalition partners that promote transparency and accountability through activities aiming to encourage fundamental changes in government policies related to governance of tobacco. This broad campaign aims to create good governance for the cigarette industry in Indonesia, while reducing the adverse effect of the tobacco industry upon public health.

Country: Indonesia
Amount: $45,470
Start Date: Jul 2010
End Date: Jan 2011

Gaining Political Commitment of the Elected Members of National Parliament (2009-2014) and Advocating for the Enactment of a Comprehensive National Tobacco Control Bill and Accession of FCTC -for Protection of Public Health

Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and Development

The purpose of the project is to gain support from the current elected members of parliament (2009-2014) at the national level for the enactment of the Bill on "Controlling the Impact of Tobacco Products on Health", in compliance with the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). The project will also seek to advocate with Commission I of the government for FCTC accession

Country: Indonesia
Amount: $240,000
Start Date: Mar 2011
End Date: Nov 2012

Gaining Political Commitment through Tobacco Control Policy Advocacy at National and Regional Parliaments to Enact the Bill on Controlling the Impact of Tobacco Products on Health and FCTC

Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and Development (IFPPD)

To develop and promote national tobacco control legislation which is compliant with the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) and urge FCTC ratification; to launch a media campaign aimed at raising awareness among parliament members, religious leaders, and the general public; and to advocate for support among Parliament commissions, such as Youth and Education and Health and Labour in order to ensure passage of legislation.

Country: Indonesia
Website: http://www.ifppd.org
Amount: $164,717
Start Date: Oct 2007
End Date: Dec 2009

To gain political support to pass draft bill on mitigating impact of tobacco products on health

Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and Development (IFPPD)

To gain political commitment through tobacco Control policy Advocacy at National Parliaments to enact the bill on controlling the Impact of tobacco products on Health and FCTC

Country: Indonesia
Amount: $28,753
Start Date: Jan 2007
End Date: Jun 2007

Policy advocacy within the national parliament to gain political commitment of newly elected MPS (2009-2014) to enact the tobacoo control bill and FCTC.

Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and Development (IFPPD)

The purpose of the project is to advocate for inclusion of the Bill that is in compliance with the FCTC with the newly elected members of parliament (2009-2014), and gain a commitment to prioritize it for discussions in the year 2010, and enactment thereafter. The project also seeks to motivate the members of parliament of commission IX to urge Minister of Health to accede FCTC.

Country: Indonesia
Website: http://www.ifppd.org
Amount: $145,860
Start Date: Jan 2010
End Date: Dec 2010

To mobilize public support on tobacco control and to support FCTC accession

Indonesian Institute for Social Development

The project aims to seek support from interfaith groups to support tobacco control.

Country: Indonesia
Focus: Tobacco Control Policy (general)
Amount: $322,643
Start Date: Sep 2010
End Date: Aug 2012

Tobacco Control Support Centre (TCSC), Indonesia

Indonesian Public Health Association, Tobacco Control Working Group

The project aims to establish a national tobacco control support centre to coordinate tobacco control activities in Indonesia and to lead a policy advocacy campaign for changes to the legislation for Smokefree municipalities and health warnings.

Country: Indonesia
Focus: Tobacco Control Policy (general)
Amount: $542,600
Start Date: Aug 2007
End Date: Aug 2009

Tobacco Control Support Centre of the Indonesian Public Health Association (TCSC-IPHA)

Indonesian Public Health Association, Tobacco Control Working Group

The project aims to bring about a policy change through a coordinated NGO strategy for tobacco control in Indonesia. It will develop campaigns for the: introduction of graphic health warnings; implementation of a smokefree ordinance in Palembang; initiation of a smokefree ordinance in Pontianak. It will also develop and support the Indonesian Tobacco Control Network, and further develop TCSC as a resource.

Country: Indonesia
Focus: Tobacco Control Policy (general)
Amount: $491,569
Start Date: Sep 2009
End Date: Aug 2011

Public Interest lawyers for Indonesian Tobacco Control network (PIL-ITCN)

Jakarta Resident Forum (Forum Warga Kota Jakarta) FAKTA

The main purpose of this project will be to focus on the legal support for the smoke free legislation in priority cities as needed, establishing and building capacity of a network of lawyers to address tobacco control issues, and the formation of a legal network to address tobacco control issues.

Country: Indonesia
Amount: $154,400
Start Date: Jul 2010
End Date: Jun 2012

Working to Ban tobacco industry sponsorship in six targeted music and film industries in Indonesia

Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (National Commission on Tobacco Control - NCTC)

To work towards a ban on tobacco industry sponsorship in six music and film industries in Indonesia, identify champions among industry representatives to advocate for tobacco-free entertainment.

Country: Indonesia
Amount: $81,250
Start Date: Dec 2009
End Date: Jan 2011

Strengthening Smoke-Free Areas Regulation (SFA) and its Implementation in Semarang

Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Semarang

The purpose of the project will be to advocate for the passage of a city regulation (perdah) that will strengthen implementation of smoke-free areas, and to support establishment and capacity building of institutions that will administer the enforcement.

Country: Indonesia
Amount: $99,640
Start Date: Nov 2010
End Date: Oct 2011

Building Public and Political Support for the Enactment of a Comprehensive Tobacco Advertising, Promotion and Sponsorship (TAPS) Ban at the National Level

National Commission for Child Protection

This project in general aims to build support from the public, policy makers and other stakeholders in pushing for a comprehensive TAPS ban policy at the national level. To achieve this objective, this project shall work to (1) heighten the awareness of the public, policy makers and other stakeholders on TAPS ban through monitoring industry behavior and counteractions, and (2) conduct advocacy efforts geared at supporting policy initiatives related to TAPS ban enactment at the national level.

Country: Indonesia
Amount: $200,000
Start Date: Mar 2011
End Date: Feb 2013

Advocacy to Support Comprehensive Ban on Tobacco Advertising, Promotion and Sponsorship: Protection on the Rights of the Child

National Commission for Child Protection (NCCP)

To have a comprehensive ban on tobacco advertising, promotion and sponsorship by amending relevant articles in the Government Regulation No.19/2003.

Country: Indonesia
Amount: $455,911
Start Date: May 2008
End Date: May 2010

Advocacy to Support Comprehensive Ban on Tobacco Advertising, Promotion and Sponsorship: Protection on the Rights of the Child

National Commission for Child Protection (NCCP)

To support a comprehensive Ban on Tobacco Advertising, Promotion and Sponsorship through legal action.

Country: Indonesia
Amount: $158,232
Start Date: May 2008
End Date: May 2010

Toward TAPS Ban Policy: Advocacy to Action

National Commission on Tobacco Control

This project aims to Increase public understanding about the harms of tobacco, and raise support for comprehensive tobacco control policies, specifically passage and implementation of a comprehensive TAPS ban in Indonesia .

Country: Indonesia
Amount: $112,700
Start Date: Feb 2011
End Date: Jan 2012

Enforcement of Smoke-free Area Local Regulation toward a 100% smoke-free Bogor City

No Tobacco Community

The project aims to support enforcement of the 100% smoke-free legislation established in May 2010 in Bogor City, West Java. It will accomplish this in close collaboration with the Bogor City Health Office and other key partners through four major strategies. These strategies include continuing enforcement of the smoke-free legislation, strengthening partnerships and linkages with NGO's and others to support the enforcement of the local legislation, building capacity for stakeholders to support law enforcement, and continuing to raise public awareness on the legislation.

Country: Indonesia
Focus: Smokefree
Amount: $193,968
Start Date: May 2011
End Date: Mar 2013

100 % Smoke free Bogor City by 2010

No Tobacco Community

The project aims to make Bogor City 100% smokefree by 2010 through implementation of existing legislation. Measures will include forming a tobacco control regulatory committee that will monitor and evaluate initiatives. It aims to make public transport 100% smokefree, reduce tobacco promotion and advertising, and develop networks with stakeholders.

Country: Indonesia
Focus: Smokefree
Amount: $228,224
Start Date: Mar 2009
End Date: Feb 2011

Building the capacity of public health systems in Indonesia to implement effective tobacco control

Swisscontact Indonesia Foundation

The project aims to achieve a 100% smokefree Jakarta by implementation of existing legislation. Measures to build capacity will include the development of a multi-sector enforcement action plan within two years. A Jakarta Clean Air Act Enforcement Committee will be established, and a monitoring and evaluation system will be developed.

Country: Indonesia
Amount: $360,952
Start Date: May 2009
End Date: Apr 2011

Strengthening Implementation and Enforcement of Smoke Free Policy in Jakarta

Swisscontact Indonesia Foundation

The aim is to have effective implementation of 100% smoke-free policy in the greater Jakarta area. An enforcement plan and procedures will be developed. Its implementation will be supported through capacity building, such as training, inspections, complaint reporting and data management. Mass media, media advocacy and public awareness efforts will increase public awareness of the dangers of second hand smoke dangers and about the policy to complement enforcement activities.

Country: Indonesia
Focus: Smokefree
Amount: $300,000
Start Date: Jul 2011
End Date: May 2013

Meeting of Indonesia Tobacco Control Network (NGO) Planning 2009

Tobacco Control Support Center - Indonesian Public Health Association (TCSC-IPHA)

To convene an NGO planning meeting to develop strategic activities to support tobacco control policy advancement in 2009

Country: Indonesia
Amount: $12,800
Start Date: Jan 2009
End Date: May 2009

Enhancing policy issues for advocacy to policy-makers and related agencies

University of Indonesia, Demographic Institute, Faculty of Economics

To influence the policy-makers in Indonesia to undertake effective tobacco tax and price policy,through policy advocacy and capacity building.

Country: Indonesia
Website: www.ldfeui.org
Amount: $40,654
Start Date: Jun 2008
End Date: Aug 2008

Advocacy for and Enforcement of Smoke-Free Area in Jakarta

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

The purpose of the project is to pass a special local regulation of smoke-free areas, while at the same time support the enforcement of the Governor Decree no.88 2010, particularly in two areas: private workplaces and hospitality venues (restaurants/hotels).

Country: Indonesia
Amount: $127,800
Start Date: Jan 2011
End Date: Dec 2011

Advocacy for and Enforcement of Smoke-Free Areas and Advertisement Ban Policies in Java, Indonesia

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) and Center for Religious and Community Studies

To advocate and enforce district regulations on smoke-free areas in four districts of Java.

Country: Indonesia
Amount: $454,480
Start Date: May 2008
End Date: May 2010

Kucuran dana yang tidak main-main dari Bloomberg secara signifikan memperkuat gerakan antitembakau di Indonesia. Peraturan Daerah (Perda) antitembakau lahir di banyak daerah. Beberapa sangat berlebihan, misalnya Perda Kota Bogor Nomor 12 tahun 2009 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 tahun 2010.

Perda Bogor ditetapkan dalam rangka mencapai target ambisius bertajuk Bogor Smoke Free City 2010, yang didukung langsung oleh empat lembaga internasional, yaitu Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use, the Union, John Hopkins, dan World Lung Foundation. Dalam Perda tersebut, konsumsi, iklan, dan penjualan langsung rokok sangat dibatasi, hingga hanya tersisa sedikit sekali ruang.

Begitu juga dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010, yang penyusunannya didampingi oleh Swiss-Contact Indonesia, salah satu penerima dana Bloomberg Initiative. Jakarta tidak kalah ambisius dengan Bogor. Mengusung tajuk Smoke Free Jakarta, Pergub sebelumnya (Nomor 75 Tahun 2005) diganti. Pergub sebelumnya masih menyediakan ruang khusus merokok di gedung-gedung perkantoran, mal, restoran dan kafe. Dengan lahirnya Pergub 88/2010, sama sekali tidak ada ruang bagi perokok di tempat-tempat tersebut. Banyak pihak bingung dengan peraturan itu. Persoalan

banjir dan macet tak kunjung teratasi, Gubernur DKI Jakarta malah sibuk mengatur-atur urusan rokok secara berlebihan.

Di tingkat nasional, ancaman kebijakan baru juga mengintip. Tahun 2009, ditetapkan UU Nomor 36 tentang Kesehatan (UU 36/2009). Pasal 113 (2) menyebutkan tembakau sebagai tumbuhan yang mengandung zat adiktif. Berkaca pada PP 81/1999, pasal tersebut tidak bisa semata dilihat dari perspektif kesehatan. “Itu pertarungan globalisasi antara rokok putih dengan rokok kretek,” kata Revrisond Baswir, pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada. Revrisond menyampaikan pandangan tersebut ketika menjadi saksi ahli pada sidang lanjutan terhadap pengujian UU 36/2009 di Gedung Mahkamah Konstitusi.[10] Kembali berkaca para PP 81/1999, besar kemungkinan produsen rokok putih membonceng isu kesehatan dan ada di balik lahirnya UU 36/2009. Sebagai catatan, kesimpulan bahwa tembakau merupakan zat adiktif ditelan mentah-mentah dari FCTC yang dikeluarkan WHO. Padahal penelitian WHO mengenai zat adiktif tembakau tidak pernah disampaikan secara transparan pada publik.

Masalah kebijakan berikutnya muncul. RPP tentang Pengamanan Produk Tembakau Sebagai Zat Adiktif Bagi Kesehatan disusun. RPP tersebut disiapkan sebagai aturan teknis UU 36/2009. Dogma kesehatan kembali dominan. Dan tentu saja, kelompok-kelompok yang mengusung isu kesehatan terus mendesak supaya RPP tersebut segera disahkan, terutama mereka yang menerima dana dari Bloomberg Initiative. Namun di balik itu, produsen rokok putih tidak tinggal diam. Indikasinya bisa dilihat dari pasal-pasal “aneh” di RPP tersebut, seperti aturan bahwa satu bungkus rokok harus berisi dua puluh batang (khas rokok putih), tidak boleh dijual eceran (selama ini rokok putih paling jarang dijual eceran), dan pencantuman kadar *eugenol* (zat cair tanpa warna, konstituen utama minyak bunga cengkeh, elemen penting bagi kretek). Prof. Dr. Sutiman B Sumitro, pakar nanobiologi yang juga Guru Besar Biologi Sel dan Molekuler Univesitas Brawijaya, memperkuat dugaan

10 “*Rokok Putih Bakal Rebut Pasar Rokok Kretek*”, http://www.jpnn.com/read/2011/02/08/84011/Rokok-Putih-Bakal-Rebut-Pasar-Rokok-Kretek- (diakses tanggal 27 Juni 2011).

itu. Ia curiga, RPP merupakan bagian dari skenario bisnis perusahaan rokok multinasional dalam jangka panjang.[11]

Jika ditelisik lebih dalam, dua kebijakan di atas (RUU dan RPP) adalah adopsi mentah rumusan-rumusan FCTC. Begitu juga dengan banyak kebijakan lain yang lahir di banyak daerah. Kontekstualisasi seperti dikebiri. Kedaulatan seakan dilangkahi. Banyak kepentingan nasional yang terancam dengan model adopsi mentah tersebut.

Perang Global Melawan Tembakau, Kepentingan Siapa?

Tahun 1999 adalah gerbang masuk perang global melawan tembakau ke Indonesia. Dari sisi kebijakan, banyak hal telah dicapai. Di antaranya adalah Peraturan Pemerintah tentang Tembakau yang diamandemen tiga kali, puluhan Perda antitembakau (di Bogor, Jakarta, Surabaya, Tangerang, Depok, Bandung, Surabaya, Palembang, Pekanbaru, Padang Panjang, Makassar, dan lain sebagainya), UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan yang akan segera menyusul adalah RPP tentang Pengamanan Produk Tembakau Sebagai Zat Adiktif Bagi Kesehatan, dan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Sejak itu, masyarakat menemukan kemasan rokok yang dilabeli peringatan bahaya kesehatan. Muncul pula kawasan tanpa rokok (KTR) di banyak tempat. Iklan, promosi, dan *sponsorship* tidak selonggar sebelumnya. Cukai naik. Dan masih banyak lagi. Sejak itu pula, wacana tentang bahaya tembakau muncul di mana-mana dan serta-merta dianggap sebagai kebenaran umum, nyaris tanpa penyikapan kritis.

Setelah semua capaian itu, faktanya, impor tembakau ke Indonesia justru meningkat. Impor sebesar 29.579 ton di tahun 2003 naik menjadi 35.171 ton di tahun 2004. Tahun 2005 naik lagi menjadi 48.142 ton. Tahun 2006 terus naik menjadi 48.287 ton, tahun 2007 menjadi 61.687

11 "RPP Tembakau Sarat Kepentingan Asing", http://www.mediaindonesia.com/read/2010/12/16/188422/92/14/RPP-Tembakau-Sarat-Kepentingan-Asing (diakses tanggal 27 Juni 2011).

ton, dan tahun 2008 mencapai 77.302 ton.[12] Dalam hitungan lima tahun, dari tahun 2003 sampai 2008, impor tembakau naik lebih dari 250 persen.

Fakta lain, impor cerutu dan rokok ke Indonesia juga meningkat. Impor cerutu meningkat rata-rata 197,5 persen per tahun, dari 0,09 juta dolar AS di tahun 2004 menjadi 0,979 juta dolar AS di tahun 2008. Dalam periode yang sama, impor rokok meningkat rata-rata 86,87 persen, dari 0,836 juta dolar AS menjadi 4,357 juta dolar AS.[13]

Belum lagi fakta bahwa dua raksasa kretek telah diambil alih modal asing. Sampoerna diakuisisi Philip Morris pada tahun 2005, menyusul Bentoel diakuisisi BAT pada tahun 2009. Babak baru "bisnis kretek" dimulai oleh dua punggawa rokok putih dunia. Sementara itu ratusan—bahkan ribuan—perusahaan kretek kecil gulung tikar akibat kenaikan cukai. Bisa dibayangkan; daftar perusahaan kretek kecil yang gulung tikar bakal bertambah panjang jika pemerintah kembali menaikkan cukai di tahun 2012.

Tidak ketinggalan, perusahaan-perusahaan farmasi multinasional yang beroperasi di Indonesia terus siaga. Kampanye bahaya merokok terus mereka lancarkan melalui berbagai cara, dari *on ground activities* sampai memaksimalkan *social media*. Pfizer, contohnya. Berbagai seminar, diskusi publik, mobil keliling, pendirian stan konsultasi stop merokok, sampai kampanye Break Free di www.stopmerokok.com maupun Pfizer Peduli, secara kontinu dilakukan. Pfizer cukup berhasil. Kini produsen Benadryil, Listerine, Combantrin, dan Visine itu telah membangun klinik terapi berhenti merokok dan memasarkan obat berhenti merokok Veranicline.

Memang, secara umum produk-produk NRT belum marak di Indonesia. Tetapi penting dicatat, Indonesia adalah salah satu negara yang belum meratifikasi FCTC. Padahal di dalam FCTC terdapat pasal khusus yang memberikan landasan hukum bagi kepentingan bisnis

12 "Outlook Komoditas Pertanian Perkebunan", Pusat Data dan Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, 2010.

13 "Komoditas yang Tetap Seksi", http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/279526/ (diakses tanggal 27 Juni 2011).

NRT, sebagaimana tercantum dalam Pasal (*article*) 14 di bawah judul *"Demand reduction measures concerning tobacco dependence and cessation"* dan Pasal 22 yang merupakan rujukan dari Pasal 14.2 (d) konvensi tersebut.

Pada acara 17th Expert Committee on The Selection and Use of Essential Medicines di Geneva, 23 – 27 Maret 2009, Pasal 14 FCTC dicantumkan dalam *Proposal for Inclusion of Nicotine Replacement Therapy in The WHO Model List of Essential Medicines*. Dua bentuk NRT, yaitu *transdermal patches* (koyok transdermal) dan *chewing gums* (permen karet), akhirnya dimasukkan dalam WHO *Model List of Essential Medicines*. Dengan itu, NRT secara resmi diakui WHO sebagai obat-obat esensial untuk digunakan oleh negara-negara yang meratifikasi FCTC dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal 14 FCTC.

Pengakuan WHO mengantar para eksportir Amerika Serikat pada keuntungan penjualan produk-produk NRT di 9 negara Eropa, 4 negara Asia, Australia, dan Meksiko. Menurut laporan World Smoking-Cessation Drug Market 2010 – 2025, penjualan NRT di seluruh dunia pada tahun 2008 mencapai jumlah di atas 3 miliar dolar AS. Diprediksi, dalam 15 tahun ke depan, penjualan NRT akan meningkat terutama di negara-negara BRIC (Brasil, Rusia, India, dan Cina). Hampir separuh perokok dunia berasal dari empat negara tersebut. Dalam laporan tersebut juga dianalisa perkembangan pasar NRT di Amerika Utara, Eropa dan Asia. Layak untuk dicamkan bahwa Indonesia, dengan jumlah perokok besar, tentu tidak luput dari incaran NRT.

KRETEK

Menggugat Komitmen dan Keberanian Negara
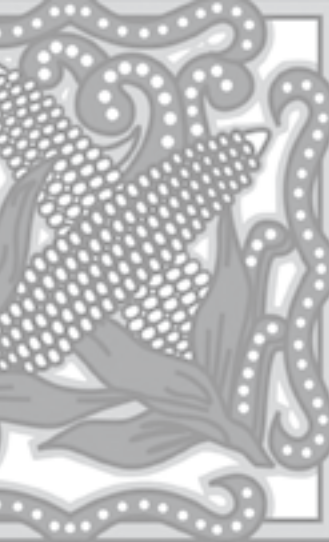
Jika saja kretek tak pernah ada, industrinya juga tidak pernah tumbuh dan membesar, tentu persoalan tembakau tidak akan sepelik sekarang. Tren global tinggal diamini saja. Indonesia cukup jadi makmum. Tidak perlu repot-repot bicara soal mengamankan kepentingan nasional.

Atau jika negara sudah "beres": tingkat pengangguran rendah, angka kemiskinan kecil, keuangan negara bagus, industri tumbuh, kretek bisa saja "dikorbankan" demi arus global. Tidak perlu buang waktu berdebat soal sekadar agenda pembatasan atau pemberangusan.

Persoalannya, kretek itu ada. Bahkan telah lekat dan merepresentasikan tradisi. Sejarah panjang melekat pada punggungnya. Dan cengkeh, unsur rempah Nusantara yang dulu nilainya setara dengan emas, menjadikannya khas dan tak tergantikan. Kretek jelas berbeda dengan rokok putih. Secara kebudayaan, kretek adalah hasil kreativitas yang tinggi harganya. 'Keretek', *kumretek*, atau kretek: tidak ada bangsa di dunia ini yang berhak mengklaim sebagai miliknya, kecuali Indonesia.

Industri kretek juga telah tumbuh sampai sebesar sekarang. Kisah suksesnya sudah dimulai sejak zaman Hindia Belanda. Ketangguhannya sudah teruji dari zaman ke zaman. Kontribusinya bagi negara tidak dapat disangkal. Data tahun 2009 menyebutkan, dari hulu sampai ke hilir industri kretek menyerap tenaga kerja sampai 30,5 juta orang.[1] Selain itu, industri kretek tampil sebagai penyumbang cukai terbesar. Tahun 2010 negara menerima cukai dari tembakau sebesar Rp 62 triliun,[2] di mana bagian terbesar dibayar oleh konsumen kretek. Penerimaan negara tersebut belum termasuk pajak yang dibayarkan industri, pajak yang dibayarkan tenaga kerja industri, dan dana sosial (CSR) industri. Dari cukai tembakau saja, industri kretek menyumbang jauh lebih besar dibanding Freeport yang hanya Rp. 20 triliun.[3] Padahal selama ini sektor pertambangan—yang dikuasai modal asing—selalu digadang-gadang sebagai penyumbang penerimaan negara terbesar.

1 Topatimasang, Roem, (ed), dkk, *Kretek: Kajian Ekonomi dan Budaya 4 Kota*, Indonesia Berdikari, Yogyakarta, 2010, hal. 3.

2 "Pendapatan Cukai Rokok Capai Rp. 62,14 Triliun", http://m.tempointeraktif.com/2010/12/21/300604/ (diakses tanggal 5 Juli 2011).

3 "Fahmi: Jadikan Rokok Kretek Warisan Budaya Dunia!", www.beritajatim.com/detailnews.php/1/Ekonomi/2011-02-24/93832/ (diakses tanggal 5 Juli 2011).

Persoalannya lagi, negara tidak "beres". Tingkat pengangguran terbuka per Februari 2011 hampir 7 persen atau 8 juta orang lebih.[4] Angka kemiskinan mencapai 13,3 persen pada tahun 2010, atau 31 juta orang.[5] Beban utang pemerintah tahun 2010 mencapai Rp 1.667,7 triliun, yang jika dibebankan secara rata maka setiap warga negara menanggung utang Rp 7 juta.[6] Di tahun yang sama, pemerintah harus membayar cicilan pokok dan cicilan bunga utang sebesar Rp. 230,33 triliun.[7] Itu setara dengan 20 persen lebih APBN. Belum lagi persoalan gejala deindustrialisasi yang makin nyata terlihat, seperti disinyalir LIPI dan HIPMI.[8]

Di tengah situasi macam ini, lazimnya kretek menjadi satu dari sedikit pilihan yang ada. Ditambah keadaan negara yang carut-marut, perannya menjadi lebih vital. Pilihan-pilihan lain sudah binasa diterkam singa "sindikasi internasional" bentukan korporasi multinasional/transnasional, negara-negara maju, dan lembaga-lembaga internasional. Taring-taring mereka acapkali bersembunyi di balik beragam regulasi internasional. Sejarah menyaksikan kopra nasional hancur. Gula nasional remuk. Garam nasional terpuruk. Jamu tak berkutik. Dan masih banyak lagi. Kelak entah apa lagi.

Kini, perang global melawan tembakau mengancam kretek. "Pembatasan, bukan pemberangusan," dalih para pendukung perang itu. Sementara kenyataan bicara lain. Tembakau adalah bisnis besar. Negara-negara maju yang berkepentingan dengan bisnis itu tidak akan melepaskannya, sebaliknya justru ingin meluaskannya. Memang negara-negara maju terus mendorong pembatasan tembakau global. Tapi itu

4 "Pengangguran Turun, Republik Kian Sejahtera?", http://fokus.vivanews.com/news/read/218702-pengangguran-turun--belum-tentu-sejahtera (diakses tanggal 5 Juli 2011).

5 "Angka Kemiskinan Ditargetkan Turun Jadi 12,5 Persen", http://nasional.kompas.com/read/2011/01/31/07334328/Angka.Kemiskinan.Ditargetkan.Turun.Jadi.12.5.Persen (diakses tanggal 5 Juli 2011).

6 "Berapa Cicilan Pokok dan Bunga Utang Negara Dalam APBN?", http://www.jurnal-ekonomi.org/berapa-cicilan-pokok-dan-bunga-utang-negara-dalam-apbn/ (diakses tanggal 5 Juli 2011).

7 Ibid.

8 "LIPI: Indonesia Menuju Deindustrialisasi", http://m.kompas.com/news/read/2010/12/22/19523262/ (diakses tanggal 5 Juli 2011).

cuma satu sisi. Di sisi lain, mereka mengamankan kepentingan bisnis tembakaunya dengan beragam cara. Seperti yang dilakukan Amerika Serikat, negara produsen tembakau terbesar keempat di dunia. Dengan jumlah petani tembakau hanya 57 ribu orang, Amerika Serikat memberi subsidi bagi petani tembakau di negaranya sebesar 203 juta dolar AS di tahun 2009, atau 944 dolar AS sepanjang tahun 1995 – 2009.[9] Kemudian Amerika Serikat, melalui US Food and Drug Administration (FDA) melarang impor kretek masuk. Ini adalah bentuk lain hambatan non-tarif *(non tarrif barrier)*.

Dasar FDA melarang impor kretek adalah UU Kontrol Tembakau *(Tobacco Control Act)*, yang melarang produksi dan penjualan rokok yang mengandung zat adiktif tertentu, termasuk cengkeh, di Amerika Serikat. Tetapi dalam UU itu, produksi dan penjualan rokok mentol diperbolehkan. Padahal tidak ada informasi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa kretek menimbulkan risiko kesehatan lebih besar dari rokok mentol. Artinya, jika kretek dilarang, mestinya rokok mentol juga dilarang.

Usut punya usut, di balik pelarangan itu, kretek yang dijual di Amerika Serikat diimpor dari Indonesia, sementara rokok mentol yang dijual di Amerika Serikat semua diproduksi di dalam negeri. Wajar saja jika kebijakan tersebut didukung oleh korporasi rokok besar Amerika Serikat. Altria Group, perusahaan induk Philip Morris, menyatakan UU itu merupakan kebijakan yang menguntungkan konsumen Amerika Serikat dan memujinya sebagai kebijakan yang komprehensif.[10] Sebaliknya, kebijakan tersebut membuat Indonesia berpotensi kehilangan 200 juta dolar AS per tahun.[11] Atas diskriminasi tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan protes ke WTO, tetapi sampai sejauh ini belum membawa hasil.

Untuk menghambat impor dan melindungi pasar dalam negeri,

9 Daeng, Salamuddin, dkk, *Kriminalisasi Berujung Monopoli: Industri Tembakau Indonesia di Tengah Pusaran Kampanye Regulasi Anti Rokok Internasional*, Indonesia Berdikari, Jakarta: 2011, hal. 36.

10 Ibid. hal. 25.

11 "Amerika Terbukti Diskriminatif Terhadap Rokok Indonesia", http://www.tempo.co/hg/bisnis/2011/09/05/brk,20110905-354580,id.html (diakses tanggal 6 September 2011).

selain hambatan non-tarif, Amerika Serikat juga menerapkan hambatan tarif *(tariff barrier)*, yaitu bea masuk yang sangat tinggi bagi produk tembakau. Setiap produk tembakau yang masuk pasar Amerika Serikat dikenakan bea masuk 350 persen.[12] Sementara itu, ekspansi perusahaan rokok multinasional Amerika Serikat di luar negeri terus melaju. Philip Morris mencaplok perusahaan rokok di puluhan negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk PT HM Sampoerna di Indonesia. Produk Philip Morris menembus ke sekitar 160 negara, dan pada akhir tahun 2008 memperoleh pendapatan operasi sebesar 10,25 miliar dolar AS.[13] Sampai saat ini, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang tidak meratifikasi FCTC.

Sementara itu, Cina mengenakan bea masuk tembakau sampai 57 persen. Selain itu, untuk kasus Cina, negara memegang monopoli dalam menjalankan industri tembakau. Monopoli negara itu memperkuat posisi nasional Cina dalam persaingan global di sektor tembakau. China National Tobacco Corp, perusahaan rokok Cina yang memimpin pasar rokok dunia, dimiliki oleh negara.[14] The State Tobacco Monopoly Administration (STMA) merupakan pembeli tunggal yang diijinkan dalam perdagangan tembakau di Cina. Sebuah agen khusus di bawah monopoli tembakau negara, yaitu The China National Tobacco Import-Export (Group) Company, menjalankan semua urusan ekspor-impor daun tembakau dan rokok. Tidak ada individu, perusahaan negara, maupun swasta yang diijinkan terlibat dalam perdagangan daun tembakau dan rokok.[15] Berbeda dengan Amerika Serikat, Cina mengambil sikap untuk meratifikasi FCTC.

---

12 "Industri Rokok Hadapi Tekanan", www.investor.co.id/home/industri-rokok-hadapi-tekanan/13021 (diakses tanggal 5 Juli 2011).

13 Daeng, op. cit., hal. 18.

14 Di dunia, terdapat lima perusahaan rokok yang menguasai pangsa pasar terbesar, yaitu China National Tobacco Corp (41%), Philip Morris International Inc (16%), British American Tobacco Plc (13%), Japan Tobacco Inc (11%), dan Imperial Tobacco Group Plc (6%). (dari artikel "Diserbu Asing, Industri Rokok Nasional Hancur", us.wap.vivanews.com/news/read/227266-diserbu-asing--industri-rokok-nasional-hancur (diakses tanggal 5 Juli 2011).

15 "Pasar Tembakau Ditargetkan US$ 464,4 Miliar Tahun 2012", www.bappenasnews.com/index.php/411-pasar-tembakau-ditargetkan-us-4644-miliar-tahun-2012 (diakses tanggal 5 Juli 2011).

Sementara Uni Eropa memberikan subsidi kepada petani tembakau-nya hingga 1 miliar Euro per tahun, dan juga merancang organisasi pasar bersama (Common Market Organization/CMO).[16] Delapan negara anggota produsen tembakau di bawah naungan Uni Eropa adalah Austria, Belgia, Perancis, Jerman, Yunani, Italia, Portugal, dan Spanyol.

Bandingkan dengan Indonesia. Sejak *letter of intent* diteken, liberalisasi melibas sektor keuangan dan perdagangan, tak terkecuali beragam komoditas pertanian. Tata niaga dibebaskan. Subsidi ditiadakan. Dengan keadaan seperti itu, bagaimana mungkin petani tembakau Indonesia bisa bersaing dengan petani tembakau dari negara-negara maju? Yang terjadi justru petani tembakau Indonesia semakin terjepit. Harga diserahkan pada mekanisme pasar, sementara nyaris pada saat yang bersamaan subsidi pupuk dan BBM—yang berhubungan langsung dengan petani tembakau—ditiadakan. Selanjutnya negara, atas desakan lembaga-lembaga internasional dan kelompok-kelompok yang didanai korporasi multinasional, malah membatas-batasi petani tembakau untuk menanam tembakau.

Letter of intent juga telah menjerumuskan bangsa ini pada penghilangan berbagai instrumen proteksi, seperti pajak, cukai, dan bea tarif. Kenyataan itu diperparah dengan pemaksaan melalui berbagai traktat atau konvensi internasional, dan masih ditambah perjanjian-perjanjian bilateral maupun multilateral. Hutang luar negeri dan dominasi modal asing telah melemahkan posisi tawar bangsa ini. Tidak heran, kalau tidak mau dikatakan sudah bagus, bea masuk tembakau di Indonesia hanya 40 persen. Nilai itu lebih rendah dari Cina, apalagi Amerika Serikat yang mencapai 350 persen. Akibatnya Indonesia tak kuasa membendung banjir impor tembakau. Impor tembakau membanjir, terutama setelah perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China Free Trade Agreement (CAFTA) dan ASEAN-India. Kedua negara tersebut merupakan produsen terbesar tembakau dunia.

Posisi tawar yang lemah itu pula yang membuat persoalan boikot kretek Indonesia oleh Amerika Serikat tidak cepat tuntas, meskipun

16 Ibid.

dasar argumen Indonesia kuat. Bisa dibayangkan jika posisinya dibalik. Ceritanya pasti lain. Bahkan dengan dasar argumen yang ngawur sekalipun. Jadilah kretek Indonesia diboikot Amerika Serikat. Sementara Philip Morris, perusahaan multinasional Amerika Serikat, mencaplok raksasa kretek Indonesia dan kini menjadi pemimpin pasar rokok di Indonesia. Ironis.

Maka, "pembatasan, bukan pemberangusan" hanyalah bualan belaka. "Pembatasan, bukan pemberangusan" tak lain dan tak bukan adalah perangkap yang didesakkan melalui FCTC. Pembatasan benar-benar bukan pemberangusan, hanya jika proteksi berdiri di depan apa yang dimaksud sebagai pembatasan itu. *Toh,* proteksi bukan sesuatu yang haram. Negara-negara maju pun melakukan itu. Dalam bahasa yang lebih tegas, pembatasan benar-benar bukan pemberangusan hanya jika Indonesia berani berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju, sebagai sesama negara merdeka dan berdaulat. Dan sikap itu selayaknya berlaku tidak hanya untuk soal kretek, tetapi juga untuk persoalan-persoalan lain, khususnya yang menyangkut kepentingan nasional bangsa ini.

Apakah Anda, Mengapa Anda

Oleh Mohamad Sobary

Apakah Anda dengki melihat gula, karena gula bisa menimbulkan sakit kencing manis? Mengapa Anda tak mengubah pola makan dan olahraga sebagaimana nasihat dokter, sehingga hidup Anda bebas dari kencing manis, dan dari kedengkian yang justru lebih berbahaya karena bisa merusak hati dan cara Anda memandang dunia?

Apakah Anda dengki melihat minyak kelapa, karena minyak kelapa dianggap (oleh penguasa pasar yang serakah) bisa menimbulkan kolesterol dan membahayakan jantung? Mengapa Anda tak mencermati kekeliruan fatal dalam pola makan umat manusia, bahwa kini pola makan bangsa-bangsa Asia, Melanesia, dan Afrika salah karena mereka ingin tampil 'modern' seperti orang Amerika dan mengikuti pola makan Amerika, sehingga bangsa-bangsa ini sekarang juga banyak mengidap kegemukan dan sakit jantung seperti orang Amerika? Bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Melanesia keliru karena mereka meninggalkan tradisi mapan yang diwariskan nenek moyang, yaitu *tidak lagi* mengonsumsi kelapa seperti dahulu kala, dan tak mau minum minyak kelapa untuk kesehatan.

Dalam sejarah perdagangan kita, kopra kita yang sangat unggul dimanipulasi di pasar Amerika, dengan label-label menyesatkan: minyak kelapa—minyak tropis—mengandung bahaya kolesterol. Maka, dagangan minyak olahan kita maupun kopra yang masih mentah, digasak di pasaran. Padahal minyak kelapa justru bersih dari kolesterol.

Maka kita bisa kembali ke tradisi sebelumnya, minum apa yang mereka sebut 'kolesterol' tadi, agar kita bebas dari kolesterol. Kini, di dunia akademis kita terbuka lebar kebenaran, setelah para peneliti menemukan bahwa minum minyak kelapa murni—artinya minum 'kolesterol' tadi, membikin—demi Tuhan—kita bebas dari kolesterol. Mengapa Anda tak percaya, nasihat untuk minum VCO, minyak kelapa murni, itu sebuah kearifan yang datang dari tradisi lama kita sendiri, yang mengandung hikmah dan kebijaksanaan yang tak terukur dalamnya?

Apakah Anda ingin menjadi Si Malin Kundang, yang silau kepada modernitas, dan memuja obat-obat bikinan pabrik 'modern' sambil melecehkan jamu, dan dengan cepat menempelkan di punggung jamu itu label 'tradisional'? Mengapa Anda tak menyadari bahwa para maha-tabib kita, yang membikin jamu-jamu itu, menguasai pemikiran, seni, dan kemampuan teknis, serta kesadaran makrokosmos yang dalam, yang jika diberi label, esensinya justru *supramodern:* sudah modern di banyak abad sebelum abad 'modern' lahir di bumi yang salah, oleh para pemikir ilmiah yang salah, karena mereka belum bisa belajar menunduk, supaya kepala-kepala mereka tak terbentur bintang-bintang di langit bikinan Tuhan, yang ilmu-ilmu-Nya mahadalam, dan tak habis dikaji dengan menggunakan air laut di seluruh permukaan bumi, ditambah tujuh kali jumlah itu sebagai tintanya, dibantu pohon-pohon di hutan-hutan di seluruh dunia, ditambah tujuh kali jumlah itu sebagai penanya, tapi ilmu Tuhan belum lagi akan habis tertulis?

Mengapa mereka berani melecehkan karya para mahatabib Indonesia, yang dengan khidmat dan mendalam, juga menyerap—betapa pun terbatasnya—kearifan dan ilmu-ilmu Tuhan, yang mahaluas dan maha-dalam, yang tak mungkin habis ditulis manusia, hingga ketika bumi dan seluruh planet dalam tata surya ini digulung lagi dan digenggam-Nya?

Apakah Anda mendengki garam, karena garam bisa membuat darah tinggimu lebih buruk, dan karena itu kau, Menteri, mengimpor garam Australia, yang membuat kau memperoleh persenan dalam jumlah sangat besar dan membuatmu menjadi semakin kaya, tanpa menimbang derita para pembuat garam di sepanjang pantai di negeri kita yang menjadi

penganggur tak bermartabat sebagai manusia? Mengapa kau tak belajar dari Gandhi, yang dengan garam bisa memompa kemandirian bangsanya, sehingga India yang terjajah tak mau lagi mengonsumsi garam bikinan negeri penjajah, karena sesungguhnya hanya mudah bagi rakyat untuk membikin garam dari pantai-pantai di negeri India sendiri? Mengapa garam rakyat kita sendiri kau bikin mati karena kebijakan perdagangan yang lebih membela kepentingan asing, dan dirimu sendiri?

Mengapa kebijakan pemerintah kita sendiri justru menjadi instrumen penjajahan, dan membikin bangsa kita menjadi kere di tengah para kere dunia, padahal kita punya pantai-pantai terpanjang, yang tak dimiliki bangsa lain, dan di sanalah 'tambang' garam yang tak pernah habis itu tersedia? Negeri garam, mengapa mengimpor garam?

Mengapa kebijakan yang mengkhianati konstitusi seperti ini, di negeri ini tak dianggap tindakan yang bersifat 'mencuri'? Kentang kita lebih baik dari kentang mana pun, tapi mengapa kau mengimpor kentang negeri asing, dan membikin kaya bangsa asing? Jeruk, jambu, kelengkeng, mangga, pepaya, apa kurangnya di negeri kita, hinggga kita harus mengimpor, dan kebijakan itu membikin para petani buah kita merana?

Apa penyakit yang kita idap? Kehilangan rasa kebangsaan, kehilangan rasa kemanusiaan, atau kebanyakan watak serakah, yang membuat kita tak peduli bangsa kita mati?

Apakah Anda mendengki asap rokok, yang mengandung radikal bebas yang berbahaya, tapi tak peduli terhadap asap pabrik-pabrik dan asap motor dan mobil-mobil yang menyergap hidung Anda secara langsung, padahal emisi kendaraan bermotor juga—bahkan lebih—membawa dengan gembira bibit kanker di perut, di usus, di kandungan, di payudara, dan di mana saja mereka hinggap?

Mengapa Anda mendengki asap rokok yang mengandung bahaya bagi kesehatan nafas kita, tapi diam seribu bahasa terhadap narkotika dan obat-obat terlarang lainnya, yang sering mendadak sontak menimbulkan kematian, atau membikin tolol, koplo, yang begitu luas konsumennya, dan jelas mengancam kelangsungan hidup bangsa kita?

Mengapa Anda tak bisa bersikap agak dingin, dan agak adil terhadap kedua fenomena itu? Mengapa sikap patriotik Anda untuk menjaga kesehatan sesama manusia dan kesehatan masyarakat pada umumnya sedemikian berat sebelah, tanpa peduli akan kenyataan bahwa di tingkat perdagangan dunia, semangat mematikan kretek kita—untuk dikuasai dan dimiliki orang-orang serakah—begitu tinggi? Seperti pengalaman minyak dan kopra kita, dan banyak mata dagangan kita yang kini sudah hancur luluh, tapi berkembang, jaya, dan membikin kaya raya bangsa lain yang sudah kaya?

Dalam sekitar lima tahun terakhir ini, mereka yang anti-kretek dan mereka yang membela kretek maupun tembakau, bagaikan dua kubu yang siap saling mengganyang. Padahal, andaikata masing-masing bisa memenangkan kepentingannya, misalnya golongan anti-kretek menang, itu pun akhirnya hanya akan membukakan peluang bagi monopoli kretek di tangan bangsa asing, yang licik, yang sudah lebih dua puluh tahun mengincar mata dagangan itu untuk dimiliki sendiri dan dimonopoli di tingkat dunia, demi keserakahan yang tak terbatas. Mereka telah sejak lama melakukan lobi di mana-mana, dan tak enggan mengeluarkan dana besar demi mematikan kretek kita, dan membiayai siapa saja yang bisa membantu mereka mencekik kretek ini agar mudah mereka kuasai.

Dimensi politik ekonomi ini mustahil tak kita ketahui. Ini menjadi ancaman bagi harga diri kita, bagi warisan kebudayaan kita. Mustahil kita tak tahu bahwa di balik ini terletak duit konkret, yang bisa kita pakai di dalam negeri, untuk kesejahteraan sesama bangsa kita. Mengapa pemerintah culas, menggunakan uang cukai rokok dan cengkeh yang besar itu untuk membunuh tanaman tembakau milik rakyat yang harus dilindungi pemerintah? Dan ketika pemerintah selingkuh dari tanggung jawab seperti ini, mengapa kita, golongan terpelajar, diam seribu bahasa terhadap penderitaan petani tembakau, yang adalah bangsa kita juga?

Kita ini bangsa Indonesia, dan warga negara Indonesia. Kita taat aturan. Kita taat pada apa yang dianggap baik bagi seluruh bangsa. Diadakannya aturan mengenai tempat merokok itu baik bagi kesehatan dan kita terima dengan tangan terbuka. Kita butuh sehat. Kita butuh

hidup lebih lama. Tapi marilah aturan itu kita bikin sendiri. Jangan hendaknya aturan itu dibikinkan bangsa lain, demi agenda lain yang lebih besar, dan demi mencekik kita. Duit sogokan asing itu hanya benda, yang mematikan jiwa kita, dan kebebasan kita untuk hidup bermasyarakat dan berbangsa. Duit itu tak akan selamanya ada di tangan kita. Kembalikan jiwa kita dan kebebasan kita dari pengaruh asing, apa pun wujudnya.

Dua kubu yang terdiri dari rata-rata orang terpelajar dan anggota kelas menengah, mungkin bahkan menengah atas di masyarakat kita, mengapa begitu gigih untuk mengalahkan yang lain, untuk pada akhirnya tak mendapatkan apa-apa, kecuali: kita biarkan pemerintah kita didikte bangsa asing, dan kehilangan kemandirian, karena setiap langkah perundangan dan aturan yang dibuat, kiblatnya adalah kepentingan bangsa asing.

Mengapa kita tak merasa malu mengaku sebagai bangsa yang merdeka, dari sebuah negara merdeka? Satu dari dua kubu ini mungkin merasa tidak enak bila kalah. Mungkin kalah akan membuat mereka malu. Tapi mengapa Anda tak ingat Puntadewa, yang tak mau menang dalam Bharatayudha, bila untuk menang syaratnya harus rela *culas*, *tidak jujur*, dan *tidak tulus* terhadap kehidupan, dan lebih penting, *tidak tulus* pada *diri sendiri*? Di mana 'barang' bernama Si Tulus itu selama ini?

Mungkin kita tak akan lupa, kita bisa bohong pada orang lain. Tapi mengapa kita mau mencoba lupa, bahwa kita tak bisa bohong pada diri sendiri?

KEPUSTAKAAN

Tapakmaya

"Ada 'Konspirasi' Dokter dengan Perusahaan Farmasi", 20 Oktober 2010, http://health.kompas.com/read/2010/10/20/09264388/Ada..quot.Konspirasi.quot..Dokter.dengan.Perusahaan.Farmasi.

"Amerika Terbukti Diskriminatif Terhadap Rokok Indonesia", http://www.tempo.co/hg/bisnis/2011/09/05/brk,20110905-354580,id.html.

"Angka Kemiskinan Ditargetkan Turun Jadi 12,5 Persen", http://nasional.kompas.com/read/2011/01/31/07334328/Angka.Kemiskinan.Ditargetkan.Turun.Jadi.12.5.Persen.

"Berapa Cicilan Pokok dan Bunga Utang Negara Dalam APBN?", http://www.jurnal-ekonomi.org/berapa-cicilan-pokok-dan-bunga-utang-negara-dalam-apbn/.

"Big Business, Big Damage", http://www.insideindonesia.org/stories/big-business-big-damage-12091345.

Bloomberg Initiative To Reduce Tobacco Use, What We Fund, http://www.tobaccocontrolgrants.org/Pages/40/What-we-fund.

"Cengkeh di Mata Orang-Orang Minahasa", http://desaku.blogdetik.com/2010/06/15/%E2%80%9Chabis-batu-bara-kereta-api-tak-bisa-jalan%E2%80%9D-cerita-perokok-perokok-tua-minahasa-2/.

"Christopher Columbus: Explorers, Pioneers, and Frontiersmen, 1451-1506", http://www.u-s-history.com/pages/h1033.html.

"Daerah Potensi Bahan Baku Kelapa di Sulawesi Selatan", http://www.dekindo.com/media.php?provinsi=19.

"Diserbu Asing, Industri Rokok Nasional Hancur", us.wap.vivanews.com/

news/read/227266-diserbu-asing--industri-rokok-nasional-hancur.

“Era Baru, Ekonomi Menjadi Panglima”, http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=V1gDXVZSAg5Q.

“Fahmi: Jadikan Rokok Kretek Warisan Budaya Dunia!”, www.beritajatim.com/detailnews.php/1/Ekonomi/2011-02-24/93832/.

“Govt to Make ‘Temulawak Jamu’ an Icon of Indonesia”, 28 September 2009, http://www.thejakartapost.com/news/2009/09/28/govt-make-%E2%80%98temulawak%E2%80%99-%E2%80%98jamu%E2%80%99-icon-indonesia.html.

“Herbal Asli Indonesia Dipatenkan Asing,” *Forum* no. 33/13-19 Desember 2010, http://majalahforum.com/nasional.php?tid=74.

http://radarambon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=2.

http://www.mercedes-benz.co.id/content/indonesia/mpc/mpc_indonesia_website/enng/home_mpc/passengercars/home/passengercars_world/innovation_sustainability/sustainability/corporate_responsibility/resources.html.

“Indonesia Ladang Subur Biopiracy”, http://www.lipi.go.id/www.cgi?cetakberita&1175651574&&2005&.

“Industri Rokok Hadapi Tekanan”, www.investor.co.id/home/industri-rokok-hadapi-tekanan/13021.

“John Hopkins President To Retire at End of Year”, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/03/10/AR2008031002686.html.

“Kalau Kretek tak Lagi Kemripik”, http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1999/05/31/EB/mbm.19990531.EB95624.id.html.

“Komoditas yang Tetap Seksi”, http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/279526/

“Kunjungan Walikota New York Sebagai Dukungan Serangan Israel”, http://www.suaramedia.com/berita-dunia/dunia-islam/3198-kunjungan-walikota-new-york-sebagai-dukungan-serangan-israel.pdf.

“Legenda Sungai Gajah Wong Yogyakarta”, http://jogjaicon.blogspot.com/2011/03/legenda-sungai-gajah-wong-yogyakarta.html.

“LIPI: Indonesia Menuju Deindustrialisasi”, http://m.kompas.com/news/read/2010/12/22/19523262/.

“Michael Bloomberg: Rp. 953,3 Miliar Demi Bertahan Jadi Walikota”, http://dunia.vivanews.com/news/read/109578-rp_959_3_miliar_demi_bertahan_jadi_walikota.

“Minyak Mandar Bisa Digenjot Lebih Gencar”, *Bisnis Indonesia* edisi 14 Desember 1999, http://groups.yahoo.com/group/mmaipb/messages/1844?threaded=1&m=e&var=1&tidx=1.

“Obat Herbal Tradisional dan Kemandirian Nasional”, http://swa.co.id/2008/09/obat-herbal-tradisional-dan-kemandirian-nasional/?comments=true.

“Otoritas Bursa Temukan Kejanggalan Dalam Akuisisi Bentoel”, http://www.tempo.co/hg/saham/2009/06/19/brk,20090619-182808,id.html.

“Partai Nazi”, http://www.beritasatu.com/articles/read/2010/11/1534/partai-nazi-.

“Pasar Tembakau Ditargetkan US$ 464,4 Miliar Tahun 2012”, www.bappenasnews.com/index.php/411-pasar-tembakau-ditargetkan-us-4644-miliar-tahun-2012.

“Pendapatan Cukai Rokok Capai Rp. 62,14 Triliun”, http://m.tempointeraktif.com/2010/12/21/300604/.

“Pengangguran Turun, Republik Kian Sejahtera?”, http://fokus.vivanews.com/news/read/218702-pengangguran-turun--belum-tentu-sejahtera.

“Perusahaan Asing Dominasi Tender Impor Gula”, 18 Desember 2006, http://www.tempointeraktif.com/share/?act=TmV3cw==&type=UHJpbnQ=&medi

a=bmV3cw==&y=JEdMT0JBTFNbeV0=&m=JEdMT0JBTFNbbV0=&d=JEdMT0JBTFNbZF0=&id=ODk2OTQ=.

"Pita Cukai Naik, Ratusan Pabrik Rokok Bertumbangan", http://industri.kontan.co.id/v2/read/1240460944/12267/Pita-Cukai-Naik-Ratusan-Pabrik-Rokok-Bertumbangan.

"Produksi Lokal Turun, Rokok Ilegal Makin Marak", http://preview.detik.com/detiknews/read/2006/09/01/135941/667059/4/produksi-lokal-turun-rokok-ilegal-makin-marak.

"Rokok Putih Bakal Rebut Pasar Rokok Kretek", http://www.jpnn.com/read/2011/02/08/84011/Rokok-Putih-Bakal-Rebut-Pasar-Rokok-Kretek-.

"RPP Tembakau Sarat Kepentingan Asing", http://www.mediaindonesia.com/read/2010/12/16/188422/92/14/RPP-Tembakau-Sarat-Kepentingan-Asing.

"Sampoerna, Setelah Akuisisi Terbesar Itu", http://ip52-214.cbn.net.id/id/arsip/2005/05/23/EB/mbm.20050523.EB114038.id.html.

"Taufik Abdullah, Sejarawan dan Peneliti", http://urangminang.wordpress.com/2008/01/03/taufik-abdullah/.

"Wangsit Di Bungkus Rokok", http://202.158.52.214/id/arsip/1980/09/06/ILS/mbm.19800906.ILS52637.id.html.

Tulisan Lepas

"Analisis Neoliberalisme", Revrisond Baswir, http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=198648&actmenu=45.

"Batang Kelapa sebagai Alternatif Batang Kayu Konvensional", Barly, *Duta Rimba*, 1994.

"Dulu Sekarang Sami Mawon", Faiz Manshur, http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/04/04/kilas-balik-petani-tembakau-kedu/.

"Irigasi dan Perkebunan di Karesidenan Besuki 1870-1930", Marjono, Soegijanto Padmo, Program Studi Sejarah, Program Pasca Sarjana Universitas

Gadjah Mada, *Sosiohumanika, 15(1)*: 2002.

“Kajian Ekonomi Keterkaitan Antara Perkembangan Industri Cengkeh dan Industri Rokok Kretek Nasional”, Grace A.J. Rumagit, IPB, 2007.

“Kopi Tubruk Simbol Pergerakan Nasional”, *Kompas*, 5 April 2010.

“Kretek sebagai Kritik Kebudayaan”, Waskitogiri Sasongko, http://komunitaskretek.or.id/artikel-22-kretek-sebagai-kritik-kebudayaan.html.

“Outlook Komoditas Pertanian Perkebunan”, Pusat Data dan Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, 2010.

“Perubahan Pola Agraris di Ambon-Lease dari Pola Monokultur menjadi Multikultur, 1855-1890”, Endang Susilowati, UI, 1988.

“Petani dan Tembakau Gupernemen di Karesidenan Rembang pada Periode Penanaman Tanaman Wajib”, Tri Handayani, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro.

“Plasma Nutfah Kelapa Terancam Hilang”, Dr. Ir. Hengky Novarianto, Tabloid *Sinar Tani*, 5-11 Maret 2008.

“Potret Industri Rokok Di Indonesia”, Tri Wibowo, http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/Tri-2.pdf.

“Ringkasan Eksekutif Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Cengkeh”, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, 2007.

“Roadmap Industri Gula”, Direktorat Jenderal Industri Agro Dan Kimia, Departemen Perindustrian, Jakarta: 2009.

“Roadmap Industri Pengolahan Kelapa”, Direktorat Jenderal Industri Agro Dan Kimia, Departemen Perindustrian, Jakarta: 2009.

“Sejarah VOC di Indonesia”, http://www.scribd.com/doc/13353992/Sejarah-VOC-di-Indonesia.

“Sigaret Kretek, Tonggak Bangsa”, J.A. Noertjahyo, http://heritageofjava.com/portal/article.php?story=20090326214811510.

“Strategi Kebijakan Peremajaan Kelapa Rakyat”, Dedi Soleh Effendi, Balai

Penelitian Tanaman Kelapa dan Palma Lain, 2008.

"Struktur, Kinerja, dan Kluster Industri Rokok Kretek: Indonesia, 1996-1999", Simon Bambang Sumarno, Mudrajat Kuncoro.

"Tobacco and Kretek: Indonesian Drugs in Historical Change", Monika Arnez, *ASEAS - Austrian Journal of South-East Asian Studies, 2 (1)*, 2009.

Buku

Amal, M. Adnan, *Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta: 2010.

Asba, Rasyid, *Kopra Makassar Perebutan Pusat dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2007.

Budiman, A., & Onghokham, *Rokok Kretek: Lintasan Sejarah dan Artinya bagi Pembangunan Bangsa dan Negara*, Jarum, Kudus: 1987.

Castles, Lance, *Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*, Sinar Harapan, Jakarta: 1982.

Chang, Ha-Joon, *Bad Samaritans: Negara-Negara Kaya, Kebijakan-Kebijakan Buruk, dan Ancaman bagi Dunia Berkembang*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta: 2008.

Daeng, Salamuddin, dkk, *Kriminalisasi Berujung Monopoli: Industri Tembakau Indonesia di Tengah Pusaran Kampanye Regulasi Anti Rokok Internasional*, Indonesia Berdikari, Jakarta: 2011.

Fife, Bruce, C.N., ND,. 2004. *Coconut Oil Miracle*, Jakarta. Bhuana Ilmu Populer.

Hafsah, Dr. Ir. Mohamad Jafar, *Bisnis Gula di Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta: 2002.

Hanusz, Mark, *Kretek: The Culture and Heritage of Indonesia's Clove Cigarettes*, Equinox Publishing (Asia), Jakarta: 2003.

Heersink, Christian, *Dependence on Green Gold: A Socio-economic History of*

the Indonesian Coconut Island Selayar, KITLV Press, Leiden: 1999.

Inandiak, Elizabeth D., & Lesmana, Laddy, *Centhini: Minggatnya Cebolang*, Galang press, Yogyakarta: 2005.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: 2003.

Khudori*, Gula Rasa Neoliberalisme: Pergumulan Empat Abad Industri Gula*, LP3ES, Jakarta: 2005.

Murray Li, Tania, *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2002.

Pahan, Iyung, *Panduan Lengkap Kelapa Sawit*, Penebar Swadaya, Jakarta: 2008.

Poesponegoro, Marwati Djoened & Notosusanto, Nugroho, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda*, Balai Pustaka, Jakarta: 2008.

Rachman, Anwar Jimpe (ed), *Petambak Garam Indonesia: Dalam Kepungan Kebijakan dan Modal*, Ininnawa, Indonesia Berdikari, & INFID, Makassar: 2011.

Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Serambi, Jakarta: 2007.

Rodney, Walter, *How Europe Underdeveloped Africa*, Howard University Press, Washington, D.C.: 1974.

Standage, Tom, *A History of World in 6 Glasses*, Walker Publishing Company, New York: 2006.

Supari, Siti Fadilah, *Saatnya Dunia Berubah: Tangan Tuhan Dibalik Virus Flu Burung*, Sulaksana Watinsa Indonesia, Jakarta: 2008.

Suprana, Jaya, *Jamu Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan* dalam Kristanto, J.B. (ed.), *1000 Tahun Nusantara*, Kompas, Jakarta: 2000.

Suprana, Jaya, *Naskah-Naskah Kompas Jaya Suprana*, Elex Media Komputindo, Jakarta: 2009.

Topatimasang, Roem, (ed), dkk, *Kretek: Kajian Ekonomi dan Budaya 4 Kota*, Indonesia Berdikari, Yogyakarta, 2010.

Vlekke, B.H.M., *Nusantara: Sejarah Indonesia*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta: 2008.

Wijayakusuma, H.M. Hembing, *Ensiklopedia Milenium: Tumbuhan Berkhasiat Obat Indonesia Jilid I*, Prestasi, Jakarta: 2000.

TIM PENULIS

Abhisam DM, bergelut dengan dunia pergerakan sejak masih SMA. Mendirikan Gabungan Aksi Pelajar Cinta Indonesia (GAPCI) tahun 1997. Tahun 1999 memimpin Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP), dan setahun kemudian telah menjabat sebagai ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Yogyakarta. Kecintaannya kepada ingar-bingar situasi politik diimbangi dengan berkegiatan di Majestic 55, Keluarga Pecinta Alam Fakultas Hukum UGM. Pernah bekerja sebagai wartawan dan pegiat LSM. Sekarang beraktivitas di Komunitas Kretek, sambil menyelesaikan novel sejarahnya.

Hasriadi Ary, menamatkan pascasarjana di School for International Training (SIT), Vermont, Amerika Serikat (2009), setelah menyelesaikan kuliah Sastra Inggris, Universitas Hasanuddin, Makassar (2003). Ikut mendirikan Komunitas Ininnawa dan Rumah Kaum Muda di Makassar. Sambil tetap aktif mengikuti berbagai penelitian di beberapa daerah di Indonesia, kini bergiat membangun gerakan kedaulatan pangan bersama para petani lokal di kaki Gunung Saraung dan Bawakaraeng, Sulawesi Selatan.

Miranda Harlan, gemar bertanam dan menyunting kata-kata. Memulai kecintaannya kepada menulis ketika terlibat di dalam Teater Gadjah Mada UGM. Prosa pertamanya dipublikasikan tahun 2004. Tahun 2007 diundang untuk mengikuti International Visitor Program on Young Writers and Artists. Selain beraktivitas di Komunitas Kretek, juga menjadi bagian dari Padepokan Seni Bagong Kussudiardja dan Perkumpulan Seni Indonesia. Buku terakhirnya, *Burung-Burung Migran*, berkisah tentang irisan antara pilihan menjadi buruh migran dan kemerdekaan perempuan, terbit Agustus 2011.

Kedoknya sama, isu-isu "mulia". Aktornya sama, segitiga raksasa korporasi multinasional, negara-negara maju, dan lembaga-lembaga internasional. Modusnya serupa, persaingan dagang berkedok "kemuliaan", dan dipaksakan lewat kebijakan. Tujuannya jelas, akumulasi kekayaan. Hasilnya lebih jelas lagi, sekian komoditas unggul Nusantara hancur. Ekonomi negara terpuruk. Setelah kopra, gula, garam, jamu, dan puluhan lainnya, kini menyusul kretek. Rokok khas Indonesia, yang industrinya telah bertahan satu abad lebih, dihajar habis dengan dalih kesehatan dunia. Sejak kampanye antitembakau makin massif di Indonesia, impor tembakau justru meningkat. Impor rokok juga meningkat. Ekspor kretek diblokade. Dua raksasa kretek—Sampoerna dan Bentoel—dicaplok. Ribuan pabrik kecil kretek gulung tikar. Di sisi lain, obat-obat berhenti merokok produk korporasi farmasi multinasional menyerbu masuk. Sejarah tengah berulang; kendali atas perputaran uang triliunan rupiah diambil-alih, untuk dilarikan ke luar negeri ini.

"Sekarang budaya kretek sedang ditikam. Dan kalau pelan-pelan kebudayaan terbunuh, bisa dipastikan persekutuan kolonialis global semakin leluasa membonsai Indonesia. Kita pun semakin dikerdilkan, dan semakin mudah dipermainkan. Buku ini membekali wawasan dan pengetahuan kita untuk terus melawan setiap upaya penghancuran kebudayaan lokal."

—**Butet Kartaredjasa**, aktor

"Rekomendasi saya: jangan baca buku ini kalau Anda tidak ingin pikiran Anda terganggu. Jangan baca buku ini jika Anda merasa sudah di zona aman dan nyaman. Jangan baca buku ini jika Anda merasa sudah banyak tahu, dan tidak begitu peduli seandainya ada kemungkinan yang Anda tahu itu ternyata palsu."

—**Noe 'Letto'**, musisi

"Apa penyakit yang kita idap? Kehilangan rasa kebangsaan, kehilangan rasa kemanusiaan, atau kebanyakan watak serakah, yang membuat kita tak peduli bangsa kita mati?"

—**Mohamad Sobary,** budayawan

"Mitos-mitos kesehatan telah diciptakan. Bahaya tembakau dibesar-besarkan. Semuanya bukan dalam kerangka kejujuran ilmiah, melainkan atas nama kepentingan. Maka, tak banyak yang mau membuka mata bahwa partikel asap rokok bisa diolah menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Baca buku ini, dan sedikit banyak Anda akan paham apa yang sesungguhnya sedang terjadi."

—**dr. Saraswati, M.Psi.**, peneliti pada Lembaga Penelitian Peluruhan Radikal Bebas, Malang